

# JURNA

## AKUNTANSI & MANAJEMEN

### JAM

TERAKREDITASI SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

#### **DETERMINAN KOEFISIEN RESPON LABA**

*Yulius Kurnia Susanto*

#### **DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

*Rudy Badrudin*

#### **EVALUASI DETERMINAN SUSTAINABILITAS PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA**

*Sukidin*

#### **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

*Dody Hapsoro*

#### **PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN ASPEK-ASPEK SUPERVISI TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL**

*Christina Sososutiksno*

#### **DETERMINAN DAN KONSEKUENSI PELAPORAN KELEMAHAN MATERIAL PENGENDALIAN INTERNAL DALAM KONTEKS *THE SARBANES OXLEY ACT OF 2002***

*Djoko Susanto*



**Rp7.500,-**

JAM	VOL. 23	NO. 32	Hal 153-247	DESEMBER 2012	ISSN: 0853-1259
-----	---------	--------	-------------	---------------	-----------------

Vol. 23, No. 3, Desember 2012

ISSN: 0853-1259

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

## **JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN (JAM)**

**TERAKREDITASI**  
**SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010**

*EDITOR IN CHIEF*

Djoko Susanto  
*STIE YKPN Yogyakarta*

*EDITORIAL BOARD MEMBERS*

Dody Hapsoro  
*STIE YKPN Yogyakarta*

I Putu Sugiarta Sanjaya  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Dorothea Wahyu Ariani  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Jaka Sriyana  
*Universitas Islam Indonesia*

*MANAGING EDITORS*

Baldric Siregar  
*STIE YKPN Yogyakarta*

*EDITORIAL SECRETARY*

Rudy Badrudin  
*STIE YKPN Yogyakarta*

*PUBLISHER*

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1100 Fax. (0274) 486155

*EDITORIAL ADDRESS*

Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155  
<http://www.stieykn.ac.id> • e-mail: [rudy.badrudin@stieykn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykn.ac.id)  
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 – 0095042814

Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM) terbit sejak tahun 1990. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM dimaksudkan sebagai media penguangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen. Setiap naskah yang dikirimkan ke JAM akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JAM diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Harga langganan JAM Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp17.500,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JAM dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykn.ac.id>).

## **DAFTAR ISI**

**TERAKREDITASI**  
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

**DETERMINAN KOEFISIEN RESPON LABA**

*Yulius Kurnia Susanto*  
**153-163**

**DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

*Rudy Badrudin*  
**165-186**

**EVALUASI DETERMINAN SUSTAINABILITAS PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN  
MAHASISWA**

*Sukidin*  
**187-197**

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

*Dody Hapsoro*  
**199-215**

**PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN ASPEK-ASPEK SUPERVISI  
TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL**

*Christina Sososutiksno*  
**217-226**

**DETERMINAN DAN KONSEKUENSI PELAPORAN KELEMAHAN MATERIAL PENGENDALIAN INTERNAL  
DALAM KONTEKS THE SARBANES OXLEY ACT OF 2002**

*Djoko Susanto*  
**227-247**

Vol. 23, No. 3, Desember 2012

ISSN: 0853-1259

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

**MITRA BESTARI**  
**JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN (JAM)**  
**TERAKREDITASI**  
**SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010**

*Editorial JAM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MITRA BESTARI yang telah menelaah naskah sesuai dengan bidangnya. Berikut ini adalah nama dan asal institusi MITRA BESTARI yang telah melakukan telaah terhadap naskah yang masuk ke editorial JAM Vol. 23, No. 1, April 2012; Vol. 23, No. 2, Agustus 2012; dan Vol. 23, No. 3, Desember 2012.*

**Andreas Lako**

*Universitas Katholik Soegijapranata*

**Agus Suman**

*Universitas Brawijaya*

**Akhmad Makhfatih**

*Universitas Gadjah Mada*

**Didin Fatihudin**

*Universitas Muhammadiyah Surabaya*

**FX. Sugiyanto**

*Universitas Diponegoro*

**HM. Wahyuddin**

*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

**Mahmudah Enny W., M.Si.**

*Universitas Bhayangkara Surabaya*

**R. Maryatmo**

*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

**Wasiaturrahma**

*Universitas Airlangga*

## DETERMINAN KOEFISIEN RESPON LABA

**Yulius Kurnia Susanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti  
Jalan Kyai Tapa Nomor 20 Grogol, Jakarta  
E-mail: yulius@stietrisakti.ac.id

### ABSTRACT

The purpose of this study is to get the empirical evidence of factors that influence earnings response coefficient on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The factors that being examined are capital structure, audit reputation, growth opportunity, profitability, firm size, systematic risk, earnings persistence and share volatility. The study used purposive sampling method on sample selection from manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2007 until 2009. Data collected using secondary data and the hypotheses is tested using moderating regression analysis. The result of the research show that audit reputation, growth opportunity, firm size, systematic risk and share volatility have influence to earnings response coefficient. While capital structure, profitability and earnings persistence have no significantly influence to earnings response coefficient.

**Keywords:** earnings response coefficient, capital structure, audit reputation, growth opportunity, profitability, firm size, systematic risk, earnings persistence, share volatility

JEL classification: G14, G32

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan harus dapat mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya agar dapat bermanfaat bagi investor dan kreditur. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan haruslah informasi yang mempunyai relevansi. Salah satu indikator suatu informasi akuntansi yang relevan adalah adanya reaksi pemodal pada saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya pergerakan saham (Naimah dan Utama 2006). Keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pelaku pasar berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan umumnya tercermin dalam tindakan pelaku pasar yang disebut dengan reaksi pasar. Reaksi pasar dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah pengumuman yang berhubungan dengan laba.

*Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1* menyatakan laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit (Delaney *et al.*, 2002). Begitu pentingnya hal ini, sehingga sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang laba akuntansi. Teori-teori serta bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam hubungan antara laba dan *re-*

turn saham. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan antara laba dan *return* saham adalah *Earnings Response Coefficient* (ERC) atau Koefisien Respon Laba.

Hubungan antara harga dan laba diteliti pertamakali oleh Ball dan Brown (1968) yang mengungkapkan tentang isi informasi dengan analisis apabila perubahan *unexpected earnings* positif maka memiliki *abnormal rate of return* rata-rata positif dan jika perubahan *unexpected earnings* negatif, maka memiliki *abnormal rate of return* rata-rata negatif. Penelitian Utami dan Suharmadi dalam Palupi (2006) membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara laba dengan tingkat *return* saham perusahaan. Besaran yang menunjukkan hubungan antara laba dan *return* saham disebut dengan koefisien respon laba sebagai besarnya koefisien *slope* dalam regresi yang menghubungkan laba sebagai salah satu variabel bebas dan *return* saham sebagai variabel terikat.

Penelitian mengenai koefisien respon laba berguna dalam analisis fundamental oleh investor, dalam model penilaian untuk menentukan reaksi pasar atas informasi laba suatu perusahaan. Kespesifikan ini dipengaruhi oleh beberapa beberapa faktor. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba maka dapat diketahui kemungkinan besar kecilnya harga saham atas informasi laba dari suatu perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi koefisien respon laba adalah struktur modal, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), kesempatan bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko sistematis, persistensi laba dan volatilitas saham.

Dengan adanya perkembangan penelitian yang mengamati beberapa variabel yang mempengaruhi koefisien respon laba yang menghasilkan temuan berbeda, maka penelitian mengenai koefisien respon laba masih menarik untuk diamati. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur modal, reputasi Kantor Akuntan Publik, kesempatan bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko sistematis, persistensi laba, dan volatilitas *return* saham terhadap koefisien respon laba.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori *signaling* salah satu fungsinya untuk menilai adanya informasi. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi yang menurut pertimbangannya akan diminati oleh para pemegang saham. Manajemen juga akan menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Suwardjono, 2006).

Upaya yang dilakukan manager untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham adalah dengan memberikan informasi tentang laba kepada pasar untuk meningkatkan harga saham (Jaswadi, 2004). Laba yang dilaporkan merupakan *signal* mengenai laba di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan dapat membuat prediksi atas laba perusahaan untuk masa yang akan datang berdasarkan *signal* yang disediakan manajemen melalui laba yang dilaporkan (Assih dan Gudono, 2000).

Besaran yang menunjukkan hubungan antara laba dan *return* saham yang digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi pasar terhadap informasi mengenai perusahaan yang tercermin dengan dikeluarkannya laporan keuangan, terutama informasi laba dikenal dengan istilah ERC. Besaran dan nilai ERC menunjukkan keinformatifan informasi laba dan arah reaksi pasar terhadap pengumuman (Febrianto dan Widiastuti, 2006). ERC dari setiap sekuritas berbeda-beda besarnya karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ERC suatu sekuritas. Struktur modal perusahaan diprosikan dengan *leverage*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti memiliki utang yang lebih banyak dibandingkan modal. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan laba maka yang diuntungkan adalah *debtholders*, sehingga semakin baik kondisi laba perusahaan maka semakin negatif respon pemegang saham, karena pemegang saham beranggapan bahwa laba tersebut hanya menguntungkan kreditur.

Penelitian Mulyani *et al.* (2007) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Setiati dan Kusuma (2004), Harahap (2004), Mayangsari (2004), dan Jang *et al.* (2007). Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Chandrarin (2003) dan Jaswadi (2004) yang menyimpulkan bahwa struktur modal tidak

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>1</sub>** Struktur modal akuntansi berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Kualitas auditor merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga sampai saat ini tidak ada definisi yang seragam mengenai kualitas audit tersebut. Kesulitan dalam mengukur kualitas auditor tersebut menyebabkan banyak penelitian empiris yang menggunakan beberapa dimensi atau proksi sebagai wakil dari kualitas audit tersebut. Beberapa proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai kualitas auditor adalah spesialisasi industri auditor (Mayangsari 2004) dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mulyani *et al.* 2007).

Diterbitkannya informasi keuangan berupa informasi laba yang diperoleh dalam suatu periode akan mempengaruhi ekspektasi investor mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan, dan akan tercerminkan dalam perubahan harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Nilai ERC suatu saham dipengaruhi oleh kualitas laba yang dilaporkan perusahaan dan persepsi mengenai kualitas laba tersebut juga dapat dipengaruhi oleh KAP yang mengaudit perusahaan tersebut, karena investor beranggapan bahwa laporan *earnings* dari auditor yang berkualitas akan lebih akurat dan dapat mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya (Teoh dan Wong dalam Mayangsari 2004).

Hasil penelitian Riyatno (2007) menunjukkan bahwa ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Auditor yang berkualitas akan menambah kredibilitas informasi laba yang disampaikan oleh perusahaan. Hal itu akan menjadikan investor lebih percaya dan yakin akan informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Mayangsari (2004), Berbeda dengan Mulyani *et al.* (2007) yang menyimpulkan bahwa kualitas auditor tidak mempengaruhi reaksi pasar pada saat pengumuman laporan keuangan. Hal ini terjadi karena tujuan investor dalam membaca atau menggunakan laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Peran auditor hanya sebagai pihak independen antara perusahaan dengan investor, sehingga investor tidak

mempermasalahkan apakah laporan keuangan diaudit oleh auditor yang berkualitas atau tidak berkualitas. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>2</sub>** Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Kesempatan bertumbuh yang dihadapi perusahaan di waktu yang akan datang merupakan suatu prospek baik yang dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Kesempatan bertumbuh tersebut hanya dapat direalisasi oleh perusahaan melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut akan memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga dapat berdampak langsung pada kondisi likuiditas perusahaan.

Laba suatu perusahaan dari tahun ke tahun dapat meningkat atau mengalami penurunan. Peningkatan laba yang stabil dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan baik. Demikian juga sebaliknya, penurunan laba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan kurang baik. Jika semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. Penilaian pasar (investor/pemegang saham) terhadap kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya (Palupi, 2006). Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar kepada perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan bertumbuh yang tinggi akan memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi investor.

Penelitian Mulyani *et al.* (2007) menyimpulkan kesempatan bertumbuh memberikan pengaruh secara positif terhadap koefisien respon laba. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin tinggi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. Berbeda dengan penelitian Palupi (2006) yang menemukan bahwa kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap ERC, konsisten dengan penelitian Chandrarin (2003), Harahap (2004), Jaswadi (2004), Setiati dan Kusuma (2004), Palupi (2006), serta Sayekti dan Wondabio (2007) yang juga menemukan

bahwa kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>3</sub>** Kesempatan bertumbuh berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Profitabilitas perusahaan mencerminkan efektivitas perusahaan yang mempengaruhi respon investor terhadap informasi laba dalam pengambilan keputusan investasi. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, karena mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan (Susilawati, 2008). Kinerja perusahaan yang baik akan mendorong kualitas informasi laba yang baik, sehingga investor bereaksi atas pengumuman laba yang dilakukan perusahaan.

Pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham akan lebih besar dibanding dengan perusahaan yang mengalami profitabilitas rendah (Naimah dan Utama, 2006). Hasil yang berlawanan ditemukan oleh Susilawati (2008) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>4</sub>** Profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Ukuran perusahaan merupakan variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya perusahaan sampel. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini perusahaan mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, diprediksi relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan kecil. Jika prospek perusahaan baik karena lebih mampu menghasilkan laba maka akan dapat menarik investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan besar dianggap memiliki lebih banyak informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam saham

perusahaan dibandingkan perusahaan kecil (Siregar dan Utama, 2006). Konsekuensinya semakin informatif harga saham, maka semakin kecil pula muatan informasi *earnings* sekarang (Mulyani *et al.*, 2007). Semakin besar ukuran perusahaan akan mempunyai informasi yang lebih daripada perusahaan kecil, sehingga investor akan menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan investasi (Harahap, 2004).

Mulyani *et al.* (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap koefisien respon laba, konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2004) dan Mayangsari (2004). Namun, hasil penelitian berbeda dengan temuan Palupi (2006), Chandarin (2003), dan Jaswadi (2004) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap ERC. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>5</sub>** Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Investor akan mengurangi tingkat risiko yang diterimanya dengan mempertimbangkan risiko spesifik suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasinya. Sensitivitas investor terhadap informasi mengenai perusahaan berisiko kecil akan lebih besar karena perusahaan dengan risiko lebih kecil lebih dipercaya (Palupi 2006). Penelitian Mulyani *et al.* (2007) menunjukkan bahwa risiko sistematis berhubungan negatif dengan ERC. Berbeda dengan Palupi (2006) yang menemukan bahwa risiko sistematis memberikan pengaruh secara positif terhadap koefisien respon laba, yang artinya semakin besar risiko sistematis, maka semakin besar koefisien respon laba. Hal ini terjadi karena investor di Indonesia bukanlah investor yang *risk neutral*. Terhadap perusahaan berisiko sistematis kecil, investor cenderung tidak sensitif terhadap informasi laba dan sebaliknya terhadap perusahaan berisiko sistematis besar, karena investor tidak ingin mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan setiap perubahan pada laba perusahaan berisiko besar. Hasil penelitian Harahap (2004), Jaswadi (2004), dan Chandarin (2003) mengindikasikan bahwa risiko sistematis tidak memberikan pengaruh terhadap ERC. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>6</sub>** Risiko sistematis berpengaruh terhadap koefisien

respon laba.

Persistensi laba akuntansi adalah revisi laba akuntansi yang diharapkan di masa depan yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham (Pennman dalam Palupi, 2006). Persistensi laba mencerminkan kualitas laba perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu. Mulyani *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa persistensi laba memberikan pengaruh secara positif dengan ERC, artinya semakin tinggi persistensi laba maka semakin tinggi ERC, Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin (2003), Setiati dan Kusuma (2004), Mayangsari (2004), Jaswadi (2004), Palupi (2006), dan Jang *et al.* (2007). Namun, berbeda dengan penelitian Harahap (2004) yang menyimpulkan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>7</sub>** Persistensi laba berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar atas suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu

pengumuman. Tujuan studi peristiwa adalah untuk mengukur hubungan antara suatu peristiwa atau informasi dengan reaksi pasar apakah informasi tersebut dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Studi peristiwa ini juga sering disebut dengan pengujian kandungan informasi. Jika pengumuman mengandung informasi maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar dan reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya volatilitas return saham sekitar tanggal publikasi laba (Mulyani *et al.*, 2007). Informasi laba juga merupakan salah satu informasi yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menahan atau menjual suatu sekuritas. Informasi laba akan mempengaruhi penilaian investor terhadap harga saham, Harga saham yang memiliki volatilitas tinggi di sekitar tanggal publikasi laba maka cenderung direspon oleh investor. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>8</sub>** Volatilitas saham berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling method*, Adapun proses pemilihan sampel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Proses Pemilihan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009	149
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2009	(24)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan tahun fiskalnya tidak berakhir pada 31 Desember	(7)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba selama periode penelitian	(46)
Perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian kantor akuntan publik selama periode penelitian	(18)
Jumlah perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel	54
Jumlah data selama 3 tahun	162
Jumlah data yang diolah	139

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan yang diperoleh di Pusat Referensi Pasar Modal, *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.yahoofinance.com](http://www.yahoofinance.com), [www.duniainvestasi.com](http://www.duniainvestasi.com), dan BAPEPAM-LK. Data yang digunakan adalah harga pasar saham, indeks harga saham gabungan (IHSG), laporan keuangan kuartalan dan tahunan perusahaan, serta tanggal publikasi laporan keuangan atau tanggal penyerahan laporan keuangan ke BAPEPAM-LK.

ERC adalah ukuran besaran *abnormal return* suatu sekuritas sebagai respon terhadap komponen laba kejutan (*unexpected earnings*) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. ERC merupakan proksi dari kualitas laba. Besarnya ERC diperoleh dengan menggunakan beberapa tahap perhitungan.

Tahap pertama adalah mencari *return* saham harian dan *return* pasar harian. *Return* saham harian dihitung dengan rumus:

$$R_{it} = \frac{(P_{it} - P_{it-1})}{P_{it-1}}$$

Keterangan:  $R_{it}$  *return* saham perusahaan *i* pada hari *t*,  $P_{it}$  harga penutupan saham *i* pada hari *t*,  $P_{it-1}$  harga penutupan saham *i* pada pada hari *t-1*  
*Return* pasar harian dihitung sebagai berikut:

$$R_{m,t} = \frac{(IHSG_t - IHSG_{t-1})}{IHSG_{t-1}}$$

Keterangan:  $R_{m,t}$  *return* pasar harian,  $IHSG_t$  indeks harga saham gabungan pada hari *t*,  $IHSG_{t-1}$  indeks harga saham gabungan pada hari *t-1*.

Tahap kedua adalah menghitung *abnormal return*. Dalam penelitian ini *abnormal return* dihitung menggunakan model sesuaian pasar (*market adjusted model*). *Abnormal return* diperoleh dari:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{m,t}$$

Keterangan:  $AR_{i,t}$  *abnormal return* perusahaan *i* pada perioda ke- *t*,  $R_{i,t}$  *return* perusahaan pada perioda ke-*t*,  $R_{m,t}$  *return* pasar pada perioda ke-*t*.

Tahap ketiga adalah menghitung variabel *Cummulative Abnormal Return* (CAR) dengan menggunakan rumus:

$$CAR_{i(-3,+3)} = \sum_{t=-3}^{+3} AR_{i,t}$$

Keterangan:  $CAR_{i(-3,+3)}$  *Abnormal return* kumulatif perusahaan *i* selama periode pengamatan

kurang lebih 3 hari dari tanggal publikasi laporan keuangan (3 hari sebelum, 1 hari tanggal publikasi dan 3 hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan),  $AR_{it}$  *Abnormal return* perusahaan *i* pada hari *t*.

Menghitung *Unexpected Earnings* (UE) dengan model *random walk*. UE diartikan sebagai selisih laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. UE diukur sesuai dengan penelitian Kalaapur dalam Murwaningsari (2008):

$$UE_{it} = \frac{(EPS_{it} - EPS_{it-1})}{P_{it-1}}$$

Keterangan:  $UE_{it}$  *unexpected earnings* perusahaan *i* pada perioda *t*,  $EPS_{it}$  *earnings per share* perusahaan *i* pada perioda *t*,  $EPS_{it-1}$  *earnings per share* perusahaan *i* pada perioda *t-1*,  $P_{it-1}$  harga saham perusahaan *i* pada perioda *t-1*

Struktur modal perusahaan diproksikan dengan *leverage*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih banyak dibandingkan modal. Dengan demikian jika terjadi peningkatan laba, maka yang diuntungkan adalah *debtholders* (Mayangsari, 2004). *Leverage* dihitung dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aset perusahaan.

$$Lev = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

Reputasi KAP membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big four accounting firms*) dan KAP kecil (*Non big four accounting firms*). Variabel ini diukur dengan variabel *dummy* dengan skala nominal. Apabila sampel perusahaan diaudit oleh salah satu dari *big four accounting firms* maka diberi nilai 1, sedangkan yang bukan diaudit oleh *big four accounting firms* diberi nilai 0.

Penilaian investor terhadap kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya. Menurut Palupi (2006) pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar kepada perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang tinggi, karena akan memberikan manfaat yang tinggi di masa yang akan datang. Variabel kesempatan bertumbuh diukur dari *market to book value ratio* dengan rumus:

$$\text{Market to book ratio} = \frac{\text{Nilai Pasar Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Ekuitas}}$$

Profitabilitas merupakan salah satu elemen dalam penilaian kinerja dan efisiensi perusahaan. Profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan rasio laba terhadap nilai buku ekuitas yang dapat mencerminkan hasil penggunaan sumber daya perusahaan (Naimah dan Utama 2006).

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}}$$

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil (Mulyani *et al.*, 2007). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *natural log of asset*. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini mereplikasi model yang digunakan dalam Mulyani *et al.* (2007). Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Risiko sistematis dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model *Capital Asset Pricing Model* (CAPM). Risiko sistematis ditunjukkan dari *slope* regresi pada persamaan *return* perusahaan dengan *return* pasar.

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_{it} R_{mt} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:  $R_{it}$  Return perusahaan  $i$  pada periode  $t$ ,  $R_{mt}$  Return pasar pada periode  $t$ ,  $\epsilon_{it}$  Komponen *error* dalam model atas perusahaan  $i$  pada periode  $t$ . Persistensi laba adalah properti laba yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang (Setiati dan Kusuma, 2004). Semakin persisten laba akuntansi, maka semakin kuat hubungan antara laba akuntansi dengan *abnormal return* (semakin besar koefisien respon laba). Persistensi laba diukur dari *slope* regresi atas perbedaan laba saat ini dengan laba sebelumnya.

$$X_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it-1} X_{it-1} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:  $X_{it}$  Laba perusahaan  $i$  pada periode  $t$ ,  $X_{it-1}$  Laba perusahaan  $i$  pada periode  $t-1$ ,  $\epsilon_{it}$  Komponen *error* dalam model atas perusahaan  $i$  pada periode  $t$ . Volatilitas saham menunjukkan seberapa besar fluktuasi *return* saham di sekitar tanggal publikasi laba yang

akan direspon oleh pasar. Volatilitas saham diukur dengan melihat deviasi standar dari return saham 3 hari sebelum tanggal publikasi laba, saat tanggal publikasi laba dan 3 hari sesudah tanggal publikasi laba.

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *moderating regression analysis* dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} CAR_{it} = & b_0 + b_1 UE_{it} + b_2 SM_{it} + b_3 RKAP_{it} + b_4 GO_{it} + \\ & b_5 Profit_{it} + b_6 UK_{it} + b_7 Risk_{it} + b_8 PL_{it} + b_9 Vol_{it} + \\ & b_{10} SM * UE_{it} + b_{11} RKAP * UE_{it} + b_{12} GO * UE_{it} + \\ & b_{13} Profit * UE_{it} + b_{14} UK * UE_{it} + b_{15} Risk * UE_{it} + \\ & b_{16} PL * UE_{it} + b_{17} Vol * UE_{it} + \epsilon_{it} \end{aligned}$$

Keterangan: CAR *Cumulative Abnormal return* selama periode pengamatan kurang lebih 3 hari dari tanggal publikasi laporan keuangan (3 hari sebelum, 1 hari tanggal publikasi dan 3 hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan, UE *Unexpected Earnings*, SM Struktur modal, RKAP Reputasi KAP, GO Kesempatan bertumbuh, PROFIT Profitabilitas, UK Ukuran perusahaan, Risk Risiko sistematis, PL Persistensi laba, Vol Volatilitas Saham dan  $\epsilon$  *error*.

ERC merupakan besaran pengaruh UE terhadap CAR. Untuk menjawab hipotesis dilihat dari nilai koefisien interaksi antara UE dan variabel independen, yaitu Struktur modal, Reputasi KAP, Kesempatan bertumbuh, Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Risiko sistematis, Persistensi laba dan Volatilitas Saham. Nilai koefisien interaksi menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap Koefisien Respon Laba.

## HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku dari variabel-variabel yang diteliti. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan pada Tabel 3, interaksi antara UE dan SM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,162 maka  $H_1$  tidak terdukung, yang berarti struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan RKAP memiliki nilai signifikansi 0,064 di bawah 0,10 maka  $H_2$

**Tabel 2**  
**Statistika Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>n</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
UE	139	-0,450	1,490	0,0804	0,20824
SM	139	0,070	0,920	0,4301	0,19133
RKAP	139	0	1	0,6500	0,477
GO	139	0,220	35,450	2,5180	4,27990
PROFIT	139	0,002	3,240	0,2094	0,30246
UK	139	24,850	32,120	28,0863	1,52646
RISK	139	-9,140	6,440	0,1744	1,39964
PL	139	-9,630	1,590	-0,2802	1,12830
VOL	139	0	0,150	0,0241	0,02672
CAR	139	-0,190	0,380	0,0018	0,06420

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
Konstanta	-0,171	-1,804	0,074		
UE	2,105	2,967	0,004	0,001	1560,308
SM	-0,042	-1,810	0,073	0,721	1,388
RKAP	-0,010	-0,952	0,343	0,565	1,769
GO	-0,003	-1,678	0,096	0,257	3,898
PROFIT	-0,018	-0,455	0,650	0,094	10,629
UK	0,007	1,911	0,058	0,469	2,131
RISK	0,005	1,236	0,219	0,502	1,992
PL	-0,007	-2,032	0,044	0,915	1,093
VOL	0,347	2,071	0,041	0,697	1,435
UE*SM	-0,236	-1,408	0,162	0,060	16,685
UE*RKAP	0,132	1,866	0,064	0,114	8,759
UE*GO	0,057	2,225	0,028	0,118	8,491
UE*PROFIT	-0,147	-0,929	0,355	0,086	11,656
UE*UK	-0,082	-2,965	0,004	0,001	1716,607
UE*RISK	-0,067	-3,599	0,000	0,227	4,411
UE*PL	0,001	0,031	0,975	0,694	1,440
UE*VOL	5,264	6,086	0,000	0,104	9,635

*Adjusted R*<sup>2</sup> 0,532;  $F_{17,121}$  10,221 *p-value*: 0,000; *Kolmogorov-Smirnov*  
*Z residual*: 1,122 *p-value*: 0,161

terdukung, yang berarti reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba.

Interaksi antara UE dan GO memiliki nilai signifikan 0,028 di bawah 0,05 maka  $H_3$  terdukung yang berarti kesempatan bertumbuh berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan Profit memiliki nilai signifikan 0,355 maka  $H_4$  tidak terdukung yang artinya yang berarti profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan UK memiliki nilai signifikan 0,004 di bawah 0,05 maka  $H_5$  terdukung yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan Risk memiliki nilai signifikan 0,000 di bawah 0,05 maka  $H_6$  terdukung yang artinya risiko sistematis berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan PL memiliki nilai signifikan 0,975 maka  $H_7$  tidak terdukung yang berarti persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Interaksi antara UE dan Vol memiliki nilai signifikan 0,000 di bawah 0,05 maka  $H_8$  terdukung yang artinya volatilitas saham berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

Struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dibandingkan modal tidak menyebabkan investor merespon karena investor beranggapan bahwa perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran hutang daripada pembagian dividen. Hal ini konsisten dengan penelitian Chandrarin (2003) dan Jaswadi (2004) yang menyimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Namun, tidak konsisten dengan penelitian Mulyani *et al.* (2007), Setiati dan Kusuma (2004), Harahap (2004), Mayangsari (2004), Jang *et al.* (2007) dan Mayangsari (2008).

Reputasi KAP berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor memperhatikan reputasi KAP dalam mengaudit perusahaan publik. Investor cenderung merespon perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*. Hasil penelitian konsisten dengan Mayangsari (2004). Kesempatan bertumbuh berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Motivasi investor dalam investasinya untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, yaitu memiliki perusahaan pada perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Mulyani *et al.* (2007).

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Apabila investor berpendapat bahwa ROE tidak dapat mengukur kinerja perusahaan secara akurat, karena banyak terjadi *window dressing* yang dilakukan oleh manajemen agar laporan keuangan perusahaan menjadi terlihat lebih baik. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Susilawati (2008). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Perusahaan besar cenderung kurang mendapatkan respon dalam publikasi laba karena labanya relatif stabil. Hal ini dapat dilihat dari harga saham di sekitar tanggal publikasi laba yang relatif stabil. Sedangkan perusahaan kecil dalam publikasi laba cenderung direspon oleh pasar, terlihat dari harga saham di sekitar tanggal publikasi laba yang cenderung fluktuatif. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Mulyani *et al.* (2007), Harahap (2004) dan Mayangsari (2004).

Risiko sistematis berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Semakin kecil risiko sistematik maka pasar cenderung merespon publikasi laba. Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Harahap (2004), Jaswadi (2004), dan Chandarin (2003). Selain risiko sistematis, risiko dari perusahaan, yaitu risiko kegagalan dalam membayar hutang berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba. Persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Pasar cenderung untuk tidak merespon perusahaan yang memiliki persistensi laba, karena investor cenderung investasi pada perusahaan dengan laba yang relative tidak stabil. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Harahap (2004). Volatilitas saham berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Pasar cenderung merespon publikasi laba pada perusahaan yang harga sahamnya fluktuatif di sekitar tanggal publikasi laba. Semakin fluktuatif saham di sekitar tanggal publikasi laba maka investor tertarik untuk investasi saham tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka disimpulkan bahwa 1) struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba; 2) reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien

respon laba; 3) kesempatan bertumbuh berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba; 4) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba; 5) ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba; 6) risiko sistematis berpengaruh secara signifikan terhadap koefisien respon laba; 7) persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba; dan 8) volatilitas saham berpengaruh terhadap koefisien respon laba.

### Saran

Penelitian ini memberikan masukan bagi investor sebagai pertimbangan dalam analisis fundamental yang dilakukan untuk mengambil keputusan investasi, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besaran yang menunjukkan hubungan informasi laba dan *return* perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan masukan kepada manajemen perusahaan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi koefisien respon laba, sehingga manajemen perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang tepat agar investor tertarik untuk melakukan kegiatan investasi pada perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut 1) sampel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi untuk obyek penelitian di luar perusahaan manufaktur; 2) penelitian mengenai koefisien respon laba sebenarnya merupakan penelitian runtut waktu yang memerlukan kurun waktu amatan yang cukup panjang untuk memperoleh koefisien respon laba, sedangkan perioda pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2009; 3) penelitian ini tidak menguji variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi koefisien respon laba. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan-keterbatasan tersebut peneliti memberikan rekomendasi, yaitu 1) memperluas obyek penelitian dengan menggunakan lebih dari satu jenis klasifikasi industri untuk meningkatkan daya generalisasi, seperti perusahaan dagang dan telekomunikasi; 2) mengambil perioda penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat; 3) menambah variabel lain yang teridentifikasi mempengaruhi koefisien respon laba,

seperti prediktabilitas laba, *voluntary disclosures* dan *corporate social responsibility*.

### DAFTAR REFERENSI

- Assih, Prihat, dan M. Gudono. 2000. "Hubungan Tindakan Perataan Laba dengan Reaksi Pasar atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3, No. 1: 35-53.
- Ball R. dan P. Brown. 1968. "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers". *Journal of Accounting Research*. 6, Autumn: 159-178.
- Chandrarini, Grahitia. 2003. "The Impact of Accounting Methods for Transaction Gains (Losses) on the Earnings Response Coefficient: The Indonesian Case". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 6, No. 3: 217-231.
- Febrianto, Rahmat, dan Erna Widiastuty. 2006. "Tiga Angka Laba Akuntansi: Mana yang lebih Bermakna bagi Investor?". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No.2: 200-215.
- Delaney, Patrick R., Barry J. Epstein, Ralph Nach, and Susan Weiss Budak. 2002. *Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles*. New York: John Wiley & Sons.
- Harahap, Khairunnisa. 2004. Asosiasi Praktik Perataan Laba dengan Koefisien Respon Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VII*: 1164-1176.
- Jang, Lesia, Bambang Sugiarto, dan Dergibson Siagian. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta". *Akuntabilitas*, Vol. 6, No. 2: 142-149.
- Haswadi. 2004. "Dampak Earning Reporting Lags terhadap Koefisien Respon Laba". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 3: 295-315.

- Mayangsari, Sekar. 2004. "Bukti Empiris Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Earnings Response Coefficient". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 2: 154-178.
- Mulyani, Sri., Nur F. Asyik, dan Andayani. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 11, No. 1: 35-45.
- Murwaningsari, ETTY. 2008. Pengujian Simultan: Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC). *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Naimah, Zahroh, dan Sidharta Utama. 2006. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Laba, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba dan Koefisien Respon Nilai Buku Ekuitas: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Palupi, Margaretta Jati. 2006. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koefisien Respon Laba: Bukti Empiris pada Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Ekubank*, Vol. 3: 9-25.
- Riyatno. 2007. "Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Earnings Response Coefficient*". *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2: 148-162.
- Sayekti, Yosefa, dan Wondabio L. Sensi. 2007. Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earnings Response Coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Setiati, Fita, dan Indra W. Kusuma. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koefisien Respon Laba pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. *Simposium Nasional Akuntansi VII*: 914-930.
- Siregar, Sylvia Veronica N. P., dan Siddharta Utama. 2006. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Penelolan Laba". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 3: 307-326.
- Susilawati, Christine Dwikarya. 2008. "Faktor-Faktor Penentu ERC". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, No. 2: 146-161.
- Swardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.

## **DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Rudy Badrudin**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155  
E-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

### **ABSTRACT**

This research analyzed the influence of region autonomy on developing region strategy in 29 regencies and 6 cities in Central Java Province based on the data of year 2001 to 2008. The method used to analyze the hypotheses were Klassen Typology, BCG matrix, and hypothesis test for means: two-sample assuming equal variances. The results showed that contribution and growth of Gross Domestic Regional Product had significant difference between regencies and cities in Central Java Province so that each regencies and cities have to choose the strategy of region development.

**Keywords:** region autonomy, klassen typology, BCG matrix

JEL classification: H76, I31, 043

### **PENDAHULUAN**

Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Ketidakmerataan terjadi pada kegiatan pem-bangunan, distribusi pendapatan, spasial atau antarwilayah, sektoral, dan regional.

Ketidak-merataan ini bukanlah sebagai akibat semata-mata pembangunan yang dilaksanakan tetapi juga merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan sebagai suatu strategi pembangunan. Hal ini terkait dengan tujuan perencanaan pembangunan di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara industri, sehingga sektor industri yang dipilih sebagai sektor unggulan. Ketidakmerataan di Indonesia lebih disebabkan karena strategi pembangunan dalam era Pembangunan Jangka Panjang yang lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi daripada pemerataan hasil pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai ketidakmerataan hasil pembangunan nampaknya menjadi suatu kecenderungan yang terjadi di beberapa negara sedang berkembang. Fenomena yang kontradiktif antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketidak-merataan pembangunan yang terjadi di negara sedang berkembang sejalan dengan teori yang dikemukakan Simon Kuznets dengan *inverted U curve*. *Inverted U curve* menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan akan ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik krisis tertentu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan.

Kini, dua belas tahun sudah otonomi daerah

telah berjalan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Bahkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah per 1 Januari 2001, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah masing-masing telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Penggantian kedua undang-undang tersebut dimaksudkan agar dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah lebih sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada. Pada strategi pengembangan wilayah yang dipilih, semuanya membutuhkan kerjasama antar *stakeholders*.

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan. Dalam kenyataannya, berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *microorganizational abilities of governments* di tingkat daerah, yaitu bentuk reformasi manajemen

publik yang harus diperhatikan pemerintah dan tidak semata membenahi *macroorganizational capacities* di tingkat pusat. Dengan demikian, kerjasama antarpemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang keberhasilan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis, strategi pengembangan wilayah melibatkan berbagai pemahaman mendasar tentang potensi dan peluang daerah dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas para aparat daerah, wakil rakyat, pengusaha, dan warga daerah secara umum. Potensi *leadership* para pemimpin daerah dan kemampuan manajerial seorang pemimpin di birokrasi, parlemen, dan dunia usaha di daerah sampai pada kesiapan para *stakeholders* melaksanakan pembangunan daerah menjadi faktor dominan dalam kinerja pengembangan ekonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pengembangan ekonomi daerah merupakan suatu keniscayaan belaka karena sukar sekali diharapkan suatu pengembangan ekonomi yang dapat kompatibel dengan kebutuhan dan potensi daerah apabila nuansa sentralistik masih terlalu kental (Hirawan, 2007:3). Teori ekonomipun mengajarkan bahwa konsep desentralisasi ekonomi itu tidak lain adalah tuntutan efisiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih makro.

Selama dua belas tahun penyelenggaraan otonomi daerah, telah terjadi pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sangat luar biasa banyaknya. Pemekaran wilayah dari tahun 2001 telah melahirkan 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota baru. Harapan masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah menjadi lebih sejahtera belum terbukti karena banyaknya kasus korupsi. Menurut penelitian Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM telah ditemukan indikasi korupsi di daerah hasil pemekaran di Provinsi Banten (593 kasus), Kepulauan Riau (463 kasus), Maluku Utara (184 kasus), Kepulauan Bangka Belitung (173 kasus), Sulawesi Barat (168 kasus), Gorontalo (155 kasus), dan Papua Barat (147 kasus).

Temuan tersebut diperkuat dengan hasil survei Bank Dunia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM terhadap 1.815 rumah tangga di tujuh provinsi hasil pemekaran wilayah yang menunjukkan bahwa

pemekaran wilayah semakin menyuburkan praktik-praktik korupsi sehingga menyebabkan inefisiensi dan semakin tidak sejahteranya masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah akibat implementasi desentralisasi

**Tabel 1**  
**Rincian Jumlah Kabupaten/Kota Per Provinsi**  
**Sampai Dengan Tahun 2009**

No	Provinsi	Jumlah		
		Kabupaten	Kota	Total
1	Nangroe Aceh Darusalam	18	5	23
2	Sumatera Utara	25	8	33
3	Sumatera Barat	12	7	19
4	Riau	10	2	12
5	Jambi	9	2	11
6	Sumatera Selatan	11	4	15
7	Bengkulu	9	1	10
8	Lampung	12	2	14
9	Kep. Bangka Belitung	6	1	7
10	Kep. Riau	5	2	7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1	5	6
12	Jawa Barat	17	9	26
13	Jawa Tengah	29	6	35
14	Banten	4	4	8
15	Jawa Timur	29	9	38
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	1	5
17	Bali	8	1	9
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	10
19	Nusa Tenggara Timur	20	1	21
20	Kalimantan Barat	12	2	14
21	Kalimantan Tengah	13	1	14
22	Kalimantan Selatan	11	2	13
23	Kalimantan Timur	10	4	14
24	Sulawesi Utara	11	4	15
25	Sulawesi Tengah	10	1	11
26	Sulawesi Selatan	21	3	24
27	Sulawesi Tenggara	10	2	12
28	Gorontalo	5	1	6
29	Sulawesi Barat	5	0	5
30	Maluku	9	2	11
31	Maluku Utara	7	2	9
32	Papua	28	1	29
33	Papua Barat	10	1	11
<b>Total Kabupaten/Kota</b>		<b>399</b>	<b>98</b>	<b>497</b>

Sumber: KPPOD, tahun 2009.

fiskal sejak 1 Januari 2001 (Kompas, 2 Agustus 2010). Hampir sepertiga para pimpinan kepala daerah pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan keuangan negara. Jumlah kabupaten/kota se Indonesia per provinsi berdasarkan data KPPOD sampai dengan tahun 2009 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal variabel, lokasi, obyek, waktu, dan alat analisis dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2001-2008 di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilihnya semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001 sebagai awal dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang tahun 2011 merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping Provinsi DKI, Provinsi DIY, dan Provinsi Bali.

Strategi pengembangan wilayah yang dipilih oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan nampak hasilnya pada kinerja perekonomian daerah yang salah satunya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya. Menurut Arsyad (2004:17), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi}_{\text{per tahun}} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: PDRB<sub>t</sub> adalah PDRB tahun ke t  
PDRB<sub>t-1</sub> adalah PDRB tahun ke t-1

Berdasarkan rumus pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus mengetahui terlebih dahulu nilai PDRB masing-masing tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:1-10), PDRB di Indonesia dihitung dan

disajikan dengan menggunakan dua metode, yaitu PDRB menurut metode produksi atau lapangan usaha dan PDRB menurut metode penggunaan atau pengeluaran atau belanja.

PDRB menurut metode produksi adalah PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut metode produksi disebut juga sebagai PDRB menurut sektor atau lapangan usaha atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi penyediaan (*supply side*). PDRB menurut metode penggunaan adalah PDRB yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDRB menurut metode penggunaan disebut pula sebagai PDRB menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*) atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan (*demand side*).

Berdasarkan penjelasan tentang otonomi daerah dan strategi pengembangan wilayah khususnya di wilayah yang tidak terjadi pemekaran selama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia maka mengindikasikan adanya perbedaan antara teori dan konsep mengenai otonomi daerah dan strategi pengembangan wilayah. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pemerintah kabupaten/kota menghadapi perubahan eksternal yang sangat cepat pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001. Perubahan eksternal tersebut mengakibatkan persaingan antarwilayah kabupaten/kota menjadi sangat ketat. Pemerintah kabupaten/kota

yang mampu memilih strategi yang tepat akan dapat memenangkan persaingan tersebut. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus mampu menerapkan model manajemen dengan paradigma baru karena dengan paradigma baru, manajemen pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas yang ditujukan untuk memenuhi *customer satisfaction* (kepuasan masyarakat yang menjadi indikator keberhasilan Otonomi Daerah). Paradigma baru diperlukan untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan bagaimana mengelola perubahan tersebut. *Managerial paradigm* menunjukkan cara orang berpikir dan bertindak dalam mengelola pemerintahan kabupaten/kota. Pergeseran paradigma tersebut ditujukan untuk menyediakan *superior customer value* melalui *customer value strategy*, *organizational systems*, dan *continuous improvement*.

*Customer value strategy* adalah strategi bisnis dari pemerintah kabupaten/kota yang berupa penawaran nilai kepada *customer* yang di dalamnya tidak hanya berupa produk, tetapi juga berupa karakteristik produk, pendistribusian produk, dan sebagainya (Bounds, *et al.*, 1994: 28). *Customer value* adalah kombinasi manfaat yang berasal dari suatu produk dan pengorbanan yang diperlukan *customer* dalam memenuhi kebutuhannya atau selisih antara manfaat yang diperoleh *customer* dari penggunaan produk dengan pengorbanan yang dilakukan *customer* untuk memperoleh manfaat tersebut. Salah satu pergeseran paradigma dari paradigma lama ke paradigma baru dalam *customer value strategy* adalah topik tentang kualitas. Dalam paradigma lama, manajemen mendefinisikan kualitas dengan pencapaian yang telah ditentukan. Kualitas dijamin dengan seleksi produk sebelum dikirim ke *customer*. Manajemen membuat *tradeoff* antara kualitas, biaya, dan skedul. Dalam paradigma baru manajemen mendefinisikan bahwa kualitas produk hanya merupakan salah satu bagian dari *customer value*. Manajemen mencari sinergi antara kualitas, biaya, dan skedul. Untuk memiliki kemampuan bertahan, berkembang, dan memenangkan persaingan yang ketat dalam era bisnis global, organisasi bisnis harus mengarahkan semua kegiatannya untuk menghasilkan *customer value*.

*Organizational systems* adalah sarana yang

menyediakan *customer value*. Termasuk dalam sistem ini adalah input material dan sumberdaya manusia, teknologi proses, metode operasi dan praktik kerja, aliran aktivitas kerja, aliran informasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam *organizational systems*, ada pergeseran paradigma dalam memandang *cross functional approach*, teknologi, pelibatan karyawan, manajemen sumberdaya manusia, definisi peraturan, kultur, dan struktur. Misalnya, paradigma baru dalam memandang teknologi adalah teknologi digunakan untuk mengurangi kompleksitas masalah terlebih dengan menggunakan teknologi yang otomatis dan serba komputer dan manajemen menggunakan teknologi hanya untuk mengoptimalkan sistem yang menghasilkan *customer value*. Paradigma baru dalam memandang pelibatan karyawan adalah karyawan pemerintah kabupaten/kota dilibatkan dalam kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang berfokus pada strategi untuk memuasi *customer* atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari karyawan pemerintah kabupaten/kota. Pelibatan karyawan dilakukan dengan cara memperdayakannya melalui *continuous improvement*, agar mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten/kota dan menghasilkan kepuasan *customer* (Bounds, *et al.*, 1994: 36).

*Continuous improvement* digunakan untuk mengelola perubahan dalam lingkungan eksternal agar pemerintah kabupaten/kota dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. *Improvement* dalam paradigma lama dilakukan yang utama pada pengembangan produk baru dan reaksi terhadap masalah yang muncul. *Improvement* dalam paradigma baru dilakukan pada setiap waktu dan di manapun (Bounds, *et al.*, 1994:48). Manajemen secara proaktif mengadakan perbaikan pada setiap ada kesempatan meskipun tidak ada masalah yang muncul. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan *continuous improvement* secara berkelanjutan terhadap proses dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan *customer value* dengan tingkat *improvement* yang lebih pesat dibandingkan *improvement* yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota pesaing. Intensitas *superior customer value* melalui *customer value strategy*, *organizational systems*, dan *continuous improvement* ditentukan oleh keunggulan masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang dapat dianalisis menggunakan Tipologi Klassen atau dengan matriks pertumbuhan-pangsa pasar

(*growth-share matrix – GS Matrix*) (Widodo, 2006:120-122).

Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 35 (tiga puluh lima) wilayah administratif kabupaten/kota, yang meliputi 29 wilayah kabupaten dan 6 wilayah kota. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah per 1 Januari 2001, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan dan arah pembangunan yang lebih mandiri. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik ini disebabkan perbedaan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya fisik, sumber daya non fisik (sumberdaya manusia), ataupun sumber modal. Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah kabupaten/kota menentukan jenis produk/kegiatan yang difokuskan untuk dikembangkan. Pemilihan jenis produk/kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikembangkan didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota tersebut. Keunggulan dapat diperoleh dari sumberdaya spesifik yang dimiliki. Jika suatu wilayah kabupaten/kota memiliki sumberdaya yang spesifik yang tidak dimiliki wilayah kabupaten/kota lain, baik jenis, mutu, maupun jumlahnya maka wilayah kabupaten/kota memiliki keunggulan memproduksi produk yang menggunakan input utama sumberdaya tersebut. Pemilihan terhadap produk yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota, berarti pemerintah kabupaten/kota tersebut melakukan spesialisasi. Spesialisasi dalam kegiatan sektor sangat penting, mengingat sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota sangat terbatas. Dengan melakukan spesialisasi diharapkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki wilayah kabupaten/kota tidak percuma.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah proses berarti mengandung unsur dinamis, perubahan, atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan wilayah secara absolut. Perbandingan

absolut antar kabupaten/kota yang disebut dengan Tipologi Klassen disajikan dalam bentuk diagram empat kuadran, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horizontal) digambarkan garis lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horizontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran (Gambar 1). Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Suatu titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah.

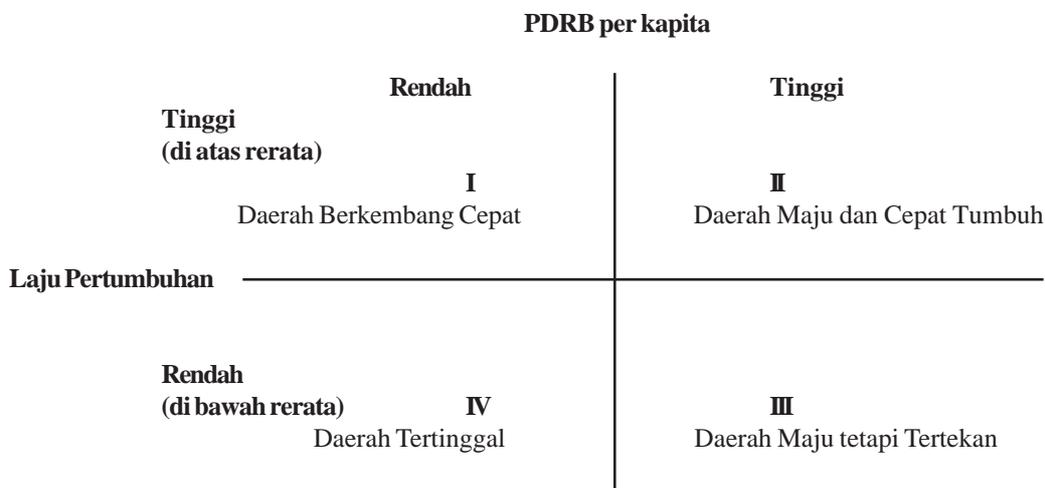
Kabupaten/kota di kuadran I yang disebut daerah berkembang cepat menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan relatif tinggi maka kabupaten/kota masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran II disebut daerah maju dan cepat tumbuh yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-

rata Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan daerah maju tetapi tertekan secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran IV disebut daerah tertinggal, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Mirip dengan alat Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui suatu wilayah kabupaten/kota memiliki keunggulan di antara wilayah kabupaten/kota lain adalah dengan menggunakan matriks pertumbuhan-pangsa pasar (*growth-share matrix – GS Matrix* atau *Boston Consulting Group-BCG Matrix*). *GS Matrix* memiliki empat kuadran yang dipisahkan oleh dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horisontal. Sumbu vertikal menunjukkan kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi dan sumbu horisontal menunjukkan laju pertumbuhan

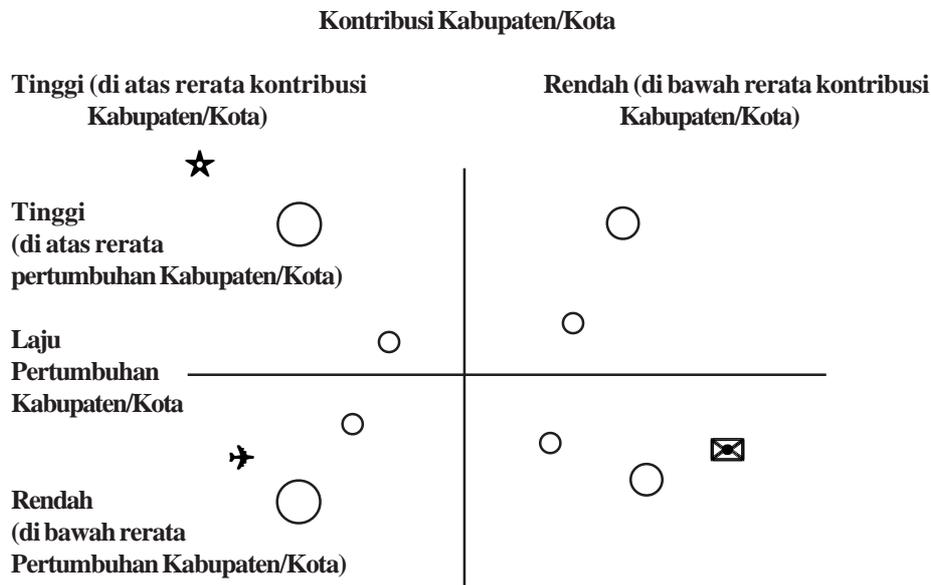
PDRB kabupaten/kota. Kontribusi PDRB kabupaten/kota diukur dari kontribusi nilai PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap nilai PDRB provinsi, sedangkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota diukur dari persentase perubahan nilai PDRB kabupaten/kota tersebut dari tahun ke tahun.

Lingkaran-lingkaran pada *GS Matrix* menunjukkan kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kontribusi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi di atas kontribusi rata-rata dikelompokkan ke dalam kabupaten/kota yang memiliki kontribusi tinggi, dan sebaliknya. Demikian juga dengan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan semua kabupaten/kota dimasukkan ke dalam kelompok kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya (Gambar 2).



**Gambar 1**  
**Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita (Tipologi Klassen)**

**Sumber:** Bappeda DIY, 2010, *Laporan Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah*.



**Gambar 2**  
**Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita (BCG Matrix)**

**Sumber:** Badrudin, 2008.

Pada BCG *matrix*, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu (bergambar ?) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai *share* rendah, tetapi laju pertumbuhan sektor tinggi. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran satu ini memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kabupaten/kota ini. Dengan demikian, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kabupaten/kota ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran dua (bergambar ☒) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi berkembang, karena kabupaten/kota tersebut berada pada pasar yang memiliki laju pertumbuhan

tinggi. Selain itu, kabupaten/kota itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran dua adalah memperbesar permodalan untuk melayani permintaan dari laju pertumbuhan pasar yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga (bergambar →) merupakan kabupaten/kota yang berhasil, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan relatif rendah. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran empat (bergambar \*) dapat diartikan bahwa kabupaten/

kota tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan pasar rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kabupaten/kota tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kabupaten/kota tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kabupaten/kota tersebut juga rendah. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada.

Andriani, Lis HR (2001), menggunakan BCG Matrix untuk meneliti 9 (sembilan) PTS di Kota Surabaya yang mempunyai Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan status terakreditasi B berdasarkan data Direktori Kopertis Wilayah VII, Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi keunggulan kompetitif masing-masing PTS berdasarkan faktor-faktor keberhasilan kritis internal maupun eksternal yang dimilikinya, serta menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan berdasarkan posisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis BCG Matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Unika Widya Mandala, UK Petra, dan Ubaya berada pada posisi yang sangat menguntungkan yaitu terletak di kuadran 1, sementara keenam PTS lainnya berada pada kuadran 2, yang berarti memiliki posisi cukup menguntungkan. Kedua, alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk masing-masing PTS adalah sebagai berikut: Unika Widya Mandala sebaiknya melakukan strategi pengembangan pasar; Untag, UPB, UPN "Veteran" Surabaya, dan Ubhara dianjurkan untuk menerapkan strategi pengembangan produk; Unitomo dengan strategi integrasi ke belakang; Unipra menggunakan strategi penetrasi pasar; dan UK Petra dan Ubaya sebaiknya melaksanakan strategi integrasi horizontal. Strategi tersebut dapat dijadikan acuan penyusunan strategi jangka panjang dalam rangka pengembangan masing-masing PTS, sehingga diharapkan pengembangannya akan semakin terarah, terfokus, efektif, dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Algifari dan Rudy Badrudin (2003), melakukan

penelitian untuk menguraikan strategi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan keterbatasan sumberdaya untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal. Strategi tersebut berkaitan dengan pengidentifikasian karakteristik lokasi (dalam hal ini kecamatan), kemudian memasukkan kecamatan tersebut ke dalam suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi pembangunan yang cocok bagi masing-masing kelompok kecamatan. Pengelompokan kecamatan dilakukan dengan menggunakan model *Growth-Share* BCG Matrix. Setiap kecamatan diidentifikasi pertumbuhan ekonomi (*growth*) dan kontribusi (*share*) PDRB kecamatan terhadap PDRB kabupaten. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tidak satu pun kecamatan di Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi memiliki kontribusi yang tinggi bagi PDRB kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya rendah. Kecamatan Depok, Gamping, Malti, Ngaglik, dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kontribusi bagi PDRB kabupaten rendah. Sedangkan kecamatan Berbah, Godean, Kalasan, Minggu, Moyudan, Seyegan, dan Tempel termasuk ke dalam kelompok yang memberikan kontribusi rendah bagi PDRB kabupaten dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Prasetyo (2004), melakukan penelitian tentang Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Guna Meningkatkan Daya Saing Pada PT Cipta Niaga Dengan Analisis SWOT, BCG Matrix, dan analisis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini dibutuhkan informasi yang cepat dan metode analisis yang akurat. Pada persaingan yang semakin ketat karena keadaan pasar yang terbuka dan kondisi ekonomi yang belum stabil diperlukan strategi yang tepat untuk melanjutkan kelangsungan perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan PT Cipta Niaga Palembang yang bergerak pada bidang distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga (*customer good*). Sebagai kompetitor, PT A bergerak dalam bidang yang sama. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemasaran dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan yang sejenis yang ada pada pasar domestik. Perumusan strategi

perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, BCG Matrix, dan analisis lainnya. Penerapan metode tersebut dilakukan dengan evaluasi dan analisis terhadap keadaan intern dan ekstern perusahaan yang meliputi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, kekuatan bisnis, daya tarik industri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kedua perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alternatif strategi untuk masing-masing perusahaan, yaitu untuk PT Cipta Niaga adalah strategi *market growth* dan untuk PT A adalah strategi *market development*.

Badrudin (2008) melakukan penelitian tentang Analisis Dampak Otonomi Daerah terhadap Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menganalisis dampak otonomi daerah terhadap strategi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di Kabupaten Sleman dengan sampel empat PTS besar berdasarkan jumlah mahasiswa pada Program Studi (PS) Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan dan lokasi yang saling berdekatan di Kecamatan Depok, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN). Penelitian ini dilakukan berdasarkan perkembangan data jumlah mahasiswa baru pasca pemberlakuan otonomi daerah per 1 Januari 2001, yaitu mulai tahun 2002 sampai dengan 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah telah menimbulkan penurunan terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di DIY pada umumnya dan Kabupaten Sleman pada khususnya karena di berbagai kota/kabupaten di luar Provinsi DIY telah tumbuh dan berkembang berbagai PT. Oleh karena itu, agar PTS mampu tumbuh dan berkembang maka masing-masing PTS harus memilih strategi pengembangan PTS yang spesifik berbeda bahkan untuk masing-masing PS di masing-masing PTS (Maisyaroh, 2005). Perbedaan rata-rata kontribusi jumlah mahasiswa baru pada PS Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan di UII, UAJY, UPNVY, dan STIE YKPN terjadi karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya fisik, sumber daya non fisik (sumberdaya manusia), ataupun sumber modal. Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu PS menentukan jenis produk/kegiatan yang difokuskan untuk

dikembangkan. Tidak adanya perbedaan rata-rata pertumbuhan jumlah mahasiswa baru pada PS Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan di UII, UAJY, UPNVY, dan STIE YKPN karena sebagai PTS yang besar di Kabupaten Sleman, keempat PTS tersebut memiliki keterbatasan dalam memperoleh input (calon mahasiswa) yang relatif sebagian besar berasal dari luar Provinsi DIY.

Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- $H_1$ : ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- $H_2$ : ada perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sensus dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota, yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan pengambilan data yang runtut dari tahun 2001 sampai dengan 2008, maka data berbentuk *time series*. Berdasarkan jumlah sampel kabupaten/kota sebanyak 35 kabupaten/kota maka data berbentuk *cross section*. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section (pooled the data)*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum kondisi atau subyek studi guna mempertajam pembahasan dari aspek logika faktual dengan cara menginterpretasikan hasil pengolahan melalui tabulasi untuk memamarkan kecenderungan data empirik dan deskriptif seperti nilai *mean*. Analisis induktif digunakan untuk menguji dan menganalisis hipotesis penelitian dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (uji t) (Subiyakto, 2001:89-116).

## HASIL PENELITIAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:11-28), PDRB menurut metode produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produksi dari sembilan sektor produk, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan

restoran; transportasi dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa pemerintahan

dan swasta. Berikut disajikan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008**  
**(jutaan Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004
Kabupaten Banjarnegara	2.345.275,74	2.608.863,42	2.893.918,84	3.216.818,03
Kabupaten Banyumas	2.936.417,20	3.312.730,46	3.568.353,56	4.835.240,50
Kabupaten Batang	2.009.244,19	2.262.745,19	2.417.230,85	2.660.659,52
Kabupaten Blora	1.676.204,76	1.894.377,51	2.056.052,86	2.182.867,87
Kabupaten Boyolali	2.972.852,79	3.362.795,58	3.605.349,13	4.250.098,73
Kabupaten Brebes	3.759.435,47	4.371.289,34	4.775.607,36	5.986.162,75
Kabupaten Cilacap	11.495.506,55	13.249.229,62	15.014.901,73	19.151.057,28
Kabupaten Demak	2.122.941,05	2.401.370,94	2.742.021,68	3.149.386,40
Kabupaten Grobogan	1.927.338,42	2.163.014,96	2.418.069,22	3.160.711,85
Kabupaten Jepara	3.205.812,41	3.596.397,75	3.955.465,63	4.383.716,46
Kabupaten Karanganyar	2.812.235,12	3.161.318,40	3.518.510,69	5.038.378,68
Kabupaten Kebumen	2.375.750,56	2.678.124,79	2.965.531,76	3.060.653,43
Kabupaten Kendal	4.268.178,71	4.946.755,40	5.032.775,76	5.515.650,52
Kabupaten Klaten	3.352.245,32	3.891.798,65	4.290.006,98	5.475.849,75
Kabupaten Kudus	9.373.963,05	10.495.586,16	11.923.270,49	16.504.028,86
Kabupaten Magelang	3.016.149,76	3.364.521,02	3.755.812,34	4.119.373,21
Kabupaten Pati	2.841.667,34	3.242.399,20	3.398.763,01	4.648.350,18
Kabupaten Pekalongan	2.547.022,44	2.847.317,93	3.081.949,39	3.366.503,70
Kabupaten Pemalang	2.733.756,32	3.072.801,76	3.521.721,71	3.703.314,77
Kabupaten Purbalingga	1.712.131,99	1.904.743,38	2.123.063,35	2.564.077,55
Kabupaten Purworejo	2.118.182,23	2.415.435,73	2.662.839,21	2.951.647,48
Kabupaten Rembang	1.587.063,45	1.820.737,72	2.042.947,41	2.425.018,62
Kabupaten Semarang	3.146.855,44	3.555.861,85	3.916.833,27	5.683.406,80
Kabupaten Sragen	1.915.755,96	2.105.156,44	2.318.336,68	3.059.653,16
Kabupaten Sukoharjo	2.878.709,93	3.253.835,20	3.598.724,59	4.806.448,20
Kabupaten Tegal	2.387.368,89	2.741.527,97	3.049.391,05	3.421.779,18
Kabupaten Temanggung	1.856.728,10	2.083.511,61	2.294.872,22	2.541.689,78
Kabupaten Wonogiri	2.245.387,53	2.500.706,30	2.773.427,80	3.129.184,54
Kabupaten Wonosobo	1.492.578,11	1.687.100,38	1.850.751,84	2.063.216,41
Kota Magelang	836.823,84	968.104,21	1.074.495,79	1.145.458,89
Kota Pekalongan	1.506.321,86	1.707.354,27	1.925.403,30	2.058.516,21
Kota Salatiga	689.699,40	735.657,92	803.578,04	983.258,05
Kota Semarang	15.097.150,94	17.201.673,80	19.151.797,98	20.304.595,45
Kota Surakarta	3.321.685,50	3.703.510,33	4.177.490,76	4.756.559,52
Kota Tegal	948.945,79	1.094.418,48	1.197.448,69	1.278.884,13
JAWA TENGAH	111.515.387,16	126.404.775,67	139.898.717,97	167.584.220,46

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*.

lanjutan Tabel 2

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	3.719.943,76	4.157.574,64	4.706.344,95	5.526.574,99
Kabupaten Banyumas	5.580.804,33	6.428.219,55	7.268.199,71	8.343.644,14
Kabupaten Batang	3.110.086,52	3.503.532,45	3.878.725,22	4.356.728,72
Kabupaten Blora	2.456.884,88	2.747.560,63	3.016.407,19	3.485.816,42
Kabupaten Boyolali	4.639.506,25	5.142.433,03	5.708.063,97	6.446.546,37
Kabupaten Brebes	7.325.401,19	8.402.057,26	9.550.916,48	11.134.037,66
Kabupaten Cilacap	19.612.368,78	23.034.934,91	25.452.312,00	30.238.836,31
Kabupaten Demak	3.532.942,95	3.977.180,32	4.337.087,88	4.931.378,19
Kabupaten Grobogan	3.560.401,73	4.019.497,49	4.558.277,12	5.185.205,33
Kabupaten Jepara	5.018.164,15	5.688.316,93	6.468.910,32	7.455.878,01
Kabupaten Karanganyar	5.611.289,49	6.187.781,85	6.904.990,47	7.679.675,36
Kabupaten Kebumen	3.502.841,33	4.082.249,01	4.568.870,87	5.304.522,46
Kabupaten Kendal	6.062.143,00	6.913.713,83	7.705.181,53	8.715.893,62
Kabupaten Klaten	6.520.828,29	7.504.499,43	8.349.253,36	9.491.601,49
Kabupaten Kudus	19.882.794,34	21.429.330,70	24.013.158,42	27.138.456,43
Kabupaten Magelang	4.640.401,55	5.252.845,83	5.859.048,24	6.587.626,47
Kabupaten Pati	5.200.371,82	6.033.083,05	6.717.815,82	7.705.219,45
Kabupaten Pekalongan	3.990.049,28	4.568.471,00	5.094.295,61	5.864.346,61
Kabupaten Pemalang	4.506.646,76	5.178.579,01	5.776.983,88	6.575.979,10
Kabupaten Purbalingga	2.912.447,31	3.408.083,52	3.887.240,54	4.444.058,18
Kabupaten Purworejo	3.443.170,90	4.094.294,69	4.660.785,05	5.328.179,09
Kabupaten Rembang	2.770.982,88	3.214.593,95	3.606.468,40	4.064.237,92
Kabupaten Semarang	6.484.472,47	7.340.034,64	8.175.899,23	9.284.507,64
Kabupaten Sragen	3.497.324,94	4.042.561,37	4.512.215,73	5.170.914,12
Kabupaten Sukoharjo	5.545.486,86	6.277.623,81	7.054.172,76	8.041.276,35
Kabupaten Tegal	3.836.595,41	4.418.701,80	5.535.534,32	6.406.970,01
Kabupaten Temanggung	2.816.682,42	3.210.684,17	3.645.351,52	4.125.938,98
Kabupaten Wonogiri	3.454.287,16	4.040.531,58	4.551.726,35	5.268.669,48
Kabupaten Wonosobo	2.309.638,85	2.630.137,88	2.962.993,79	3.332.061,77
Kota Magelang	1.288.556,23	1.359.997,00	1.478.242,77	1.669.909,26
Kota Pekalongan	2.400.562,15	2.727.184,42	2.993.816,01	3.251.123,80
Kota Salatiga	1.104.131,85	1.237.905,22	1.370.166,64	1.541.682,44
Kota Semarang	23.208.224,89	26.624.244,18	30.515.736,72	34.541.219,00
Kota Surakarta	5.585.776,86	6.190.112,55	6.909.094,57	7.901.886,06
Kota Tegal	1.450.041,15	1.660.905,62	1.870.352,12	2.139.214,57
JAWA TENGAH	190.584.257,73	216.731.463,32	243.666.646,56	278.681.823,80

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dihitung kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota

terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**  
**Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)**

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	2,10	2,06	2,07	1,92	1,95	1,92	1,93	1,98
Kabupaten Banyumas	2,63	2,62	2,55	2,89	2,93	2,97	2,98	2,99
Kabupaten Batang	1,80	1,79	1,73	1,59	1,63	1,62	1,59	1,56
Kabupaten Blora	1,50	1,50	1,47	1,30	1,29	1,27	1,24	1,25
Kabupaten Boyolali	2,67	2,66	2,58	2,54	2,43	2,37	2,34	2,31
Kabupaten Brebes	3,37	3,46	3,41	3,57	3,84	3,88	3,92	4,00
Kabupaten Cilacap	10,31	10,48	10,73	11,43	10,29	10,63	10,45	10,85
Kabupaten Demak	1,90	1,90	1,96	1,88	1,85	1,84	1,78	1,77
Kabupaten Grobogan	1,73	1,71	1,73	1,89	1,87	1,85	1,87	1,86
Kabupaten Jepara	2,87	2,85	2,83	2,62	2,63	2,62	2,65	2,68
Kabupaten Karanganyar	2,52	2,50	2,52	3,01	2,94	2,86	2,83	2,76
Kabupaten Kebumen	2,13	2,12	2,12	1,83	1,84	1,88	1,88	1,90
Kabupaten Kendal	3,83	3,91	3,60	3,29	3,18	3,19	3,16	3,13
Kabupaten Klaten	3,01	3,08	3,07	3,27	3,42	3,46	3,43	3,41
Kabupaten Kudus	8,41	8,30	8,52	9,85	10,43	9,89	9,85	9,74
Kabupaten Magelang	2,70	2,66	2,68	2,46	2,43	2,42	2,40	2,36
Kabupaten Pati	2,55	2,57	2,43	2,77	2,73	2,78	2,76	2,76
Kabupaten Pekalongan	2,28	2,25	2,20	2,01	2,09	2,11	2,09	2,10
Kabupaten Pemalang	2,45	2,43	2,52	2,21	2,36	2,39	2,37	2,36
Kabupaten Purbalingga	1,54	1,51	1,52	1,53	1,53	1,57	1,60	1,59
Kabupaten Purworejo	1,90	1,91	1,90	1,76	1,81	1,89	1,91	1,91
Kabupaten Rembang	1,42	1,44	1,46	1,45	1,45	1,48	1,48	1,46
Kabupaten Semarang	2,82	2,81	2,80	3,39	3,40	3,39	3,36	3,33
Kabupaten Sragen	1,72	1,67	1,66	1,83	1,84	1,87	1,85	1,86
Kabupaten Sukoharjo	2,58	2,57	2,57	2,87	2,91	2,90	2,90	2,89
Kabupaten Tegal	2,14	2,17	2,18	2,04	2,01	2,04	2,27	2,30
Kabupaten Temanggung	1,66	1,65	1,64	1,52	1,48	1,48	1,50	1,48
Kabupaten Wonogiri	2,01	1,98	1,98	1,87	1,81	1,86	1,87	1,89
Kabupaten Wonosobo	1,34	1,33	1,32	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20
Kota Magelang	0,75	0,77	0,77	0,68	0,68	0,63	0,61	0,60
Kota Pekalongan	1,35	1,35	1,38	1,23	1,26	1,26	1,23	1,17
Kota Salatiga	0,62	0,58	0,57	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55
Kota Semarang	13,54	13,61	13,69	12,12	12,18	12,28	12,52	12,39
Kota Surakarta	2,98	2,93	2,99	2,84	2,93	2,86	2,84	2,84
Kota Tegal	0,85	0,87	0,86	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77

Sumber: Tabel 2. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dihitung rata-rata kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/

kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Rata-Rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata	Kontribusi
Kabupaten Banjarnegara	1.99%	rendah
Kabupaten Banyumas	2.82%	rendah
Kabupaten Batang	1.66%	rendah
Kabupaten Blora	1.35%	rendah
Kabupaten Boyolali	2.49%	rendah
Kabupaten Demak	1.86%	rendah
Kabupaten Grobogan	1.81%	rendah
Kabupaten Jepara	2.72%	rendah
Kabupaten Karanganyar	2.74%	rendah
Kabupaten Kebumen	1.96%	rendah
Kabupaten Magelang	2.52%	rendah
Kabupaten Pati	2.67%	rendah
Kabupaten Pekalongan	2.14%	rendah
Kabupaten Pemalang	2.39%	rendah
Kabupaten Purbalingga	1.55%	rendah
Kabupaten Purworejo	1.87%	rendah
Kabupaten Rembang	1.46%	rendah
Kabupaten Sragen	1.78%	rendah
Kabupaten Sukoharjo	2.77%	rendah
Kabupaten Tegal	2.14%	rendah
Kabupaten Temanggung	1.55%	rendah
Kabupaten Wonogiri	1.91%	rendah
Kabupaten Wonosobo	1.26%	rendah
Kota Magelang	0.68%	rendah
Kota Pekalongan	1.28%	rendah
Kota Salatiga	0.58%	rendah
Kota Tegal	0.80%	rendah
Kabupaten Brebes	3.68%	tinggi
Kabupaten Cilacap	10.65%	tinggi
Kabupaten Kendal	3.41%	tinggi
Kabupaten Klaten	3.27%	tinggi
Kabupaten Kudus	9.37%	tinggi
Kabupaten Semarang	3.16%	tinggi
Kota Semarang	12.79%	tinggi
Kota Surakarta	2.90%	tinggi

**Sumber:** Tabel 3. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dihitung pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota yang hasilnya disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)**

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	11,24	10,93	11,16	15,64	11,76	13,20	17,43	9,00
Kabupaten Banyumas	12,82	7,72	35,50	15,42	15,18	13,07	14,80	10,14
Kabupaten Batang	12,62	6,83	10,07	16,89	12,65	10,71	12,32	7,54
Kabupaten Blora	13,02	8,53	6,17	12,55	11,83	9,78	15,56	9,97
Kabupaten Boyolali	13,12	7,21	17,88	9,16	10,84	11,00	12,94	10,80
Kabupaten Brebes	16,28	9,25	25,35	22,37	14,70	13,67	16,58	12,56
Kabupaten Cilacap	15,26	13,33	27,55	2,41	17,45	10,49	18,81	14,52
Kabupaten Demak	13,12	14,19	14,86	12,18	12,57	9,05	13,70	8,17
Kabupaten Grobogan	12,23	11,79	30,71	12,65	12,89	13,40	13,75	11,17
Kabupaten Jepara	12,18	9,98	10,83	14,47	13,35	13,72	15,26	10,06
Kabupaten Karanganyar	12,41	11,30	43,20	11,37	10,27	11,59	11,22	9,10
Kabupaten Kebumen	12,73	10,73	3,21	14,45	16,54	11,92	16,10	10,38
Kabupaten Kendal	15,90	1,74	9,59	9,91	14,05	11,45	13,12	6,89
Kabupaten Klaten	16,10	10,23	27,64	19,08	15,09	11,26	13,68	9,13
Kabupaten Kudus	11,97	13,60	38,42	20,47	7,78	12,06	13,01	6,51
Kabupaten Magelang	11,55	11,63	9,68	12,65	13,20	11,54	12,44	8,55
Kabupaten Pati	14,10	4,82	36,77	11,88	16,01	11,35	14,70	8,84
Kabupaten Pekalongan	11,79	8,24	9,23	18,52	14,50	11,51	15,12	9,70
Kabupaten Pemalang	12,40	14,61	5,16	21,69	14,91	11,56	13,83	9,04
Kabupaten Purbalingga	11,25	11,46	20,77	13,59	17,02	14,06	14,32	15,24
Kabupaten Purworejo	14,03	10,24	10,85	16,65	18,91	13,84	14,32	9,78
Kabupaten Rembang	14,72	12,20	18,70	14,27	16,01	12,19	12,69	9,60
Kabupaten Semarang	13,00	10,15	45,10	14,09	13,19	11,39	13,56	8,45
Kabupaten Sragen	9,89	10,13	31,98	14,30	15,59	11,62	14,60	13,54
Kabupaten Sukoharjo	13,03	10,60	33,56	15,38	13,20	12,37	13,99	10,94
Kabupaten Tegal	14,83	11,23	12,21	12,12	15,17	25,28	15,74	10,64
Kabupaten Temanggung	12,21	10,14	10,76	10,82	13,99	13,54	13,18	9,13
Kabupaten Wonogiri	11,37	10,91	12,83	10,39	16,97	12,65	15,75	8,84
Kabupaten Wonosobo	13,03	9,70	11,48	11,94	13,88	12,66	12,46	7,65
Kota Magelang	15,69	10,99	6,60	12,49	5,54	8,69	12,97	11,55
Kota Pekalongan	13,35	12,77	6,91	16,62	13,61	9,78	8,59	6,65
Kota Salatiga	6,66	9,23	22,36	12,29	12,12	10,68	12,52	7,73
Kota Semarang	13,94	11,34	6,02	14,30	14,72	14,62	13,19	10,52
Kota Surakarta	11,49	12,80	13,86	17,43	10,82	11,62	14,37	12,39
Kota Tegal	15,33	9,41	6,80	13,38	14,54	12,61	14,37	11,62

Sumber: Tabel 2. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat dihitung rata-rata pertumbuhan PDRB masing-

masing kabupaten/kota yang hasilnya disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata	Pertumbuhan
Kabupaten Banjarnegara	12.54%	rendah
Kabupaten Batang	11.20%	rendah
Kabupaten Blora	10.93%	rendah
Kabupaten Boyolali	11.62%	rendah
Kabupaten Demak	12.23%	rendah
Kabupaten Jepara	12.48%	rendah
Kabupaten Kebumen	12.01%	rendah
Kabupaten Kendal	10.33%	rendah
Kabupaten Magelang	11.40%	rendah
Kabupaten Pekalongan	12.33%	rendah
Kabupaten Pemasang	12.90%	rendah
Kabupaten Temanggung	11.72%	rendah
Kabupaten Wonogiri	12.46%	rendah
Kabupaten Wonosobo	11.60%	rendah
Kota Magelang	10.57%	rendah
Kota Pekalongan	11.03%	rendah
Kota Salatiga	11.70%	rendah
Kota Semarang	12.33%	rendah
Kota Surakarta	13.10%	rendah
Kota Tegal	12.26%	rendah
Kabupaten Banyumas	15.58%	tinggi
Kabupaten Brebes	16.34%	tinggi
Kabupaten Cilacap	14.98%	tinggi
Kabupaten Grobogan	14.83%	tinggi
Kabupaten Karanganyar	15.06%	tinggi
Kabupaten Klaten	15.28%	tinggi
Kabupaten Kudus	15.48%	tinggi
Kabupaten Pati	14.81%	tinggi
Kabupaten Purbalingga	14.71%	tinggi
Kabupaten Purworejo	13.58%	tinggi
Kabupaten Rembang	13.80%	tinggi
Kabupaten Semarang	16.12%	tinggi
Kabupaten Sragen	15.21%	tinggi
Kabupaten Sukoharjo	15.38%	tinggi
Kabupaten Tegal	14.65%	tinggi

**Sumber:** Tabel 5. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4 nampak kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar untuk Provinsi Jawa Tengah masing-masing adalah Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang. Hal ini dapat dimengerti karena di Kabupaten Cilacap terdapat sumber tambang minyak bumi dan gas sedangkan di Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat pemerintahan dan sebagai pusat aktivitas kegiatan ekonomi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masing-masing kabupaten/kota seperti yang disajikan pada Tabel 6 mengalami fluktuasi naik turun. Naik turunnya pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan adanya mobilitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang berfluktuasi juga yang

tergantung pada strategi pengembangan wilayah masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan data pada Tabel 4 (Rata-Rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008) dan Tabel 6 (Rata-Rata Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008), dapat dilakukan pengujian statistik menggunakan uji beda dua rata-rata (Subiyakto, 2004) dengan nilai  $\alpha$  ditetapkan sebesar 5%. Pengujian tersebut untuk membuktikan hipotesis penelitian. Hasil uji beda dua rata-rata ditunjukkan pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Uji Beda Dua Rata-Rata Kontribusi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Rendah dan Tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008**

<b>Nilai</b>	<b>Rata-Rata Kontribusi Rendah</b>	<b>Rata-Rata Kontribusi Tinggi</b>
<i>Mean</i>	0.018802332	0.061540641
<i>Variance</i>	4.12239E-05	0.001658817
<i>Observations</i>	27	8
<i>Pooled Variance</i>	0.00038435	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>Df</i>	33	
<i>t Stat</i>	-5.415603546	
<i>P(T&lt;=t) one-tail</i>	2.70486E-06	
<i>t Critical one-tail</i>	1.692360258	
<i>P(T&lt;=t) two-tail</i>	5.40971E-06	
<i>t Critical two-tail</i>	2.034515287	

**Sumber:** Tabel 4. Data diolah.

**Tabel 8**  
**Uji Beda Dua Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Produk Domestik Regional Bruto**  
**(Rendah dan Tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,**  
**Tahun 2001-2008**

Nilai	Rata-Rata Pertumbuhan Rendah	Rata-Rata Pertumbuhan Tinggi
<i>Mean</i>	0.11837387	0.150530541
<i>Variance</i>	5.76448E-05	5.41441E-05
<i>Observations</i>	20	15
<i>Pooled Variance</i>	5.61597E-05	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>Df</i>	33	
<i>t Stat</i>	-12.56277213	
<i>P(T&lt;=t) one-tail</i>	2.00493E-14	
<i>t Critical one-tail</i>	1.692360258	
<i>P(T&lt;=t) two-tail</i>	4.00985E-14	
<i>t Critical two-tail</i>	2.034515287	

**Sumber:** Tabel 6. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8 dapat diringkas hasil pengujian hipotesis penelitian dengan uji Beda Dua Rata-Rata seperti yang nampak pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**  
**dengan Uji Beda Dua Rata-Rata**

Hipotesis	<i>t test</i>	<i>P value</i>	Pengujian
H1	-5.415603546	5.40971E-06	signifikan (*)
H2	-12.56277213	4.00985E-14	signifikan (*)

**Sumber:** Tabel 7 dan Tabel 8.

Keterangan: (\*) signifikan pada  $\alpha = 0,05$ .

## PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Perbedaan rata-rata kontribusi nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang

mempunyai kontribusi rendah (28 kabupaten/kota) dan yang mempunyai kontribusi tinggi (7 kabupaten/kota). Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata kontribusi PDRB rendah berarti kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut di bawah rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata kontribusi PDRB tinggi berarti kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut di atas rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Dengan demikian, rendah tingginya rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun menunjukkan besar kecilnya nilai kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota. Oleh karena nilai PDRB merupakan PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) maka nilai rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota rendah atau tinggi akan menunjukkan kecil atau besarnya nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (selama

8 tahun).

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rendah (20 kabupaten/kota) dan yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB tinggi (15 kabupaten/kota).

Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB rendah berarti laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB tinggi berarti laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Dengan demikian, rendah tingginya rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah selama 8 tahun menunjukkan besar kecilnya laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap rata-rata laju pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota. Oleh karena nilai PDRB merupakan PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) maka nilai rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota rendah atau tinggi akan menunjukkan kecil atau besarnya nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (selama 8 tahun).

Oleh karena kedua hipotesis penelitian tersebut diterima maka perbedaan posisi antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tipologi Klassen dan BCG *Matrix* menjadi benar karenanya. Berdasarkan Tipologi Klassen dan BCG *Matrix*, posisi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Posisi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**Menurut Tipologi Klassen dan BCG *Matrix*, Tahun 2001-2008**

Kabupaten/Kota	Tipologi Klassen	BCG <i>Matrix</i>
Kabupaten Banjarnegara	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Banyumas	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Batang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Blora	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Boyolali	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Brebes	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Cilacap	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Demak	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Grobogan	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Jepara	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Karanganyar	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Kebumen	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Kendal	Daerah Maju Tetapi Tertekan	→
Kabupaten Klaten	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Kudus	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Magelang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Pati	Daerah Berkembang Cepat	?

Kabupaten Pekalongan	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Pemalang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Purbalingga	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Purworejo	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Rembang	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Semarang	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Sragen	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Sukoharjo	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Tegal	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Temanggung	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Wonogiri	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Wonosobo	Daerah Tertinggal	☒
Kota Magelang	Daerah Tertinggal	☒
Kota Pekalongan	Daerah Tertinggal	☒
Kota Salatiga	Daerah Tertinggal	☒
Kota Semarang	Daerah Maju Tetapi Tertekan	➔
Kota Surakarta	Daerah Maju Tetapi Tertekan	➔
Kota Tegal	Daerah Tertinggal	☒

**Sumber:** Tabel 4 dan Tabel 6. Data diolah.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu (bergambar ? atau daerah berkembang cepat) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai *share* rendah, tetapi laju pertumbuhan sektor tinggi. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran satu ini memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kabupaten/kota ini. Dengan demikian, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kabupaten/kota ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran dua (bergambar ☒ atau daerah maju dan cepat tumbuh) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi berkembang, karena kabupaten/kota tersebut berada pada pasar yang memiliki laju pertumbuhan tinggi. Selain itu, kabupaten/kota itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran dua adalah memperbesar permodalan untuk melayani permintaan dari laju

pertumbuhan pasar yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga (bergambar ➔ atau daerah maju tetapi tertekan) merupakan kabupaten/kota yang berhasil, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan relatif rendah. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran empat (bergambar \* atau daerah tertinggal) dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan pasar rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kabupaten/kota tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kabupaten/kota tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kabupaten/kota tersebut juga rendah.

Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan ada perbedaan rata-rata laju pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan rata-rata kontribusi nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kontribusi rendah (28 kabupaten/kota) dan yang mempunyai kontribusi tinggi (7 kabupaten/kota). Perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rendah (20 kabupaten/kota) dan yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB tinggi (15 kabupaten/kota). Oleh karena ada perbedaan rata-rata kontribusi dan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan posisi masing-masing kabupaten/kota berbeda berada dalam 4 kemungkinan posisi, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu memilih strategi pengembangan wilayah yang berbeda pula.

### Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota/Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1) perlu memilih strategi pengembangan wilayah yang berbeda yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Saran ini disampaikan karena masing-masing kabupaten/kota mempunyai kekhasan wilayah yang bersangkutan (*endogenous*

*development*); 2) Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung strategi pengembangan wilayah. Saran ini disampaikan karena semenjak pemberlakuan otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden terpilih sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari dan Rudy Badrudin. 2003. "Strategi Pengembangan Kecamatan Menggunakan *Growth-Share Boston Consulting Group (BCG) Matrix* (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, DIY)". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 17, No. 3, Desember 2003: 203-213.
- Andriani, Lis, HR. 2001. "Analisis Strategi Perguruan Tinggi: Telaah Faktor Eksternal Dan Internal Sebagai Dasar Penentuan Posisi Keunggulan Kompetitif Dan Pemilihan Strategi: Kasus FE Jurusan Manajemen pada 9 Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Surabaya". *Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga*. Diakses dari <http://www.unair.ac.id>. tanggal 28 Februari 2011.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Bappeda DIY, 2010, *Laporan Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009a. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2002-2008*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2009b. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik. Semarang.
- Badrudin, Rudy. 2008. "Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 2, Desember 2008: 199-217.
- Bounds, Greg, *et al.* 1994. *Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm*. McGraw-Hill. Singapore.
- Hirawan, Susiyati Bambang. 2007. *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pebruari 2007. Jakarta.
- Kompas, *Mekarnya Korupsi Daerah Pemekaran*, 2 Agustus 2010, hlm. 6.
- Maisyaroh, Arifa dan Debora Anggraini. 2005. "Kompetisi dan Strategi dalam Membangun Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi". *Jurnal Manajemen STIE-MCE*. Vol. 12, No. 1, April 2005:17-26.
- Prasetyo, Yudo Agus. 2004. "Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Guna Meningkatkan Daya Saing Pada PT Cipta Niaga Dengan Analisis SWOT". *Jurnal Kompilasi*. Diakses dari <http://www.musi.ac.id> tanggal 1 Juni 2011.
- Subiyakto, Haryono. 2001. *Statistika (Inferen) untuk Bisnis* Edisi 2. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[<http://www.kppod.go.id>]

## **EVALUASI DETERMINAN SUSTAINABILITAS PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA**

**Sukidin**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember  
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Bumi Tegalboto, Jember 68121  
Telepon +62331334988, +62331330973, Fax. +62331332475  
E-mail: sukidin2005@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

Evaluation and assessment of program sustainability, specifically student entrepreneurship program is a well documented though relatively recent phenomenon. Jember University was execution the micro and small business program for its students by name Program Mahasiswa Wirausaha (Entrepreneurs Student Program/ESP). This evaluation study investigates the influences of administrative selection quality, business plan evaluation quality, and score of entrepreneurship education and training result to the sustainability of Entrepreneurs Student Program. Data are drawn from 85 respondents (samples) and 25 groups small business as beneficiaries of ESP for the period of 2011 to 2012 as long as 15 months. This study uses path analysis diagram for existing data. Result of the study show that administrative selection quality and score of entrepreneurship education and training are not direct influences to the sustainability of Entrepreneurs Student Program, but by business plan evaluation quality as intervening variable. Business plan strongly influenced to the sustainability of Entrepreneurs Student Program. The results help to encourage staff program to better strenghtening of business plan by entrepreneurship education and training management.

**Keywords:** program sustainability, student entrepreneurship, economic education.

JEL classification: I23

### **PENDAHULUAN**

Penelitian tentang pendidikan kewirausahaan telah didokumentasikan secara baik, antara lain oleh Craig dan Johnson (2006), tentang dampak pelatihan karir akademik terhadap kemampuan untuk berinovasi dan memahami peluang; pengukuran kewirausahaan individu menggunakan *Enterprising Managers Assessment Questionnaire* (EMAQ) (Deamer dan Earle, 2004); tren yang muncul dan tantangan bagi pendidikan kewirausahaan di abad 21 (Kuratko, 2003); dan pengembangan dalam penggunaan kata-kata untuk menggambarkan wacana (bahan ajar) pendidikan kewirausahaan (Gibb, 2000 dan Henry *et al.*, 2005).

Pendidikan kewirausahaan dan kewirausahaan mahasiswa memang memperoleh perhatian menonjol, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Salah satu penyebabnya, menurut hasil penelitian Mason (2011), di China, Afrika Selatan, Irlandia, dan Malaysia, pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu cara yang signifikan guna memberantas kemiskinan. Selain itu, kewirausahaan merupakan katalis untuk pembangunan ekonomi bagi banyak negara di seluruh dunia. Secara bersamaan, kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan juga menjadi fokus para peneliti, para pendidik serta berbagai institusi, baik negeri maupun swasta.

Hasil penelitian mutakhir tersebut pada prinsipnya mempertegas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Uslay *et al.* (2002), misalnya, menyebutkan bahwa di era generasi *dot-com* dan globalisasi dewasa

ini, minat dalam pengembangan bisnis baru skala kecil, mikro, dan menengah telah meningkat di seluruh dunia. Sebagai dampaknya, menurut Usley *et al.* (2002), pendidikan kewirausahaan memiliki perspektif internasional dan telah menjadi tema penting di kalangan peneliti dan praktisi. Salah satu aspek menarik dari studi tersebut adalah tentang minat kewirausahaan mahasiswa dari berbagai latar belakang kultural. Dengan menjelajahi Amerika Serikat, Turki, dan Spanyol, penelitian Usley *et al.* (2002), membuktikan bahwa sikap dan minat mahasiswa untuk menjadi pengusaha dan terhadap kewirausahaan dipengaruhi oleh budaya bangsa. Penelitian itu dibangun berdasarkan dan berfungsi untuk memperluas pemahaman tentang isu-isu tersebut.

Kewirausahaan sebagai katalis pembangunan ekonomi berbasis argumentasi bahwa pada masa-masa sulit ketika orang-orang berpendidikan tidak mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan menjadi tantangan bagi negara (Ahmed *et al.*, 2010). Ahmed *et al.* (2010), memberi contoh Pakistan, dimana pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung tenaga kerja pengangguran. Pekerjaan oleh diri sendiri dan kewirausahaan disebut sebagai solusi terbaik. Akan tetapi, kewirausahaan bukan fungsi yang mungkin hasil dari upaya sederhana. Hal ini membutuhkan sikap permanen yang luar biasa sebagai bagian dari kepribadian. Sikap dapat berdasarkan kepribadian, karakteristik demografis, dan dibentuk kembali melalui pendidikan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Ahmed *et al.* (2010), melakukan penelitian dengan sampel sebanyak 276 mahasiswa dan bertujuan untuk mempelajari dampak dari sifat-sifat pribadi (daya inovatif atau keinovatifan), karakteristik demografis, dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat kewirausahaan mahasiswa Pakistan. Penelitian tersebut menjadi nilai tambah dalam skenario Pakistan karena memberikan basis pengetahuan kewirausahaan pada tingkat negara. Hasilnya menunjukkan ada hubungan yang kuat antara keinovatifan dan minat kewirausahaan. Beberapa karakteristik demografis yaitu jenis kelamin dan usia signifikan dengan minat untuk menjadi pengusaha. Akan tetapi, pengalaman sebelumnya dan penyingkapan asal keluarga (keluarga bisnis dan bukan keluarga bisnis) memiliki dampak yang berbeda terhadap minat mahasiswa untuk menjadi

pengusaha.

Tingginya perhatian terhadap penelitian pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi tercermin dari betapa bervariasinya fokus perhatian para peneliti. Istilah pendidikan kewirausahaan dan ide bahwa kewirausahaan dapat diajarkan memang telah menjadi topik populer untuk penelitian. Penelitian Dana (2001) di Asia misalnya, membuktikan bahwa para mahasiswa membutuhkan pengetahuan kewirausahaan yang berbeda, yakni keterampilan kewirausahaan dan keterampilan manajerial. Menggunakan konsep kewirausahaan Schumpeterian versus kewirausahaan Kirznerian, Dana (2001) mencoba menjawab pertanyaan, apakah kewirausahaan dapat diajarkan. Hasilnya, kemampuan manajerial dan keterampilan wirasaha dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Implikasinya, diperlukan materi pendidikan kewirausahaan yang berbeda untuk mengarahkan pengajaran dan transformasi pikiran.

Temuan dari studi-studi tersebut menyediakan sebuah kolase dari perspektif dimana para peneliti dapat menarik wawasan tentang pendidikan kewirausahaan. Akan tetapi, apakah pendidikan kewirausahaan memiliki dampak yang berkelanjutan, belum banyak mendapat perhatian para peneliti pendidikan kewirausahaan. Penelitian evaluasi ini diharapkan mengisi kekurangan tersebut sebagaimana banyak direkomendasikan para peneliti sebelumnya (Pluye, *et al.*, 2005; *National Community Service*, 2010; Marek, Mancini and Donna-Jean, 2003).

Seperti diketahui, dampak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 yang kemudian menjadi pemicu gerakan reformasi politik dan berbagai bidang pada 1998, sangatlah luas. Proses *recovery* yang dilakukan pada masa-masa sesudah itu tidak banyak berarti bagi tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Sementara yang masih bertahan dan menjadi tumpuan roda perekonomian pada umumnya adalah bisnis skala UMKM yang dijalankan oleh para *entrepreneur*.

Mengingat peranan para wirasahawan yang sangat signifikan, maka guna mengantisipasi kemungkinan krisis di masa-masa mendatang, sejumlah perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kejuruan mengambil inisiatif melaksanakan pendidikan dan

pelatihan kewirausahaan bagi para siswa dan mahasiswanya. Program tersebut difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan dana dalam bentuk Bantuan Modal Kerja (BMK) yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang diajukan setelah melalui seleksi bertahap. Program pendidikan kewirausahaan di Universitas Jember (UNEJ), Jember, Jawa Timur, dinamai Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). PMW dilaksanakan oleh *Entrepreneur & Employment Advisory* (EEA) dan *Student Advisory Centre* (SAC) di bawah Badan Perguruan Tinggi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Jember (LP3-UNEJ).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian evaluasi untuk mengungkap dampak berkelanjutan dari program pendidikan kewirausahaan bagi para mahasiswa relevan dilakukan. Informasi hasil penelitian evaluasi ini sangat dibutuhkan, sekurang-kurangnya karena tiga alasan, yaitu pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di perguruan tinggi merupakan inkubator dan menyangkut biaya yang besar menurut ukuran mahasiswa sehingga diperlukan akuntabilitas dalam bentuk praktik terbaik sebagai basis pengalaman dan medium pembelajaran atau pendidikan ekonomi, alumni program pendidikan kewirausahaan diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan inovator yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terdidik dapat berkurang karena harapannya adalah menjadi pengusaha sebelum menjadi sarjana, dan pengkajian tren sustainabilitas dan determinan yang mempengaruhinya dapat menjadi pengaya penelitian tentang pendidikan kewirausahaan sekaligus dapat dijadikan rujukan atau bahan belajar bagi program sejenis.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi keberlanjutan Program Mahasiswa Wirausaha dan menguji apakah kualitas hasil seleksi administratif, kualitas hasil pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis keterampilan manajemen dan kualitas perencanaan bisnis merupakan determinan sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha.

#### **MATERIDAN METODE PENELITIAN**

Sustainabilitas suatu program sering didefinisikan sebagai kapasitas program untuk dapat terus memberikan kemaslahatan dalam jangka waktu yang

panjang. Menurut Departemen Evaluasi Operasi Bank Dunia (AIDA, 2001), istilah sustainabilitas mendeskripsikan kemampuan satu program untuk memelihara tingkat aliran kemaslahatan yang layak sepanjang kehidupan ekonominya. Walaupun kemampuan ini sering diungkapkan menurut aspek kuantitatif yang melibatkan tingkat keuntungan ekonomi atau keuangan internalnya, namun kemaslahatan juga bisa diukur secara kualitatif. Untuk program yang ada pada sektor produktif seperti industri, ukuran utama performansinya adalah output, yang pada umumnya diungkapkan dari segi pendayagunaan kapasitas. Namun, program yang didukung oleh bank mempunyai tujuan lain seperti kebijakan sub-sektoral, transfer teknologi, dan pembangunan kelembagaan yang harus diukur secara kualitatif.

Sebagaimana ditunjukkan hasil kajian AIDA (2001), sustainabilitas juga tergantung pada apakah dapat dicapai keseimbangan dalam pemanfaatan bentuk utama permodalannya, yaitu modal manusia, alam, budaya, kelembagaan, fisik dan keuangan. Sustainabilitas lebih sulit didefinisikan dan diukur untuk program yang dirancang agar dapat mengembangkan sumber daya manusia karena indikator kualitatif harus ikut diperhitungkan bersama-sama dengan indikator kuantitatif. Tingkat sustainabilitas program didefinisikan sebagai persentase produk barang dan jasa program yang masih tetap dicapai dan dipelihara setelah beberapa tahun berakhirnya penyediaan sumber daya dari pihak pemeroleh masalah, kontinyuasi tindakan lokal yang distimulasi oleh program, dan munculnya berbagai layanan dan inisiatif baru sebagai penerus yang lama sebagai hasil dari program.

Ide pokok di balik semua definisi tersebut adalah bahwa semua program didesain untuk menghasilkan aliran *output*, *benefits*, atau layanan yang berkelanjutan sepanjang rencana jangka-hidup programnya. Pada beberapa program, jangka-hidup ekonominya dapat merentang sepanjang tiga puluh tahun, sedangkan pada beberapa program lain dapat jauh lebih singkat. Sustainabilitas program harus dinilai berdasarkan kemampuannya melestarikan aliran kemaslahatan ini sepanjang waktu.

Untuk kebanyakan jenis program industri dan komersial termasuk UMKM, sustainabilitas harus

didefinisikan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk tetap dapat menghasilkan keuntungan. Sifat perusahaan menentukan bagaimana sustainabilitas diterjemahkan menjadi pemeliharaan atau perluasan pasar, menjadi kompetisi di bidang harga dan kualitas, dan menjadi pengamanan sumber daya bahan dan tenaga kerja. Sustainabilitas merupakan konsep dinamis, dalam arti bahwa perusahaan itu harus terus-menerus mengembangkan produk dan layanan baru.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan program untuk tetap mempertahankan aset atau bantuan modal kerja dan dapat menghasilkan keuntungan bagi mahasiswa wirausaha penerima BMK. Jangka-waktu yang ditetapkan sebagai dasar adalah bulan, yaitu 15 bulan sejak mahasiswa wirausaha menerima BMK. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) di lingkungan UNEJ, ditawarkan kepada seluruh mahasiswa tanpa pengecualian bagi mahasiswa yang sedang kuliah di 12 fakultas. Ada beberapa tahapan PMW dijalankan secara simultan, mulai dari pendaftaran para peminat; seleksi awal dalam bentuk evaluasi administratif dan evaluasi rencana bisnis, baik secara individual maupun kelompok; pendidikan dan pelatihan bisnis berbasis keterampilan manajemen; seleksi akhir dalam bentuk presentasi kelayakan (fisibilitas) rencana bisnis; eksekusi penerima Bantuan Modal Kerja (BMK); serta monitoring dan evaluasi kinerja bisnis penerima BMK.

Program pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi memainkan peran fundamental dalam mengembangkan kualitas kewirausahaan mahasiswa. Kontribusi dari program-program seperti itu dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan kewirausahaan mahasiswa telah dibuktikan oleh Bagheri (2009), melalui penelitian kualitatifnya di Universitas Putra Malaysia. Analisis data wawancara semiterstruktur menunjukkan bahwa program-program pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi memfasilitasi pengembangan kepemimpinan kewirausahaan mahasiswa melalui berbagai cara, misalnya, pengalaman belajar, belajar interaksi sosial, dan kesempatan pengakuan. Hasil pendidikan kewirausahaan terjadi dalam proses mengubah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi sosial untuk mengidentifikasi peluang untuk pengembangan pribadi dan penciptaan bisnis.

Pendidikan kewirausahaan mahasiswa adalah sebuah program atau aktivitas yang diperlukan mahasiswa melalui proses belajar tentang apa yang diperlukan untuk menjadi sukses sebagai pemilik atau manajer UMKM (Brijlal, 2011). Berdasarkan sudut pandang kuliah untuk kerja, program tersebut merupakan representasi dari persiapan seseorang untuk memahami semua aspek dalam menjalankan bisnis dan belajar tentang bagaimana menjadi *leader* bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum mengikuti program mahasiswa wirausaha dilakukan seleksi administratif tentang kesiapan mahasiswa yang bersangkutan.

Menurut Brijlal (2011), pendidikan kewirausahaan mahasiswa dapat mengambil bentuk bisnis berbasis institusi dimana para mahasiswa mendapatkan bantuan untuk membuat dan menjalankan bisnis skala kecil. Menurut Keat (2011), pendidikan kewirausahaan menawarkan pada mahasiswa pengalaman interdisipliner dalam memahami UMKM. Bahkan rencana bisnis merupakan variabel penentu bagi peserta program mahasiswa wirausaha. Berdasarkan kualitas rencana bisnis itulah –setelah dilakukan evaluasi oleh minimal dua *reviewer*- peserta program mahasiswa wirausaha diputuskan dapat menerima bantuan modal kerja (BMK).

Hubungan kuat antara pendidikan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan manajerial telah dibuktikan oleh penelitian Idogho (2011) yang melakukan penelitian di Politeknik Auchi di Nigeria. Idogho (2011), mengungkapkan bahwa pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dengan kurikulum memberi dampak yang signifikan kepada para mahasiswa setelah lulus, lebih-lebih ketika harus mendesain bisnis skala kecil. Prakarsa pendidikan kewirausahaan di Nigeria tersebut sebagai bagian dari reposisi pembangunan ekonomi memandang kewirausahaan sebagai penggerak sekaligus penciptaan lapangan kerja baru bagi para lulusannya (Adejimola, 2009). Penelitian Karim (2007) di Indonesia membuktikan bahwa pendidikan dan pelatihan kewirausahaan korporasi dalam lingkungan perusahaan secara signifikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan tujuan untuk mengungkap sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha dengan kriteria hasil evaluasi administratif, kualitas pendidikan, dan pelatihan

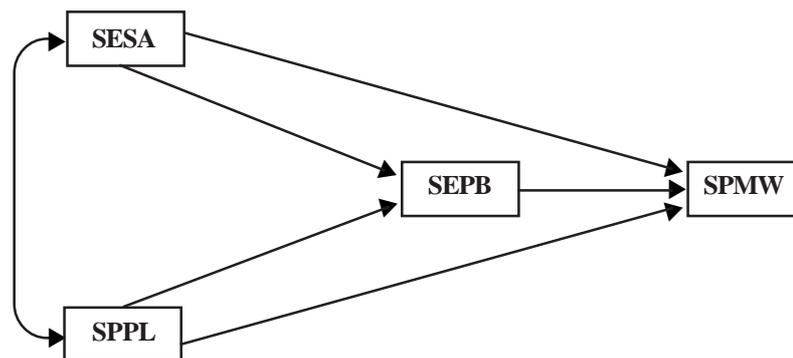
kewirausahaan yang berbasis keterampilan manajemen, dan kualitas evaluasi perencanaan bisnis. Berdasarkan kajian teori tersebut, maka dirumuskan hipotesis, yaitu: **H1:** Kualitas perencanaan bisnis memediasi pengaruh kualitas seleksi administratif, kualitas pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan manajemen terhadap sustainabilitas program Pendidikan Mahasiswa Wirausaha.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk rerata skor evaluasi seleksi administratif, rerata skor evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, rerata skor evaluasi perencanaan bisnis, serta nominal asset BMK dan profitabilitasnya selama 15 bulan terakhir. Data tersebut merupakan data hasil seleksi Program Mahasiswa

penerima BMK dengan jumlah total mahasiswa wirausaha sebanyak 85 orang yang dikururkan pada awal tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada awal April tahun 2012 dan selesai pada akhir Juli 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diagram jalur (*path analysis*) dengan bantuan *software* LISREL 8.80.

Berdasarkan desain tersebut, maka kerangka kerja teoritik penelitian dapat divisualisasikan melalui model berikut ini.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *population sampling*, artinya, sebanyak 85 anggota populasi dan total 25 kelompok bisnis menjadi sampel penelitian.



**Gambar 1**  
**Model Teoritik Penelitian dan Hubungan Antar Variabel**

Keterangan:

- SESA : Skor Evaluasi Seleksi Administratif (X1)
- SPPK : Skor Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan (X2)
- SEPB : Skor Evaluasi Perencanaan Bisnis (X3)
- SPMW : Sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha (X4=Y)

Wirausaha tahun 2010 yang diikuti oleh 421 mahasiswa dari 12 fakultas, yakni Fakultas MIPA, Teknologi Pertanian, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Sastra, Hukum, Teknik, Kesehatan Masyarakat, ISIP, Kedokteran Gigi, dan Fakultas Farmasi. Hasil seleksi menghasilkan 25 kelompok

**HASIL PENELITIAN**

Kajian sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha dimulai dari pengungkapan data sekunder tentang identitas penerima BMK, fokus perencanaan bisnisnya, dan nominal BMK yang diterima, baik dalam

bentuk dana tunai untuk modal kerja maupun untuk kepentingan permagangan. Data penelitian menunjukkan, seleksi tahap awal diikuti 421 mahasiswa yang terbagi dalam 103 kelompok dan 34 individual. Dinyatakan lolos tahap pertama ini 98 mahasiswa yang terbagi dalam 28 kelompok dan satu individual. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama ini berhak menerima pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan manajemen.

Skor hasil evaluasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan manajemen (e" 60 poin), setelah dirata-rata dengan skor hasil revisi perencanaan bisnis (e" 275 poin) yang dipresentasikan

menjadi penentu akhir peserta PMW. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, sebanyak 85 mahasiswa dinyatakan lolos dan berhak menjadi peserta PMW penerima BMK, tergabung dalam 24 kelompok dan satu individu, sehingga secara keseluruhan ada 25 kelompok penerima BMK. Masing-masing kelompok mahasiswa wirausaha menjalankan rencana bisnis yang bervariasi dengan total BMK sebesar Rp 351.000.000,- (Tabel 1).

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian yang terdiri atas variabel seleksi administratif, variabel pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, variabel perencanaan bisnis, dan variabel sustainabilitas PMW.

**Tabel 1**  
**Daftar Peserta Program Mahasiswa Wirausaha Tahun 2011**

Kelompok	Bisnis Plan	BMK (Rp)		
		Modal Kerja	Magang	Total
1	Budidaya Ikan Gabus	18.000.000	1.000.000	19.000.000
2	Budidaya Tanaman Buah dalam Pot	9.000.000	750.000	9.750.000
3	Pembentukan Masyarakat Berorientasi Usaha Studi Kasus kampung Bebek	13.000.000	1.000.000	14.000.000
4	Usaha kopi Luwak	18.000.000	1.000.000	19.000.000
5	Peternakan Unggas Burung Puyuh	16.250.000	1.250.000	17.500.000
6	Usaha Serbuk Temulawak Instan Berbasis Teknologi Baru	17.500.000	1.250.000	18.750.000
7	Beternak Burung Puyuh & Budidaya Ayam Ketawa serta Ayam Pelung	9.750.000	750.000	10.500.000
8	Mr. Onde	8.250.000	750.000	9.000.000
9	Budidaya Ikan Mujaer & Nila melalui Teknik Keramba di Area Sungai dengan Pakan Organik	18.750.000	750.000	19.500.000
10	Budidaya Semangka Unik dengan Bantuan Lebah Madu	15.000.000	750.000	15.750.000
11	Bakwan Sistem Agribisnis Terpadu	10.000.000	1.000.000	11.000.000
12	Budidaya Ikan Patin sebagai Pengganti Bahan Makanan Ayam	17.250.000	750.000	18.000.000
13	Coffe Departement	19.000.000	1.000.000	20.000.000
14	Bybot Hobby Robot	12.750.000	750.000	13.500.000
15	Home Ind Vegefruitghurt	5.250.000	250.000	5.500.000
16	Banana Cafe/Warung sego Murah	4.500.000	500.000	5.000.000
17	Nikki Fashion/Batik Bordir Gajah Oling	9.000.000	500.000	9.500.000
18	Bakso Jamur Pelangi	11.000.000	1.000.000	12.000.000
19	Kerupuk Sehat: Kerupuk Tulang Ikan	10.500.000	750.000	11.250.000
20	Budidaya Cabe Merah	11.000.000	500.000	11.500.000

21	Manajemen Konstruksi Bangunan Sekunder	7.500.000	750.000	8.250.000
22	Usaha Peternakan Kambing Gibas	17.500.000	1.250.000	18.750.000
23	Usaha Ternak Ie Dumbo	17.000.000	1.000.000	18.000.000
24	Budidaya Burung Puyuh	17.000.000	1.000.000	18.000.000
25	Usaha Budidaya Ikan Gurameh	17.000.000	1.000.000	18.000.000

Sumber: Hasil Penelitian, SAC LP3-UNEJ 2011.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
SESA	85	10,00	23,00	16,1458	4,05795
SPPK	85	62,00	92,00	73,0417	9,57115
SEPB	85	290,00	470,00	369,5833	49,17618
SPMW	85	0,61	0,99	0,8196	0,10950
Valid N ( <i>listwise</i> )	85				

Sumber: Hasil Penelitian. Data diolah (2012).

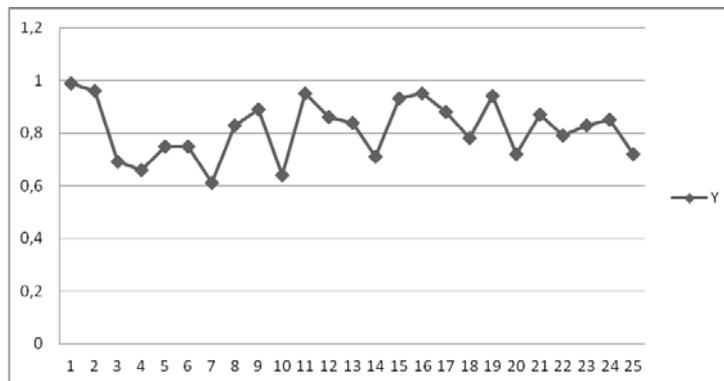
Berdasarkan statistik deskriptif variabel penelitian terungkap bahwa panitia seleksi telah melaksanakan tugasnya secara objektif dengan meloloskan para peserta yang memiliki skor evaluasi administratif e" 10 poin dari rentang skor 0-30 poin. Rerata skor seleksi administratif 16,15 mengindikasikan sebagian besar peserta PMW bernilai baik. Hal yang sama terjadi setelah para calon menjalani pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, dari rentang skor 0 – 100 poin, panitia seleksi meloloskan mereka yang memiliki skor e" 60. Rerata skor hasil pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebesar 73,04 menunjukkan bahwa rata-rata peserta PMW berhasil menyerap Diklat dengan baik. Sesuai dengan patokan penilaian, peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lolos hanya peserta yang memperoleh skor perencanaan bisnis e" 275 dari rentang skor 0 - 500 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa skor minimal perencanaan bisnis yang dinyatakan lolos adalah 290, sedangkan skor maksimal yang diperoleh adalah 470. Rerata skor perencanaan bisnis sebesar 369,58 menunjukkan bahwa rata-rata perencanaan bisnis peserta PMW tergolong prospektif.

Gambar 2 menunjukkan tren sustainabilitas PMW yang dihitung dari dua indikator, yakni rerata

nilai aset (didefinisikan sebagai BMK dikurangi biaya permagangan ditambah reinvestasi) dan rerata profitabilitas (didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan pendapatan) yang diperoleh selama 15 bulan menjalankan PMW.

Berdasarkan data statistik deskriptif dan visualisasi Gambar 2 tampak bahwa sustainabilitas PMW 25 kelompok bisnis berada dalam kisaran 61%–99%. Artinya, baik aset maupun profitabilitas kelompok bisnis selama 15 bulan terakhir secara kumulatif sudah ada yang hampir dua kali lipat BMK yang disalurkan, dan minimal di atas setengah dari BMK. Rata-rata sustainabilitas kelompok peserta PMW sebesar 81,96% mengindikasikan bahwa sebagian besar kelompok PMW memiliki tingkat sustainabilitas bisnis yang baik dan prospektif atau dapat diharapkan akan berlanjut untuk beberapa periode berikutnya. Namun, nampak jelas bahwa rata-rata tiap bulan pertumbuhan bisnis PMW kurang dari 10%; terendah tumbuh 4,06%, dan tertinggi tumbuh 6,66%.

Hasil evaluasi model *fit* yang diajukan menunjukkan, secara keseluruhan *goodness of fit* yang dinilai berdasarkan lima indikator *fit* menunjukkan bahwa model *fit* baik. Hasil selengkapnya ditunjukkan dalam Tabel 3 dan Gambar 3 berikut ini.



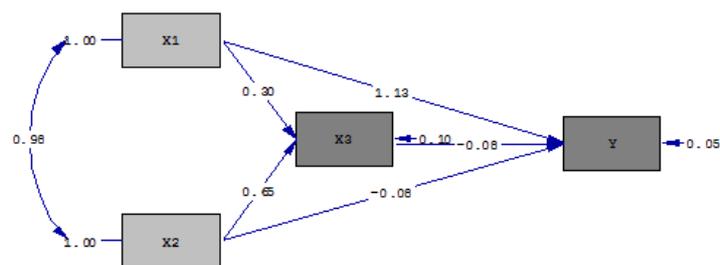
Sumber: Hasil Penelitian. Data diolah (2012).

**Gambar 2**  
Tren Sustainability PMW 25 Kelompok Wirausaha

**Tabel 3**  
Statistik Hasil Goodness of Fit Model

No.	Indikator	Koefisien	Signifikan	Keputusan
1	Chi-square statistics	0.00	sig > 0.05	Model Fit
2	Goodness of Fit Index (GFI)	1.00	> 0.60	Model Fit
3	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	0.98	> 0.90	Model Fit
4	Absolute fit index RMSEA	0.00	< 0.09	Model Fit
5	Comparative Fit Index (CFI)	1.00		Model Fit

Sumber: Hasil Penelitian. Data diolah (2012).



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Sumber: Hasil Penelitian. Data diolah (2012).

**Gambar 3**  
Model Fit Hasil Penelitian

Hasil estimasi LISREL menunjukkan persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Struktural 1

$$X3 = 0.706 * X1 + 0.637 * X2, \text{Errorvar.} = 9.517, R^2 = 0.796$$

(0.696)	(0.844)	(2.937)
2.875	4.341	3.240

Persamaan Struktural 2

$$Y = 0.586 * X1 + 0.437 * X2 + 0.641 * X3, \text{Errorvar.} = 9.517, R^2 = 0.896$$

(0.0171)	(0.671)	(0.0917)	(2.937)
2.734	2.357	3.432	3.240

Hasil pengujian statistik pada persamaan struktural 1 menunjukkan bahwa kualitas hasil evaluasi administratif (SESA/X1) berhubungan positif dengan kualitas skor evaluasi perencanaan bisnis (SEPB/X3) pasca pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis keterampilan, yaitu sebesar 0,70 dengan t hitung 2,875, signifikan pada level 0,01 ( $t > 2,660$ ). Skor evaluasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (SPPK/X2) yang berbasis keterampilan manajemen berhubungan positif dengan kualitas skor evaluasi perencanaan bisnis (SEPB/X3), yaitu sebesar 0,84 dengan t hitung 4,341, signifikan pada level 0,01 ( $t > 3,460$ ). Kedua variabel signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung  $> 2,660$ . Secara bersama-sama, kualitas hasil evaluasi administratif dan kualitas hasil evaluasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berpengaruh sebesar 0,79 (79%) terhadap kesempurnaan perencanaan bisnis, sehingga besaran pengaruh variabel lain adalah  $100\% - 79\% = 21\%$ .

Hasil pengujian statistik pada persamaan struktural 2 menunjukkan bahwa kualitas hasil evaluasi administratif (SESA/X1) berhubungan positif dengan sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha (SPMW/Y), yaitu sebesar 0,59 dengan t hitung 2,734, signifikan pada level 0,01 ( $t > 2,660$ ). Skor evaluasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (SPPK/X2) yang berbasis keterampilan manajemen berhubungan positif dengan sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha (SPMW/Y), yaitu sebesar 0,44 dengan t hitung 2,357, signifikan pada level 0,05 ( $t > 2,000$ ). Skor evaluasi perencanaan bisnis (SEPB/X3) berhubungan positif dengan sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha (SPMW/Y), yaitu sebesar 0,64 dengan t hitung 3,432, signifikan pada level 0,01 ( $t > 2,660$ ). Ketiga variabel signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung  $> 2,660$ . Secara bersama-sama, kualitas hasil evaluasi

administratif, kualitas hasil evaluasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, dimediasi oleh kualitas perencanaan bisnis berpengaruh sebesar 0,89 (89%) terhadap sustainabilitas Program Mahasiswa Wirausaha (SPMW/Y), sehingga besaran pengaruh variabel lain adalah  $100\% - 89\% = 11\%$ . Berdasarkan hasil analisis terbukti total pengaruh variabel observed endogen terhadap variabel endogen lainnya terbukti signifikan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pengujian hipotesis dengan mediasi didukung data sehingga hipotesis yang berbunyi: Kualitas perencanaan bisnis memediasi pengaruh kualitas seleksi administratif dan kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan manajemen terhadap sustainabilitas program Pendidikan Mahasiswa Wirausaha diterima.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa sustainabilitas program mahasiswa wirausaha sangat ditentukan oleh kesempurnaan dan prospek tidaknya perencanaan bisnis yang disusun. Seleksi administratif serta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan saja tidak cukup signifikan bagi sustainabilitas program apabila perencanaan bisnisnya tidak sempurna dan tidak prospektif. Akan tetapi, perencanaan bisnis tentu saja tidak akan sempurna apabila para calon mahasiswa wirausaha tidak dibekali kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Sementara seleksi administratif sebetulnya hanyalah sarana atau alat untuk menjamin rasa keadilan oleh karena peminat BMK begitu banyak sementara BMK yang disediakan (plafon biaya) sangat terbatas.

Ada kecenderungan yang unik dan terbukti signifikan bahwa semakin tinggi kualitas perencanaan bisnis, semakin tinggi pula sustainabilitas program mahasiswa wirausaha. Kecenderungan lain yang relevan dikemukakan adalah, semakin tinggi nilai hasil pendidikan dan pelatihan kewirausahaan semakin baik pula perencanaan bisnisnya. Akan tetapi, sustainabilitas program tidak berjalan secara linier, melainkan fluktuatif. Pada tiga bulan pertama, hampir semua kelompok bisnis PMW nyaris tidak tumbuh dengan baik. Barangkali hal itu dikarenakan oleh faktor produksi yang masih berjalan dan sedang berproses. Produk

pertama yang bisa dipasarkan oleh masing-masing kelompok rata-rata terjadi setelah tiga bulan pertama, kecuali lima kelompok bisnis, yaitu Mr. Onde, Coffe Departement, Home Ind Vegefruitghurt, Banana Cafe/Warung Sego Murah, dan Bakso jamur Pelangi, yang dapat langsung mulai sejak hari pertama dan pada bulan pertama sudah bisa meraih keuntungan meskipun belum sampai kepada upaya untuk reinvestasi.

Sustainabilitas dalam bentuk asset selama bulan pertama tumbuh negatif. Hal itu disebabkan oleh karena BMK selain digunakan untuk pembelian bahan baku, juga digunakan untuk permagangan yang habis pakai. Pada masa-masa selama tiga bulan pertama nyaris tidak ada reinvestasi yang diperoleh dari keuntungan hasil usaha. Sebagian besar kelompok bisnis justru tumbuh pesat setelah enam bulan usaha dijalankan. Pada saat itu hasil usaha sudah mulai nampak dan kemampuan untuk reinvestasi sudah cukup tinggi. Namun pada bulan kesembilan sustainabilitas rata-rata turun lagi. Hasil sigi menunjukkan bahwa pada bulan kesembilan pada umumnya terjadi kesibukan kuliah menjelang ujian akhir semester yang dimungkinkan menjadi kendala bagi optimalisasi program.

Tren sustainabilitas secara fluktuatif barangkali juga ditentukan oleh determinan lain yang tidak dievaluasi dalam penelitian ini. Determinan lain tersebut misalnya nilai inflasi bulanan, daya beli masyarakat, dan faktor kemampuan pemasaran yang sebetulnya juga sangat menentukan profitabilitas bisnis. Di luar itu belum ada uji mutu (kualitas) terhadap produk yang dihasilkan oleh program PMW. Standar produk baru berjalan seperti biasa orang berbisnis, belum tersentuh oleh konten-konten *benchmarking* bahkan oleh uji mutu. Secara umum, bagi para penerima manfaat, model program mahasiswa wirausaha dengan alur seperti dijalankan dapat dipertahankan karena selain kompetitif, juga sangat menjanjikan masa depan yang lebih baik. Apabila program berjalan sebagaimana mestinya dimana staf program tetap objektif menjalankan tugasnya, kemungkinan kegagalan akan dapat dieliminasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis, kualitas hasil

seleksi administratif tidak secara langsung berpengaruh terhadap sustainabilitas program PMW. Demikian halnya kualitas hasil pendidikan dan pelatihan kewirausahaan juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap sustainabilitas program PMW. Pengaruh kedua variabel tersebut dimediasi oleh kualitas perencanaan bisnis yang secara langsung berpengaruh signifikan terhadap sustainabilitas program PMW.

### Saran

Mengingat begitu besar pengaruh perencanaan bisnis terhadap sustainabilitas program PMW, maka disarankan agar staf program lebih memperkuat perencanaan bisnis dari berbagai sisi. Namun demikian, titik lemah penelitian ini nampak dari besarnya dekomposisi pengaruh variabel endogen independen terhadap variabel endogen dependen. Hal ini disebabkan sedikitnya variabel yang dilibatkan dalam evaluasi. Hasilnya akan berbeda apabila variabel endogen independen diperluas misalnya dikaji pula variabel inflasi, daya beli masyarakat, kualitas pemasaran, dan kualitas produk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adejimola, A. S. and Olufunmilayo, T.O. 2009. "Spinning off an Entrepreneurship Culture among Nigerian University Students: Prospects and Challenges." *African Journal of Business Management*. Vol. 3, No. 3. 080-088.
- Ahmed, I. *et.al.* 2010. "Determinants of Students' Entrepreneurial Career Intentions: Evidence from Business Graduates." *European Journal of Social Sciences*. Vol. 15, No. 2. 14-22.
- AIDA. 2001. *Program Sustainability: Developing Strategies for Maintaining Programs Over the Long-Term*. New York: American Indian Development Associate.
- Bagheri, A. and Pihie, Z.A.L. 2009. "An Exploratory Study of Entrepreneurial Leadership Development of University Students." *European Jour-*

- nal of Social Sciences*. Vol. 11, No. 1. 177-190.
- Brijlal, P. 2011. "Entrepreneurial Perceptions and Knowledge: A Survey of Final Year University Students." *African Journal of Business Management*. Vol. 5, No. 3. 818-825.
- Craig, J.B.L., and Johnson, D. 2006. "Establishing Individual Differences Related to Opportunity Alertness and Innovation Dependent on Academic-Career Training." *Journal of Management Development*. Vol. 25, No.1. 28-39.
- Dana, L.P. 2001. "The Education and Training of Entrepreneurship in Asia." *Education and Training*. Vol. 43. No. 8/9. 405-415.
- Deamer, I. and Earle, L. 2004. "Searching for Entrepreneurship." *Industrial and Commercial Training*. Vol. 36, No. 3. 99-103.
- Gibb, A.A. 2000. "In Pursuit of a New Enterprise and Entrepreneurship Paradigm for learning: Creative Destruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combination of Knowledge." *International Journal of Management*. Vol. 11. No. 3. 233-269.
- Henry, C., Hill, F., and Leitch, C. 2005. "Entrepreneurship Education and training: Can Entrepreneurship be Taught? Part I." *Education and Training*. Vol. 47. No. 2. 98-111.
- Idogho, P.O. and B.A. Augustine E. 2011. "Entrepreneurship Education and Small-Scale Business Management Skill Development among Students of Auchi Polytechnic Auchi, Edo State, Nigeria." *International Journal of Business and Management*. Vol. 6, No.3. 284-288.
- Karim, Suhartini. 2007. "Analisis Pengaruh Kewirausahaan Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Pabrik Pengolahan *Crumb Rubber* di Palembang." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol. 5, No. 9. 42-82.
- Keat, O.Y., Christopher S. and Meyer, D. 2011. "Inclination Towards Entrepreneurship among University Students: An Empirical Study of Malaysian University Students." *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2, No. 4. 206-220.
- Kuratko, D.F. 2003. "Entrepreneurship Education: Emerging Trends and Challenges for the 21st Century." *Coleman White Paper Series*. [www.usasbe.org](http://www.usasbe.org).
- Marek, L.I., J.A. Mancini and Donna-Jean, P. B. 2003. *National State Strengthening Program Sustainability Study: Patterns of Early Sustainability*. Blacksburg, VA: Family and Community Research Laboratory Department of Human Development Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Mason, C. 2011. "Entrepreneurship Education and Research: Emerging Trends and Concerns." *Journal of Global Entrepreneurship*. Vol. 1, No. 1. 13-25.
- National Community Service. 2010. *Toolkit for Program Sustainability, Capacity Building, and Volunteer Recruitment Management*. Washington, DC.: NCS Publications.
- Pluye, P. *et.al.* 2005. "Program Sustainability Begins With the First Events." *Evaluation and Program Planning*. Vol. 28. 123-137.
- Uslay, C., Teach, R. D. and Robert, G. S. 2002. "Student Entrepreneurs: A Cross-Cultural Analysis of Attitudinal Differences." *Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship*. Vol. 4, No. 2. 101-118.

## **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

**Dody Hapsoro**

STIE YKPN Yogyakarta

Jalan Seturan, Yogyakarta 55281

Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155

E-mail: dodyhapsoro@gmail.com

### **ABSTRACT**

The research objective is to examine the effect of corporate governance and audit quality on the disclosure of corporate social responsibility (CSR). Corporate governance is proxied with four variables: the proportion of institutional ownership, the board of commissioners size, the proportion of independent commissioners, and the size of the audit committee. Audit quality was proxied with public accounting firms of big four and non-big four. CSR disclosure index measurement is done using content analysis based on the disclosure of check list of seven categories, namely environmental, energy, health and labor safety, labor, etc., products, and general community involvement. This study uses a sample of all companies listed on the Indonesia Stock Exchange with the observation period in 2009. The amount of the data obtained as many as 107. Testing the hypothesis in this study using multiple regression statistical analysis. The study produced some empirical evidence. First, the proportion of institutional ownership has not been proven positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the size of the board proved to be positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the proportion of independent commissioners are not shown to be positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), the

size audit committee proved to be positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR), and quality audit proved to be positive effect on the disclosure of corporate social responsibility (CSR).

**Keywords:** corporate governance, audit quality, the disclosure of corporate social responsibility

JEL classification: G34, M42

### **PENDAHULUAN**

Sejak krisis keuangan melanda Asia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia merupakan negara yang mengalami krisis paling parah dan paling lama dalam proses pemulihannya. Banyak pihak yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama berlarut-larutnya krisis di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan implementasi *Good corporate governance* (GCG). Krisis memberi pelajaran bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang buruk dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masalah *corporate governance* dapat

ditelusuri dari pengembangan teori keagenan yang mencoba menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer dan pemilik perusahaan) dalam berperilaku, karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Teori keagenan mengemukakan jika antara pihak pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (DuCharme *et al.*, 2000). Lemahnya implementasi GCG menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa laba yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis, dan tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders* (Ribstein, 2005). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya keterbukaan perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan, pelaporan kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen, dan ketidakmampuan akuntan dan auditor dalam memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Kajian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yaitu 1) konsentrasi kepemilikan perusahaan; 2) tidak efektifnya fungsi pengawasan; 3) rendahnya transparansi pelaksanaan merger dan akuisisi perusahaan; 4) terlalu tingginya pendanaan eksternal; dan 5) tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor (Pasadilla, 2010). Kebutuhan terhadap pelaksanaan GCG sudah mendesak bagi setiap perusahaan, sehingga menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat perusahaan menerapkan praktik GCG adalah sumber daya yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan digunakan semaksimal untuk kepentingan peningkatan nilai perusahaan. Semua itu dilakukan perusahaan untuk dapat maju dan bersaing secara sehat. Hal ini berarti bahwa GCG tidak saja berakibat positif terhadap pemegang saham, namun juga bagi masyarakat luas yang berupa pertumbuhan

perekonomian nasional.

Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Suherman *et al.*, 2011). Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing terhadap penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan jaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. *Corporate governance* secara umum merupakan seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan dan pilihan manajer dengan kepentingan *stakeholders*, karena pada hakekatnya *corporate governance* merupakan perimbangan yang harmonis antara pemilik dan pengelola perusahaan yang didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu *fairness, transparency, accountability, independency*, dan *responsibility* (Kallunki *et al.*, 2011). *Corporate governance* sebagai konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para investor bahwa akan menerima return terhadap dana yang telah diinvestasikan.

Prinsip-prinsip GCG mengharuskan perusahaan untuk memberi laporan, bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditor, dan pemerintah, tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan (Ho, 2010). Laporan keuangan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberi nilai tambah kepada *stakeholders*.

GCG merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan secara benar, akurat, dan tepat waktu mengenai informasi kinerja perusahaan (Ramanarayanan and Snyder, 2012). Secara internal, penerapan GCG dengan benar dan konsisten akan menciptakan suasana kerja menjadi lebih kondusif karena perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing (direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain). Terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal

perusahaan dan pembagian keputusan dapat menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati, dan bijaksana. Kunci terciptanya GCG dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* (Head, 2011).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Walau menyadari pentingnya GCG, namun banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan dalam menerapkan prinsip tersebut. Banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi ada dibandingkan dengan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (Goshen and Parchomovsky, 2006).

Kondisi yang lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia adalah masih lemahnya pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya penerapan standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, dan proses kepengurusan perusahaan (Joo, 2010). Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan *stakeholders* perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam.

Salah satu prinsip dalam GCG yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah prinsip *responsibility* (Ryngaert and Buchanan, 2011). Prinsip *responsibility* menekankan pada pentingnya keberadaan *stakeholders* perusahaan. *Stakeholders* dapat didefinisi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah karyawan,

pelanggan, konsumen, masyarakat di lingkungan sekitar serta pemerintah selaku regulator.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan tentang *corporate social responsibility* (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya (De Graaf and Stoelhorst, 2010). Dengan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja (Thomson and Jain, 2010). Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*. Dalam *triple bottom lines*, aspek lain yang dinilai selain aspek finansial adalah aspek sosial dan lingkungan, karena aspek keuangan saja tidak cukup menjamin bahwa nilai perusahaan akan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis (De Graaf, 2007). Alasan perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela, di antaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor. Meskipun belum bersifat wajib, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya.

Laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan rujukan bagi para investor dan calon investor dalam memutuskan apakah akan berinvestasi dalam suatu perusahaan atau tidak. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan akan berdampak terhadap pergerakan harga saham yang pada akhirnya juga akan berdampak pada volume saham yang diperdagangkan dan *return* (Bailey et al., 2006). Penelitian ini akan menguji apakah ada pengaruh *corporate governance* (proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit) serta kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

## MATERI DAN METODOLOGI PENELITIAN

*Corporate governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle and Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis pemisahan kepemilikan saham dan pengendalian. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut Cadbury Committee, pengertian *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, *corporate governance* merupakan sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (De Cleyn, 2008).

Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan, pengurangan risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan pada umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2003). Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem pengendalian perusahaan. Tujuan utama perusahaan dalam manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemilik atau pemegang saham (Chi and Lee, 2010). Akan tetapi sebagaimana dalam teori keagenan, perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan

rentan terhadap konflik keagenan. Pihak manajemen sebagai agen mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal ini yang sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan GCG. Menurut Egon Zehnder International (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi serta memberi petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan (Barclift, 2011). Mengingat manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka keberadaan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004), *principles of corporate governance* meliputi 1) menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil; 3) memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan yang diperlukan; dan 5) memantau proses keterbukaan dan keefektifan komunikasi dalam perusahaan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris

independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut 1) komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali pada perusahaan tercatat yang bersangkutan; 2) komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan tercatat yang bersangkutan; 3) komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan; 4) komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan 5) komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam RUPS.

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan secara menyeluruh (Carcello *et al.*, 2011). Sebagai contoh, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. The Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga *non-profit* dan pemerintahan. IIA juga menyatakan bahwa komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Secara teori, laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* seharusnya lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *non-big four*. KAP *big four* diyakini akan memberikan jasa audit yang lebih independen dan transparan dalam

mengungkapkan *misstatement* yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. KAP *big four* akan mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan terbaik yang akan memberikan jasa yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan standar akuntansi serta kode etik yang dimiliki (Lennox, 2004). Kualitas audit selain ditentukan oleh faktor tim audit juga ditentukan oleh pengalaman teknis dan pengalaman dalam industri, respon terhadap kebutuhan klien, dan kemampuan berkomunikasi dengan klien.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakannya. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Haniffa and Cooke, 2005). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

CSR merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan pihak *stakeholders* dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, konsumen, dan lingkungan atau yang disebut dengan *profit, people, dan planet* (3P), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (*planet*). CSR semakin mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha (Heslin and Ochoa, 2008). Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR (Daniri, 2008a). Menurut Utama (2007), perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnyanya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia,

mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim.

Dalam kaitannya dengan CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*, yang terdiri atas aspek finansial, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya (Nurlela dan Islahudin, 2008).

Menurut Haigh and Jones (2006), faktor yang mempengaruhi implementasi dan pengungkapan CSR adalah *internal pressures on business managers, pressures from business competitors, investors and consumers*, serta *regulatory pressures coming from governments and non-governmental organizations*. CSR pada kenyataannya masih dianggap hal sepele dan dijalankan dengan setengah hati (Daniri, 2008b). CSR dijalankan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan tentang standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR, di antaranya adalah untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan and Blomquist, 2001 serta Sayekti dan Wondabio, 2007). Penerapan CSR diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan perusahaan yang tidak hanya didasarkan pada faktor keuangan, tetapi juga memasukkan faktor sosial dan lingkungan yang dalam jangka panjang akan berdampak kepada masyarakat

dan lingkungan di sekitar perusahaan. Faktor-faktor *corporate governance* juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kualitas auditor eksternal, dan struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Haniffa and Cooke, 2005; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006; Sayekti dan Wondabio, 2007).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberi informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta GCG semakin memaksa perusahaan untuk memberi informasi mengenai aktivitas sosialnya. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun (Koh, 2003). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktik dan pengungkapan CSR. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah keefektifan pengawasan. Komposisi dewan komisaris independen juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah keagenan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

**H<sub>3</sub>:** Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Komite audit beranggotakan komisaris independen dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org)). Komite audit harus terdiri atas individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Menurut Barnea and Rubin (2005), CSR berkaitan dengan GCG. Hubungan antara CSR dan mekanisme GCG ditemukan di perusahaan yang memiliki etika dan moral. GCG selalu seiring dengan CSR, karena keduanya merupakan bagian dari perilaku etis perusahaan. GCG ditandai dengan adanya proporsi komisaris independen dan komite audit. Proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit akan meningkatkan rating CSR. Oleh karena itu, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dapat meningkatkan rating CSR. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Laporan keuangan tahunan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik dapat menjadi dasar yang berguna bagi pengambilan keputusan yang ekonomis. Auditor memainkan peran yang penting dalam meningkatkan strategi pelaporan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi, dan kredibilitas dibanding KAP ukuran kecil. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:** Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria 1) perusahaan menerbitkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2009 dan mempunyai data keuangan lengkap sesuai data yang diperlukan dalam penelitian dan 2) perusahaan mengungkapkan laporan CSR dalam laporan tahunan untuk periode akuntansi tahun 2009 yang dapat diakses melalui *website* BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel independen adalah proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, produk, serta keterlibatan masyarakat dan umum.

*Content analysis* digunakan untuk mengukur pengungkapan *corporate social responsibility*. *Content analysis* adalah suatu metode pengkodefikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kelompok tergantung pada kriteria yang ditentukan (Weber dalam Sembiring 2003). *Check list* dilakukan dengan melihat pengungkapan CSR yang mencakup tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Rumus perhitungan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRDI<sub>j</sub> : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j.

n<sub>j</sub> : Jumlah *item* pengungkapan untuk perusahaan j.

X<sub>ij</sub> : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian,  $0 < CSRDI_j < 1$

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas 1) Proporsi Kepemilikan Institusional (INST) yang diukur dengan cara membagi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi diperoleh dari catatan atas laporan keuangan perusahaan; 2) Ukuran Dewan Komisaris (DKOM) yang diukur dari banyaknya jumlah total anggota dewan komisaris yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan; 3) Proporsi Komisaris Independen (KIND) yang diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen dari jumlah total anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan; 4) Ukuran Komite Audit (UKAD) sebagai komite yang diwajibkan dibentuk dalam pedoman *corporate governance*. Pada umumnya komite audit terdiri atas tiga sampai dengan lima orang anggota, yang diambil dari dewan komisaris bukan dewan direksi agar obyektivitasnya dapat terjaga. Pengukuran variabel diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan; dan 5) Kualitas Audit (KUAD) yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big four* dan kantor akuntan *non-big four*. Diasumsikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *big four* lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *non-big four*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu 0 apabila auditor berasal dari kantor akuntan *non-big four* dan 1 apabila auditor berasal dari kantor akuntan *big four*.

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif dan analisis statistik. Kedua teknik

ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Analisis statistik meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dan uji hipotesis. Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu ( $\epsilon$ ) atau *disturbance's error*.

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSRDI = \beta_0 + \beta_1INST + \beta_2DKOM + \beta_3KIND + \beta_4UKAD + \beta_5KUAD + \epsilon$$

Keterangan:

CSRDI: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

INST : Proporsi kepemilikan institusional

DKOM : Ukuran dewan komisaris

KIND : Proporsi komisaris independen

UKAD : Ukuran komite audit

KUAD : Kualitas audit

$\beta_0$  : *Intercept*

$\beta_1, \dots, \beta_5$  : Koefisien regresi

$\epsilon$  : *Error term*

Kerangka penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1**  
**Kerangka Penelitian**

**HASIL PENELITIAN**

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 berjumlah 217 perusahaan. Tabel 1 berikut ini menggambarkan prosedur pemilihan sampel penelitian.

**Tabel 1**  
**Prosedur Pemilihan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009	217
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR pada tahun 2009	(80)
<i>Outliers</i>	(30)
Jumlah sampel akhir	107

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan 72 item pengungkapan informasi CSR. Item pengungkapan dikelompokkan ke dalam tujuh pengungkapan yang ditunjukkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Item Pengungkapan**  
**Corporate Social Responsibility (CSR)**

No.	Keterangan	Jumlah Item CSR
1	Lingkungan	13
2	Energi	7
3	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja	8
4	Lain-lain Tenaga Kerja	23
5	Produk	10
6	Keterlibatan Masyarakat	9
7	Umum	2
	Jumlah	72

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 107 perusahaan. Variabel pertama yaitu indeks CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,014 atau 1,4%, nilai maksimum sebesar 0,194 atau 19,4%, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0674 atau 6,74%, serta nilai standar deviasi sebesar 0,04042 atau 4,042%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CSR yang diungkapkan oleh perusahaan yang menjadi sampel rata-rata adalah kecil. Variabel kedua yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,000 atau 0%, nilai maksimum sebesar 1,00 atau 100%, dengan

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Indeks CSR	107	.014	.194	.06736	.040415
INST	107	.0000	1.0000	.678382	.2319742
DKOM	107	2	11	4.08	1.591
KIND	107	.170	1.000	.44225	.141298
UKAD	107	2	6	3.14	.679
KUAD	107	0	1	.38	.488
Valid N ( <i>listwise</i> )	107				

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6784 atau 67,84%, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2320 atau 23,20%, yang berarti bahwa kepemilikan institusional cukup besar. Variabel ketiga yaitu ukuran dewan komisaris. Kebanyakan perusahaan memiliki 3 orang anggota dewan komisaris yaitu 40 perusahaan (37,38%) dan hanya 1 perusahaan (0,94%) yang memiliki 11 orang anggota dewan komisaris. Komposisi sampel berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris adalah seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Komposisi Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Jumlah Anggota	Jumlah Perusahaan	Persentase
2 orang	9	8,41%
3 orang	40	37,38%
4 orang	23	21,49%
5 orang	18	16,82%
6 orang	11	10,28%
7 orang	1	0,94%
8 orang	3	2,80%
9 orang	1	0,94%
11 orang	1	0,94%
Jumlah	107	100%

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Variabel keempat yaitu proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,170 atau 17%, nilai maksimum sebesar 1,000 atau 100%, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4423 atau 44,23%, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1413 atau 14,13%, yang berarti bahwa proporsi komisaris independen adalah cukup besar. Variabel kelima yaitu ukuran komite audit. Kebanyakan perusahaan memiliki 3 orang komite audit, yaitu 79 perusahaan (73,83%) dan hanya 1 perusahaan (0,94%) yang memiliki 6 orang komite audit. Komposisi sampel berdasarkan jumlah komite audit ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Komposisi Jumlah Komite Audit**

Jumlah Anggota	Jumlah Perusahaan	Persentase
2 orang	10	9,35%
3 orang	79	73,83%
4 orang	12	11,21%
5 orang	5	4,67%
6 orang	1	0,94%
Jumlah	107	100%

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Variabel keenam yaitu kualitas audit. Perusahaan yang menggunakan KAP *non-big four* sebanyak 66 (61,68%), sedangkan yang menggunakan KAP *big four* sebanyak 41 (38,32%). Komposisi sampel berdasarkan kualitas audit tampak dalam tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Komposisi Perusahaan Berdasarkan KAP**

KAP	Jumlah Perusahaan	Persentase
<i>Big Four</i>	41	38,32%
<i>Non-Big Four</i>	66	61,68%
Jumlah	107	100%

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari nilai VIF dan nilai *tolerance*. Berdasarkan tabel *coefficients* pada output regresi terlihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel adalah:

**Tabel 7**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
INST	0,914	1,094
DKOM	0,886	1,129
KIND	0,935	1,070
UKAD	0,852	1,173
KUAD	0,812	1,231

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 7, nampak semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* di bawah 0,10, yang berarti tidak ada korelasi di antara variabel independen. Selain itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di atas 10. Oleh karena itu, model regresi terbebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot dan uji Glejser. Untuk menjamin keakuratan hasil, diperlukan uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik *scatterplot* yang diperoleh setelah data diolah melalui SPSS, diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Untuk lebih menjamin keakuratan hasil, maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji Glejser didapat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut *Ut* (*AbsUt*) dan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji normalitas yang kedua menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,030 dan signifikan pada 0,05. Nilai  $p = 0,239 >$  dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Goodness of fit test*. Secara statistik dapat diukur nilai *statistic* F, nilai *statistic* t dan koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Pengujian hipotesis ditunjukkan dengan menggunakan uji t dan uji F. Uji F pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F diturunkan dari Tabel ANOVA (*analysis of variance*).

**Tabel 8**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Keterangan	Ukuran	Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02880878
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		1.030
Asymp. Sig. (2-tailed)		.239

a. Test distribution is Normal.

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

**Tabel 9**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.085	5	.017	19.555	.000 <sup>a</sup>
	Residual Total	.088.173	101106	.001		

a. Predictors: (Constant), KUAD, KIND, INST, DKOM, UKAD

b. Dependent Variable: Indeks CSR

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  adalah sebesar 19,555 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai  $F_{tabel}$  dengan df pembilang 5 dan dk penyebut 101,  $\alpha = 5\%$  adalah 2,29. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $19,555 > 2,29$  dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* diterima.

Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut di antara lima variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Uji t-statistik dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5%. Nilai  $t_{hitung}$  dengan df = 106

adalah 1,658. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

Berdasarkan analisis SPSS, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,260 berada dalam taraf signifikansi 0,795 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Di samping itu, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,756 adalah berada pada taraf signifikansi 0,000 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel proporsi komisaris independen (KIND) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,802. Dengan demikian, tampak bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan karena nilai t dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap

**Tabel 10**  
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	-				
(Constant)	.034	.020		-1.726	.087
INST	.003	.013	.019	.260	.795
DKOM	.009	.002	.058	4.756	.000
KIND	.017	.021	.059	.802	.424
UKAD	.014	.005	.228	2.965	.004
KUAD	.032	.007	.385	4.886	.000

a. Dependent Variable: Indeks CSR

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

pengungkapan *corporate social responsibility*. Di samping itu nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,802 adalah berada dalam taraf signifikansi 0,424 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Variabel ukuran komite audit (UKAD) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2,965. Dengan demikian tampak bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan karena nilai  $t$  dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel ukuran komite audit (UKAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Di samping itu, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,965 berada dalam taraf signifikansi 0,004 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel kualitas audit (KUAD) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4,886. Dengan demikian, tampak bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan karena nilai  $t$  dinyatakan dalam tanda positif, maka dapat dikatakan variabel kualitas audit (KUAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Di samping itu nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,886 berada dalam taraf signifikansi 0,000 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) secara keseluruhan, yaitu: Hasil pengujian menunjukkan  $R^2$  sebesar 0,492 atau 49,2%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 49,2% besarnya pengungkapan *corporate social responsibility* disebabkan oleh variabel proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan

komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kualitas audit. Sedangkan 50,8% besarnya pengungkapan *corporate social responsibility* disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Gambaran tentang praktik pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dijelaskan dari hasil uji *descriptive statistics*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara rata-rata tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* hanya sebesar 0,0674 atau 6,74% saja dari total pengungkapan. Dengan kata lain disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia masih sangat rendah. Dalam pengujian secara simultan, tingkat pengaruh variabel independen (INST, DKOM, KIND, UKAD dan KUAD) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (INDEKS) ditemukan sebesar 46,7% ( $Adjusted R^2 = 0,467$ ). Hal ini berarti bahwa secara simultan proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan kualitas audit mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 46,7%. Sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Apabila dilihat dari signifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai  $F$  sebesar 19,555 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000

Dalam pengujian parsial, lima variabel yaitu proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran

**Tabel 11**  
**Model Summary**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.467	.029513

a. *Predictors:* (Constant), KUAD, KIND, INST, DKOM, UKAD

b. *Dependent Variable:* Indeks CSR

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9 diketahui bahwa variabel proporsi kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,795 (79,5%) yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat diterima ( $H_1$  ditolak).

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi 0,000 (0%) yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal tersebut menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima ( $H_2$  diterima). Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Sembiring (2003) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,424 (42,4%) yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* tidak dapat diterima ( $H_3$  ditolak). Hasil penelitian bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya keberadaan komisaris independen mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *corporate governance* yang mengharuskan perusahaan untuk memberi informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Variabel ukuran komite audit memiliki nilai signifikansi 0,004 (0,4%) yang berarti berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima ( $H_4$  diterima). Hasil penelitian sesuai dengan teori dasarnya, yaitu keberadaan komite audit mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *corporate governance* yang menekankan perusahaan untuk memberi informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan keuangan.

Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi 0,000 (0%) yang berarti berada di bawah taraf

signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dapat diterima ( $H_5$  diterima). Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian Subroto (2002) yang menemukan bahwa variabel kualitas KAP berpengaruh positif terhadap variasi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) praktik pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dapat dikatakan sangat rendah karena tingkat pengungkapan rata-rata hanya sebesar 6,74% dari total pengungkapan yang seharusnya; 2) secara simultan, variabel proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*; 3) secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen adalah i) proporsi kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusional yang terdiri atas perusahaan perbankan, asuransi, dan dana pensiun di Indonesia belum mempertimbangkan CSR sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusional cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara rinci dalam laporan tahunan perusahaan; ii) ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR); iii) proporsi komisaris independen tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini mencerminkan bahwa komisaris independen belum efektif dalam menjalankan aktivitas pengawasan, khususnya dalam menentukan kebijakan untuk melakukan aktivitas CSR; iv) ukuran komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR); dan v) kualitas audit terbukti berpengaruh positif

terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

### Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak membedakan jenis industri perusahaan yang mungkin saja dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan, penilaian indeks CSRDI berkisar antara 0 dan 1, sehingga penelitian ini tidak memberi rincian informasi tentang kualitas pengungkapan yang disajikan oleh masing-masing perusahaan, terdapat unsur subyektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan, karena tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar dan acuan, sehingga penentuan indeks dapat berbeda antarpeleliti. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberi kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya dan menambah atau menggunakan variabel lain untuk menemukan suatu model standar pengungkapan CSR.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Bailey, Warren, G. Andrew Karolyi, and Carolina Salva. 2006. "The Economic Consequences of Increased Disclosure: Evidence from International Cross-listings". *Journal of Financial Economics* forthcoming.
- Barclift, Z. Jill. 2011. "Corporate Governance and CEO Dominance". *Washburn Law Journal*, Vol. 50: 611.
- Barnea, Amir and Amir Rubin. 2005. "Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders". SSRN.
- Carcello, Joseph V., Terry L. Neal, Zoe-Vonna Palmrose, and Susan Scholz. 2011. "CEO Involvement in Selecting Board Members, Audit Committee Effectiveness, and Restatements". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 28.
- Chi, Jianxin Daniel and D. Scott Lee. 2010. "The Conditional Nature of the Value of Corporate Governance". *Journal of Banking and Finance*, Vol. 34, No. 2: 350-361.
- Daniri, Mas Achmad. 2008a. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag I)". [www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-i/](http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-i/).
- \_\_\_\_\_. 2008b. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag II)". [www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-ii/](http://www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-ii/).
- De Cleyn, Sven H. 2008. "Compliance of Companies with Corporate Governance Codes: Case Study on Listed Belgian SMEs"? *Journal of Business Systems, Governance and Ethics*, Vol 3, No 1.
- Deegan, C. and C. Blomquist. 2001. "Stakeholders Influence on Corporate Reporting: an Exploration of the Interaction between the World Wide Fund for Nature and the Australian Minerals Industry". *Paper Presented at the Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Adelaide*.
- De Graaf, Frank Jan. 2007. "How Corporate Social Performance is Institutionalised within the Governance Structure: The Dutch Corporate Governance Model". *Journal of Business Ethics*, Vol. 74: 177-189.
- De Graaf, Frank Jan and J. W. Stoelhorst. 2010. "The Role of Governance in Corporate Social Responsibility: Lessons from Dutch Finance". *Business & Society*.

- DuCharme, L.L., P.H. Malatesta, and S.E. Sefcik. 2000. "Earnings Management: IPO Valuation and Subsequent Performance". *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol.16: 369-296.
- Ghozali, Imam. 2005. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goshen, Zohar and Gideon Parchomovsky. 2006. "The Essential Role of Securities Regulation". *Duke Law Journal*, Vol. 55: 711.
- Haigh, Matthew and Marc T. Jones. 2006. "*The Drivers of Corporate Social Responsibility: A Critical Review*". www.ashridge.org.uk.
- Haniffa, R.M. and T.E. Cooke. 2005. "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24: 391-430.
- Head, John W. 2011. "Lessons from the Asian Financial Crisis: The Role of the IMF and the United States". *Kansas Journal of Law & Public Policy*.
- Heslin, Jenna D. Ochoa. 2008. "Understanding and Developing Strategic Corporate Social Responsibility"? *Organizational Dynamics*, Vol. 37:125-144.
- Ho, Virginia E. Harper. 2010. "Enlightened Shareholder Value: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide". *Journal of Corporation Law*, Vol. 36, No. 1.
- Joo, Thomas Wuil. 2010. "Global Warming and the Management-Centered Corporation". *Wake Forest Law Review*, Vol. 44, No. 3:671.
- Kallunki, Juha-Pekka, Henrik Nilsson and Mikko P. Zerni. 2011. "*The Entrenchment Problem, Corporate Governance Mechanisms and Firm Value*". *Contemporary Accounting Research*, Forthcoming.
- Koh, P. 2003. "On the Association between Institutional Ownership and Aggressive Corporate Earnings Management in Australia". *The British Accounting Review* 35.
- Lennox, Clive S. 2004. "Audit Quality and Executive Officers' Affiliations with CPA Firms". *Journal of Accounting & Economics*, Vol. 37, No. 2.
- Nurlela, Rika dan Islahudin. 2008. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Persentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating". *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- OECD. 2004. "OECD Principles of Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia 2001". *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke"2. Jakarta.
- Pasadilla, Gloria O. 2010. "Financial Crisis, Trade Finance, and SMEs: Case of Central Asia". *ADB Working Papers 187*. Asian Development Bank Institute.
- Ribstein, Larry E. 2005. "Accountability and Responsibility in Corporate Governance". PERC-Property and Environment Research Center. *Research Paper Series, Forthcoming*.
- Ramanarayanan, Subbu and Jason Snyder. 2012. "Information Disclosure and Firm Performance: Evidence from the Dialysis Industry". *Working Papers Series 2012*.
- Ryngaert, Cedric and Holly Buchanan. 2011. "Member State Responsibility for the Acts of International Organizations". *Utrecht Law Review*, Vol. 7, No. 1:131-146.
- Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2007. "Pengaruh *CSR Disclosure* Terhadap *Earning Response Coefficient* (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". Makalah disampaikan pada Simposium

Nasional Akuntansi IX.

Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. "Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI.

..... 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII.

Subroto, P.H. 2002. *A Correlational Study of Corporate Social Responsibility and Financial Performance an Empirical Survey Toward Ethical Business Practice in Indonesia*. Dissertation Capella University.

Suherman, Wulan Rahma dan Agung Dharmawan Buchdadi. 2011. "Firm Performance, Corporate Governance, and Executive Compensation in Financial Firms: Evidence from Indonesia". *Working Paper Series*.

Thomson, Dianne and Ameeta Jain. 2010. "Corporate Social Responsibility Reporting: A Business Strategy by Australian Banks"? *Corporate Ownership & Control*, Vol. 7, No. 4.

Tjager. 2003. "*Good Corporate Governance di Indonesia*". Jakarta: *Forum for Good Corporate Governance in Indonesia* (FCGI).

Utama, Sidharta. 2007. "Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia". [www.ui.edu](http://www.ui.edu).

## **PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN ASPEK-ASPEK SUPERVISI TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL**

**Christina Sososutiksno**

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura  
Jalan Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon  
Telepon +62 911 322626, 322628, Fax. +62 911 322626, 322627  
E-mail: *chr\_sososutiksno@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

This study examined the emergence factors of dysfunctional behaviors which mirror from behavior of premature sign-off, under-reporting of time, and audit quality reduction behavior. The respondents are junior auditors at audit firms, Java Island. The sampling method used is purposive sampling. In total 500 questionnaires were distributed, 106 can be used in analysis, for response rate of 31 percent. Using multiple regression of SPSS Program, the result of this study indicates that time budget pressure has positive influence to behavior of premature sign-off, under-reporting of time, and audit quality reduction behavior; leadership style structuring has negative influence to behavior of under-reporting of time; leadership style considering has positive influence to behavior of premature sign-off and audit quality reduction behavior; leadership and mentoring aspects of supervision do not have influence to behavior of premature sign-off, under-reporting of time, and audit quality reduction behavior; working conditions aspects of supervision has positive influence to behavior of under-reporting of time; and work assignment aspects of supervision do not have influence to behavior of premature sign-off, under-reporting of time and audit quality reduction behavior.

**Keywords:** dysfunctional behaviour, time budget pressure, leadership style, audit firms

JEL classification: M42, O15

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks lingkungan kerja audit, seorang auditor akan melakukan perilaku disfungsiional jika auditor yakin bahwa dengan melakukan perilaku itu auditor dapat memenuhi anggaran waktu dan tuntutan klien. Sebaliknya, seorang auditor akan memberi sikap negatif terhadap perilaku disfungsiional ketika yakin bahwa perilaku itu tidak etis dan dapat mengarah pada menurunnya kualitas audit atau kinerja kerja audit yang lebih rendah (Herrbach, 2005).

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang saling bertentangan dari variabel-variabel yang menjelaskan munculnya perilaku disfungsiional seperti variabel gaya kepemimpinan yang ditemukan signifikan untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang mengurangi kualitas audit (Liyarachchi and McNamara, 2007) namun tidak signifikan pada penelitian lain (Kelley and Margheim, 2002). Selain itu, ditemukan berbagai faktor yang dapat mendorong munculnya perilaku disfungsiional auditor namun beberapa faktor tidak berhasil mengukur munculnya perilaku disfungsiional. Secara keseluruhan tidak terdapat bukti empiris yang konsisten yang menunjukkan bahwa variabel selain tekanan anggaran waktu (gaya kepemimpinan dan tipe

personalitas) signifikan menjelaskan perilaku disfungsional (Pierce and Sweeney, 2004).

Masalah penelitian dirumuskan, yaitu bagaimanakah faktor-faktor dalam lingkungan kerja audit dapat mendorong seorang auditor melakukan perilaku disfungsional. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor-faktor dalam lingkungan kerja audit yang dapat mendorong munculnya perilaku disfungsional auditor. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kelley and Margheim (2002), Liyanarachchi and McNamara (2007) dengan menambah variabel aspek-aspek supervisi sebagai faktor lingkungan audit dan dasar teori yang digunakan berdasar pada *theory of planned behavior* (Ajzen, 2005).

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Kelley dan Margheim (2002) membuktikan bahwa auditor staf akan lebih merasa tertekan apabila auditor senior berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran audit. Tekanan anggaran waktu merupakan satu tipe tekanan yang menunjukkan potensial mengurangi lingkungan pengendalian auditor (Sweeney and Pierce, 2004). Tekanan anggaran waktu berhubungan dengan kendala waktu yang muncul atau mungkin ada dalam penugasan yang berasal dari adanya keterbatasan sumber daya (waktu) yang dapat dialokasikan untuk melakukan tugas-tugas audit. Sososutikno (2005) mengemukakan bahwa tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran yang sangat ketat dan kaku. Anggaran waktu secara potensial menghasilkan tekanan karena tindakan ini bukan saja sebagai mekanisme pengendalian namun juga merupakan alat pengukuran kinerja dalam kantor audit (Kelley and Margheim, 2002). Berdasar hal ini maka diusulkan hipotesis:

**H1.** Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku *premature sign-off*.

Shapeero *et al.*, (2003) mengemukakan bahwa anggaran waktu yang tidak realistis menjadi salah satu alasan yang mendasari seorang akuntan melebihi anggaran waktu dan anggaran waktu yang sering berdasar pada jumlah waktu yang dilaporkan pada pekerjaan audit tahun lalu, menyebabkan dihasilkannya *under-reporting of time* (URT) dalam anggaran waktu

yang rendah secara tidak realistis. Sebaliknya, anggaran waktu yang tidak realistis akan mengarah pada perilaku URT yang berlanjut, penugasan yang tidak sempurna karena berdasar pada ketepatan waktu, dan kurangnya personel yang tersedia (Shapeero *et al.*, 2003). Berdasar hal ini diusulkan hipotesis:

**H2.** Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku *under-reporting of time*.

Kelley and Margheim (2002) menemukan bukti bahwa perilaku seperti menerima penjelasan klien yang lemah, melakukan *review* yang dangkal terhadap dokumen-dokumen, gagal meneliti prinsip akuntansi, dan mengurangi pekerjaan di bawah standar yang dianggap masuk akal merupakan 4 (empat) tipe khusus perilaku *audit quality reduction* (AQR). Perilaku-perilaku ini terjadi dalam *setting* Amerika, di mana persentase terjadinya berkisar antara 26% hingga 34%. Berdasar hal ini maka diusulkan hipotesis:

**H3.** Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

Liyanarachchi and McNamara (2007) menemukan bahwa tingkat *consideration* yang tinggi dalam gaya kepemimpinan manajer akan berhubungan dengan tingkat perilaku disfungsional yang rendah, tingkat struktur yang tinggi dalam gaya kepemimpinan manajer akan berhubungan dengan tingkat perilaku disfungsional yang tinggi, tingkat komitmen organisasional yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat perilaku disfungsional yang rendah (perilaku *premature sign-off* atau PMSO dan AQRB). Namun demikian, partisipasi atasan tidak akan efektif dalam mengurangi perilaku disfungsional jika atasan tidak memperoleh kepercayaan dari bawahan (Choi *et al.*, 2004). Artinya, tingkat struktur yang tinggi dalam gaya kepemimpinan akan mengurangi perilaku disfungsional jika ada kepercayaan antara bawahan dan atasan. Berdasar hal ini diusulkan bahwa:

**H4a.** Gaya kepemimpinan yang terstruktur berpengaruh negatif terhadap perilaku *premature sign-off*.

**H4b.** Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan berpengaruh positif terhadap perilaku *premature sign-off*.

Liyanarachchi and McNamara (2007) membuktikan bahwa tingkat persetujuan manajer yang tinggi untuk melakukan URT berhubungan dengan tingkat URT yang tinggi. Namun, bawahan yang lebih berpengalaman tidak menyukai gaya kepemimpinan

yang mengarahkan, mengklarifikasi sasaran kinerja dan menjelaskan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut karena gaya kepemimpinan seperti ini dianggap terlalu banyak pengendalian yang diberikan oleh atasan (Miller *et al.*, 2006). Berdasar ini maka diusulkan hipotesis:

**H4c.** Gaya kepemimpinan yang terstruktur berpengaruh negatif terhadap perilaku *under reporting of time*.

**H4d.** Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan berpengaruh positif terhadap perilaku *under reporting of time*.

Auditor junior mengalami tingkat stres dan ketegangan yang tinggi dibandingkan manajer dan partner. Stres dan ketegangan ini mempengaruhi kepuasan kerja yang merupakan akibat mereka merasa kurang dibutuhkan, kurang diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan peran mereka dalam organisasi, ketidakpastian akan masa depan dan rasa bosan (Hadi, 2007). Shapeero *et al.*, (2003) mengungkapkan bahwa akuntan yang menerima kemungkinan reward lebih besar akan lebih mungkin untuk *underreport*. Berdasar hal ini maka diusulkan hipotesis:

**H4e.** Gaya kepemimpinan yang terstruktur berpengaruh negatif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

**H4f.** Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan berpengaruh positif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

Kelley and Margheim (2002) menunjukkan bahwa 31% auditor berpersepsi bahwa *premature sign off* telah terjadi dan merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan waktu, dan auditor tidak menanyakan representasi klien. Praktik ini sering terjadi pada tahap *review*, uji klien, dan banyak dilakukan pada level *partner*. Dalam kondisi seperti ini individu tidak dipandang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui upaya mereka sendiri. Berdasar ini diusulkan hipotesis:

**H5a.** Aspek-aspek supervisi berupa kepemimpinan dan mentoring berpengaruh positif terhadap perilaku *premature sign off*.

**H5b.** Aspek-aspek supervisi berupa kondisi kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *premature sign off*.

**H5c.** Aspek-aspek supervisi berupa penugasan kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *premature*

*sign off*.

Shapeero *et al.*, (2003) menemukan bahwa 53% responden menyatakan permintaan superior secara implisit lebih sering dihadapi dan efektif mendorong perilaku URT, dan akuntan yang melakukan URT memiliki harapan tinggi bahwa URT akan memberikan *reward* eksternal dibandingkan yang tidak melakukan URT. *Reward* eksternal ini seperti evaluasi kinerja yang lebih baik dan promosi. Berdasar hal ini diusulkan hipotesis:

**H5d.** Aspek-aspek supervisi berupa kepemimpinan dan mentoring berpengaruh positif terhadap perilaku *under-reporting of time*.

**H5e.** Aspek-aspek supervisi berupa kondisi kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *under-reporting of time*.

**H5f.** Aspek-aspek supervisi berupa penugasan kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *under-reporting of time*.

Kelley and Margheim (2002) mengungkapkan bahwa perilaku yang mengurangi kualitas audit berhubungan secara langsung dengan persepsi staf tentang kesulitan anggaran dan berhubungan secara tidak langsung dengan struktur auditor senior mereka. Berdasar hal ini diusulkan hipotesis:

**H5g.** Aspek-aspek supervisi berupa kepemimpinan dan mentoring berpengaruh positif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

**H5h.** Aspek-aspek supervisi berupa kondisi kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

**H5i.** Aspek-aspek supervisi berupa penugasan kerja berpengaruh positif terhadap perilaku *audit quality reduction*.

Obyek penelitian ini adalah auditor junior yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Pulau Jawa karena sebaran KAP sebagian besar di Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan dikumpulkan melalui metode survei yaitu survei pos dan *contact person*. Penyebaran kuesioner dilakukan antara pertengahan Maret sampai dengan akhir Agustus 2011. Berdasar data 500 kuesioner yang disebar pada beberapa KAP di Pulau Jawa sebanyak 155 kuesioner yang dikembalikan sehingga *respon rate* dalam penelitian ini adalah 31%. Data kuesioner yang dapat dianalisis hanya 106 karena 49 kuesioner tidak lengkap. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel tekanan anggaran waktu diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Kelley and Margheim (2002). Variabel gaya kepemimpinan diukur dengan menggunakan 20 (duapuluh) item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian Kelley and Margheim (2002).. Instrumen ini mengindikasikan 10 (sepuluh) item berhubungan dengan *structure* (GKS) dan 10 (sepuluh) item berhubungan dengan *consideration* (GKC).

**Tabel 1**  
**Profil Responden**

Demografik	Jumlah Dan Proporsi (%)
Jumlah Responden	106
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	81(76,4%)
Perempuan	25(23,6%)
Usia	
21-25 tahun	57(53,8%)
26-30 tahun	32(30,2%)
31-35 tahun	17(16%)
Pendidikan Tertinggi	
DIII	-
S1	98(92,5%)
S2	8(7,5%)
Masa Kerja	
< 2 tahun	34(32%)
2 – 5 tahun	59 (55,7%)
5 – 10 tahun	13(12,3%)
>10 tahun	-

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Aspek-aspek supervisi ditentukan dengan mengukur 3 (tiga) aspek supervisi yang berdasar pada rekomendasi AECC yang juga digunakan oleh Hadi (2007) yaitu 1) aspek kepemimpinan dan mentoring (ASKP) terdiri dari 9 (sembilan) item; 2) aspek kondisi kerja (ASKK) terdiri dari 7 (tujuh) item; dan 3) aspek

penugasan (ASPK) terdiri dari 6 (enam) item. Prosedur audit yang digunakan sebagai alat ukur untuk menguji terjadinya *premature sign off* meliputi prosedur perencanaan audit dan prosedur pekerjaan lapangan yang terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan. Prosedur perencanaan audit dan prosedur pekerjaan lapangan meliputi pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No. 5, 2001), pertimbangan pengendalian internal (PSA No. 69, 2001), internal auditor klien (PSA No. 33, 2001), informasi asersi manajemen (PSA No. 7, 2001), prosedur analitik (PSA No. 22, 2001), konfirmasi (PSA No. 7, 2001), representasi manajemen (PSA No. 17, 2001), pengujian pengendalian teknik berbantuan komputer (PSA No. 59, 2001), sampling audit (PSA No. 26, 2001), dan perhitungan fisik (PSA No. 7, 2001). Pertanyaan-pertanyaan untuk variabel PMSO mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sososutiksno (2005). *Under reporting of time* (URT) diukur dengan instrumen dalam penelitian Liyanarachchi and McNamara (2007) yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan. *Audit quality reduction behaviour* (AQRB) diukur dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian Liyanarachchi and McNamara (2007). Untuk analisis data digunakan model regresi berganda dengan dibantu oleh program SPSS versi 16.0. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan konstruk-konstruk dari variabel penelitian cukup andal dan sah untuk digunakan dalam analisis yaitu *factor loading* yang rata-rata lebih besar dari 0,30 dan koefisien alpha yang lebih besar dari 0,50. Hasil lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan uji normalitas dengan teknik *kolmogorov-Smirnov test* dapat dilihat pada Tabel 3. Variabel tekanan anggaran waktu dan aspek supervisi penugasan kerja telah ditransformasi datanya karena tidak terdistribusi secara normal.

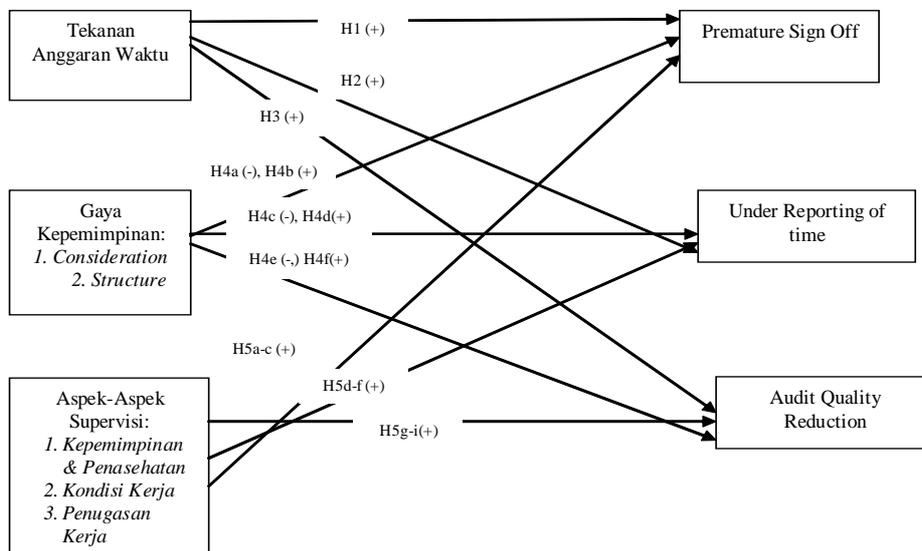
Transformasi data dilakukan dengan menggunakan akar kuadrat atau SQRT karena bentuk grafik histogram *moderate positive skewness*. Setelah uji normalitas data kembali dilakukan maka hasilnya menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Hasil

uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil uji multikolonieritas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi.

**Tabel 2**  
**Hasil Validitas dan Reliabilitas**

No.	Nama Variabel	Loading factor	Cronbach's Alpha
1	Tekanan anggaran waktu (TAW)	0,732-0,888	0,782
2	Gaya kepemimpinan terstruktur (GKS)	0,617-0,848	0,785
3	Gaya kepemimpinan mempertimbangkan (GKC)	0,543-0,880	0,747
4	Aspek supervisi kepemimpinan dan mentoring (ASKP)	0,452-0,855	0,798
5	Aspek supervisi kondisi kerja (ASKK)	0,519-0,876	0,801
6	Aspek supervisi penugasan kerja(ASPK)	0,480-0,834	0,752
7	Premature sign-off (PMSO)	0,657-0,873	0,914
8	Under-reporting of Time (URT)	0,757-0,854	0,880
9	Audit quality reduction behaviour (AQRB)	0,807-0,897	0,883

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi
SQ-TAW	1,332	0,058
GKS	1,114	0,167
GKC	1,175	0,126
ASKP	1,101	0,177
ASKK	1,303	0,067
SQ-ASPK	1,248	0,089
PMSO	1,319	0,062
URT	1,313	0,064
AQRB	1,340	0,055

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
TAW	0,913	1,095
GKS	0,693	1,442
GKC	0,727	1,376
ASKP	0,733	1,363
ASKK	0,811	1,232
ASPK	0,791	1,264

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson yang menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson pada variabel dependen PMSO sebesar 1,859

dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n)=106, jumlah variabel independen (k)=6 dan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai  $d_l = 1,421$  dan nilai  $d_u = 1,670$ . Karena nilai DW 1,859 berada lebih besar dari batas atas ( $d_u$ ) 1,670 dan kurang dari  $6 - 1,670$  ( $6 - d_u$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan untuk variabel dependen URT dan AQRB masing-masing nilai DW sebesar 1,008 dan 1,551 adalah berada di bawah  $d_u$  (1,670) yang berarti terdapat autokorelasi positif. Untuk mengatasi gangguan autokorelasi ini dilakukan Lag variabel untuk variabel URT dan AQRB dan dilakukan perhitungan regresi kembali dengan menambahkan variabel Lag sebagai variabel bebas maka hasilnya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Hasil lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Variabel Dependen	Nilai	
	Durbin-Watson	Keterangan
PMSO	1,859	Tidak terdapat autokorelasi
URT	2,292	Tidak terdapat autokorelasi
AQRB	1,924	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil uji glejser pada masing-masing variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser**

Variabel	TAW		GKS		GKC		ASKP		ASKK		ASPK	
	t	Sign.	t	Sign.	t	Sign.	t	Sign.	t	Sign.	t	Sign.
ABS_Res 1	-2,175	0,032	-0,769	0,443	-0,137	0,891	2,358	0,020	0,516	0,607	-1,197	0,234
ABS_Res 2	-0,647	0,519	0,147	0,883	1,544	0,126	1,296	0,198	0,518	0,605	0,342	0,733
ABS_Res 3	-0,739	0,461	1,021	0,310	-0,858	0,393	0,395	0,694	-0,799	0,429	1,557	0,123

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen Absolut (ABS\_Res1) yaitu TAW dan ASKP. Untuk mengatasi gangguan heteroskedastisitas ini dilakukan transformasi logaritma dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas-LnPMSO**

Variabel	Nilai t	Signifikansi
LnTAW	-0,362	0,718
LnGKS	-0,849	0,398
LnGKC	1,743	0,085
LnASKP	0,942	0,348
LnASKK	-0,083	0,934
LnASPK	-0,946	0,347

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian terhadap hipotesis 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 3 terdukung dengan masing-masing nilai t 1,832 (p=0,070) dan nilai t 2,012 (p=0,047) sedangkan hipotesis 2 tidak terdukung dengan nilai t 1,573 (p=0,119), artinya TAW berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO dan AQRB. Hal ini konsisten dengan penelitian Kelley and Margheim (2002) menemukan bahwa tekanan anggaran waktu lebih berhubungan dengan perilaku yang mengurangi kualitas audit (RAQ) dibandingkan *time deadline pressure* sedangkan TAW tidak berpengaruh positif terhadap URT, hasil ini konsisten dengan Kelley and Margheim (2002) yang menemukan hubungan U terbalik (*Inverted U-Shape*) antara tekanan anggaran waktu dan *under reporting of time* bahwa pada titik anggaran waktu yang sangat sulit dicapai, perilaku URT akan menurun karena auditor merasa frustrasi dan mengabaikan TAW dan berupaya menyelesaikan penugasan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengujian hipotesis 4a, 4c, dan 4e menunjukkan bahwa hipotesis 4c terdukung dengan

nilai t-1,871 (p=0,064) sedangkan hipotesis 4a dan 4e tidak terdukung, masing-masing dengan nilai t-0,610 (p=0,543) dan nilai t-1,079 (p=0,283), artinya gaya kepemimpinan terstruktur berpengaruh negatif terhadap perilaku URT dan tidak berpengaruh terhadap munculnya perilaku PMSO dan AQRB. Hal ini disebabkan pemimpin dengan gaya terstruktur cenderung memberikan cukup informasi mengenai pekerjaan dan mengklarifikasi aturan dan prosedur pada bawahan akan dianggap mengurangi rasa tanggung jawab bawahan karena menghilangkan atau mengambil otonomi yang dimiliki oleh bawahan (Dale and Fox, 2008). Namun demikian, partisipasi atasan ini tidak akan efektif dalam mengurangi perilaku disfungsional tanpa memperoleh kepercayaan dari bawahan (Choi *et al.*, 2004). Dalam situasi seperti ini, niat auditor untuk berperilaku disfungsional lebih berdasar pada apa yang dapat dipercaya oleh auditor apakah itu berasal dari lingkungannya ataupun dari diri sendiri. Oleh karena itu, auditor junior dalam menghadapi gaya kepemimpinan terstruktur akan termotivasi untuk mengurangi ketegangan ini dengan memodifikasi sikap mereka agar sesuai dengan persepsi yang diharapkan melalui kepercayaan antara atasan dan bawahan.

Hasil pengujian hipotesis 4b, 4d dan 4f menunjukkan bahwa hipotesis 4b dan hipotesis 4f terdukung dengan masing-masing nilai t 3,502 (p=0,001), dan nilai t 3,981 (p=0,000) dan hipotesis 4d tidak terdukung dengan nilai t 1,584 (p=0,116), artinya gaya kepemimpinan mempertimbangkan berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO dan AQRB namun tidak berpengaruh terhadap munculnya perilaku URT. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan mempertimbangkan meningkatkan potensial interaksi sosial, komunikasi, umpan balik, dan *outcome* informasi. Dengan meningkatnya komunikasi antara atasan dan bawahan memberikan kesempatan lebih bagi bawahan untuk belajar tentang harapan-harapan informal dan formal yang juga dimiliki bawahan lainnya selama bekerja, serta kebijakan dan prosedur formal dan informal dari organisasi (Dale and Fox, 2008). Selanjutnya, interaksi yang positif antara bawahan dan atasan akan meningkatkan keakuratan komunikasi dan dapat mengarah pada keakuratan pemahaman terhadap nilai organisasi yang akhirnya akan meningkatkan penyesuaian setiap orang dalam pelaksanaan tugas

atau pekerjaannya dan komitmen terhadap organisasi.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa bawahan yang lebih berpengalaman tidak menyukai gaya kepemimpinan yang mengarahkan, mengklarifikasi sasaran kinerja dan menjelaskan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut karena gaya kepemimpinan seperti ini dianggap terlalu banyak pengendalian yang diberikan oleh atasan (Miller *et al.*, 2006). Dalam situasi seperti ini, niat auditor untuk berperilaku disfungsional tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subyektif saja namun juga oleh persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukan yang bersumber pada keyakinan atas kontrol tersebut, artinya niat ini ditentukan oleh sejauh mana auditor itu memilih untuk melakukan perilaku disfungsional dan mendapat dukungan dari orang lain yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil pengujian hipotesis 5a, 5d, dan 5g menunjukkan bahwa hipotesis 5a, 5d, dan 5g tidak terdukung dengan masing-masing nilai  $t$  -1,257 ( $p=0,212$ ), nilai  $t$  -0,499 ( $p=0,619$ ) dan nilai  $t$  -0,493 ( $p=0,623$ ), artinya aspek supervisi kepemimpinan dan mentoring tidak berpengaruh positif terhadap munculnya perilaku PMSO, URT dan AQRB. Hal ini disebabkan KAP bukanlah suatu tempat yang baik untuk kemajuan berkarir (Ariyanti, 2002). Selain itu, untuk mencapai suatu kualitas audit yang baik, auditor sering menghadapi tekanan baik yang berasal dari level superior maupun sistem pengendalian yang menunjukkan aspek supervisi kepemimpinan dan mentoring tidak mampu menciptakan suatu lingkungan yang nyaman mungkin untuk dapat meminimalkan stress melalui peningkatan peran konseling, keteladanan dari supervisi sebagai fungsi psikososial. Oleh karena itu, variabel aspek supervisi kepemimpinan dan mentoring tidak berpengaruh terhadap munculnya perilaku disfungsional.

Hasil pengujian hipotesis 5b, 5e, dan 5h menunjukkan bahwa hipotesis 5e terdukung dengan nilai  $t$  1,793 ( $p=0,076$ ) sedangkan hipotesis 5b, 5h tidak terdukung dengan masing-masing nilai  $t$  -0,227 ( $p=0,821$ ), dan nilai  $t$  0,582 ( $p=0,562$ ), artinya aspek supervisi kondisi kerja berpengaruh positif terhadap munculnya perilaku URT dan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO dan AQRB. Hal ini disebabkan kondisi kerja yang dirasakan oleh auditor mendorong

ia berperilaku disfungsional URT, artinya auditor menghadapi kondisi kerja yang tidak ada penjelasan sejelas-jelasnya mengenai tugas, pemimpin tidak terbuka terhadap usulan perbaikan, dan kondisi kerja yang terasa menekan auditor sehingga auditor cenderung melakukan perilaku disfungsional untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya (Donnelly *et al.*, 2003)

Dalam kondisi seperti di atas, perilaku disfungsional dianggap merupakan reaksi terhadap lingkungan, artinya persepsi auditor atas tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan dipengaruhi oleh perasaan mereka atas pengendalian terhadap kondisi kerja yang dihadapi yaitu suatu perasaan yang rendah atas pengendalian tentang kondisi kerja menyebabkan auditor tidak cukup memiliki kekuatan untuk membuat keputusan atau mengaktualkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sehingga auditor lebih memilih untuk melakukan perilaku disfungsional terutama perilaku URT. Hal ini berdasar pada pandangan bahwa perilaku disfungsional terjadi dalam situasi di mana individu memandang diri mereka kurang mampu mencapai *outcome* yang diharapkan melalui upaya mereka sendiri.

Hasil pengujian hipotesis 5c, 5f, dan 5i menunjukkan bahwa hipotesis 5c, 5f, dan 5i tidak terdukung dengan masing-masing nilai  $t$  -0,401 ( $p=0,690$ ), nilai  $t$  -1,425 ( $p=0,157$ ) dan nilai  $t$  -1,449 ( $p=0,150$ ), artinya aspek supervisi penugasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap munculnya perilaku disfungsional baik perilaku PMSO, URT, maupun AQRB. Hasil ini menunjukkan bahwa penugasan kerja yang dirasakan oleh auditor memberi kesempatan baginya untuk menggunakan kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan dan membantu meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan analitis. Namun, situasi penugasan ini tidak mendorong auditor untuk melakukan perilaku disfungsional karena adanya kepercayaan antara atasan dan bawahan. Selain telah terbiasa melakukan penugasan audit, pengalaman dan pengetahuan auditor memberikan keyakinan dalam dirinya akan kemampuan untuk menyelesaikan penugasan kerja tanpa melakukan perilaku disfungsional (Choi *et al.*, 2004 dan Miller *et al.*, 2006). Hasil pengujian 5 (lima) hipotesis diringkas pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	TAW berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO	Terdukung
H2	TAW berpengaruh positif terhadap perilaku URT	Terdukung
H3	TAW berpengaruh positif terhadap perilaku AQRB	Tidak terdukung
H4a,4c,4e	GKS berpengaruh negatif terhadap perilaku PMSO,URT,AQRB	GKS'!URT terdukung; GKS'!PMSO & AQRB tidak terdukung
H4b,4d,4f	GKC berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO,URT,AQRB	GKC'!PMSO & AQRB terdukung ; GKC'! URT tidak terdukung
H5a,5d,5g	ASKP berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO,URT,AQRB	Tidak terdukung
H5b,5e,5h	ASKK berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO,URT,AQRB	ASKK'!URT terdukung; ASKK'!PMSO & AQRB tidak terdukung
H5c,5f,5i	ASPK berpengaruh positif terhadap perilaku PMSO,URT,AQRB	Tidak terdukung

**Sumber:** Hasil penelitian. Data diolah.

Berdasar model regresi ini didapatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk model PMSO, URT dan AQRB masing-masing adalah 0,092; 0,054; dan 0,116 artinya variabel dependen PMSO,URT, dan AQRB hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen (TAW, GKS, GKC, ASKP,ASKK,ASPK) masing-masing sebesar 9,2%; 5,4%; dan 11,6% sisanya oleh faktor lain. Hasil uji F ini menunjukkan bahwa semua variabel yang dihipotesiskan yaitu TAW, GKS, GKC, ASKP, ASKK, dan ASPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku disfungsional yang berupa perilaku PMSO, URT, dan AQRB masing-masing dengan nilai sebesar 2,776 ( $p=0,015$ ); 1,989 ( $p=0,074$ ); dan 3,303 ( $p=0,005$ ).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu, gaya kepemimpinan (GKS dan GKC), dan aspek-aspek supervisi (ASKP, ASKK, ASPK) merupakan faktor-faktor yang mendorong munculnya

perilaku disfungsional yang berupa perilaku PMSO, perilaku URT, dan perilaku AQRB. Keseluruhan hasil ini semakin memperkuat teori perilaku perencanaan bahwa dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku bukan hanya tergantung pada norma subyektif yang dimiliki oleh individu namun juga berdasar pada kontrol yang dimiliki yang bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut.

### Saran

Berdasar hasil penelitian ini maka manajemen KAP perlu menetapkan anggaran yang layak bagi pelaksanaan audit dan mendesain suatu lingkungan kerja yang nyaman bagi auditor sehingga auditor mampu melaksanakan tugas audit dengan baik tanpa merasa tertekan oleh atasan maupun pihak lain yang dapat mendorongnya melakukan perilaku disfungsional. Berdasar hal ini maka perlu dirancang suatu sistem komunikasi yang saling percaya dan baik antara atasan, bawahan, dan sesama rekan untuk meminimalkan munculnya perilaku disfungsional, menetapkan standar fee minimum serta meningkatkan peran *peer review* dalam menilai kinerja auditor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*, Second edition, Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Ariyanti, Deasy. 2002. "Harapan Kenyataan dalam Berkarir di Kantor Akuntan Publik". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 3: 229-250.
- Choi, Nak Hwan, Andrea L. Dixon, dan Jae Min Jung. 2005. "Dysfunctional Behavior Among Sales Representations: The Effect Of Supervisory Trust, Participation, and Information Controls". *Journal of Personal Selling & Sales Management*. Vol. XXIV, No. 3: 181-198.
- Dale, Kathleen, dan Marilyn L Fox. 2008. "Leadership Style and Organizational Commitment: Mediating Effect of Role Stress". *Journal of Managerial Issues*; Spring, 20, 1: 109.
- Donnelly, David. P., Jeffrey J. Quirin, David O'Brian. 2003. "Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics". *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 15: 1-24.
- Herrbach, Olivier. 2005. "The Art of Compromise? The Individual and Organisational Legitimacy of "Irregular Auditing". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol.18, No.3: 390-409.
- Kelley, T. dan Margheim, L. 2002. "The Relationships between Senior Auditor, Budget Participation, Job Structuring, Job Consideration and Staff Auditor, Time Budget Pressure". *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 18, No. 2: 1-9.
- Liyanarachchi, A., Gregory, dan McNamara, Shaun M. 2007. "Time Budget Pressure in New Zealand Audits", *Business Review*, Vol. 9, No. 2.
- Miller, Cathleen L., Donald B Fedor, dan Robert J Ramsay. 2006. "Effects of Discussion of Audit Reviews on Auditors' Motivation and Performance". *Behavioral Research in Accounting*, 18:135.
- Pierce, B. dan Sweeney, B. 2004. "Cost-Quality Conflict in Audit Firms: An Empirical Investigation". *European Accounting Review*, Vol. 13, No. 3: 415-441.
- Shapeero, M., Koh. Hian Chye, dan Killough, L.N. 2003. "Underreporting and Premature Sign Off in Public Accounting". *Managerial Auditing Journal*, 18, 6/7: 478-489.
- Sososutiksno, C. 2005. "Relation of Time budget Pressure by Dysfunctional Behaviour and Its Influence to Audit Quality". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 2.
- Sweeney, B, dan Pierce, B. 2004. "Management Control in Audit Firm: A Qualitative Examination". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17, 5: 779-812.

## **DETERMINAN DAN KONSEKUENSI PELAPORAN KELEMAHAN MATERIAL PENGENDALIAN INTERNAL DALAM KONTEKS THE SARBANES OXLEY ACT OF 2002**

**Djoko Susanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155  
*E-mail*: dsusanto@me.com

### **ABSTRACT**

The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (specifically sections 302 and 404) requires companies that file annual financial reports with the US Securities and Exchange Commission to report on management's responsibilities to establish and maintain adequate internal controls over the company's financial reporting process, as well as auditors' assessment of the effectiveness of those controls (SEC 2012). Internal control is broadly defined as a process, influenced by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: i) effectiveness and efficiency of operations; ii) reliability of financial reporting; and iii) compliance with applicable laws and regulations (COSO 1992). This study will first present a discussion on how academic researchers have used data contained in publicly available internal control reports to execute their research analyses. Next, a review of the academic research investigating the determinants as well as the consequences of internal control material weaknesses will be presented, followed by a review of more recent studies examining the ability or inability of companies to remediate internal control problems. Given the significant amount of regulatory

and public attention placed on the quality and reliability of a company's internal controls and financial reporting, an understanding of the determinants and consequences of internal control failures is warranted for academics, regulators, and practitioners.

**Keywords:** internal control over financial reporting; internal control material weakness; Sarbanes-Oxley Act; Section 404 of Sarbanes-Oxley; Section 302 of Sarbanes-Oxley

JEL Classification: M41

### **PENDAHULUAN**

Memasuki millennium baru, dunia bisnis dan akuntansi dikejutkan oleh skandal korporasi dan akuntansi yang mengguncang pasar modal Amerika Serikat. Sebagai contoh, *Enron*, sebuah perusahaan energi Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas, yang pernah disebut oleh majalah *Fortune* sebagai salah satu perusahaan besar Amerika Serikat yang paling inovatif (Stein, 2000).<sup>1</sup> Dengan memanfaatkan celah peraturan akuntansi dan praktik curang pelaporan akuntansi,

<sup>1</sup> [http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2000/10/02/288448/index.htm](http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/10/02/288448/index.htm)

*Enron* mampu menutupi utang dalam milyar dollar akibat kegagalan proyek dan transaksi. Pada bulan Desember 2000, harga saham *Enron* pernah mencapai puncaknya dengan harga \$84.87 dan secara mengejutkan harga saham tersebut terjun bebas sampai di bawah \$1 dalam kurun waktu kurang dari satu tahun (BBC, 2002).<sup>2</sup> Akhirnya, perusahaan terpaksa melaporkan diri sebagai perusahaan gagal. Skandal ini juga mengakibatkan runtuhnya salah satu kantor akuntan publik yang saat terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat, *Arthur Anderson*. Pada tahun 2002, *Arthur Anderson* didakwa dan terbukti bersalah menutupi kebenaran karena menghancurkan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penugasan audit *Enron*. Sebagai akibatnya, kantor akuntan publik tersebut harus berhenti beroperasi (Landsman, 2003; Morrison, 2004).

Sebagai reaksi terhadap skandal *Enron* dan praktik curang akuntansi korporasi lainnya yang memalukan (seperti *Worldcom*, *Tyco International*, *Adelphia*, dan *Peregrine Systems*), Undang-Undang *Sarbanes-Oxley 2002* (*the Sarbanes-Oxley Act of 2002*) atau sering disebut SOX diundangkan.<sup>3</sup> Pada tanggal 30 Juli 2002, Presiden George W. Bush menandatangani menjadi Undang-Undang, *The Sarbanes Oxley Act of 2002*, yang disebut sebagai “*the most far reaching reforms of American business practices since the time of Franklin Delano Roosevelt.*” Undang-Undang ini mengharuskan sejumlah reformasi untuk meningkatkan tanggung jawab korporasi, menyempurnakan pengungkapan keuangan, dan memberantas kecurangan korporasi dan akuntansi (SEC, 2012). Undang-Undang ini disahkan oleh *the US House of Representatives* dengan hitungan suara 423 setuju, 3 tidak setuju, dan 8 suara abstain dan oleh *the US Senate* dengan 99 suara setuju dan 1 suara abstain.<sup>4</sup>

Tujuan studi ini untuk membahas penelitian akademik berkaitan dengan Bab 302 dan 404 dari SOX (selanjutnya dalam studi ini di sebut SOX 302 dan SOX

404). Kedua Bab dari SOX ini mewajibkan perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan kepada *US Securities and Exchange Commission* (SEC) untuk melaporkan tanggung jawab manajemen dalam menetapkan dan menjaga pengendalian internal yang baik atas proses pelaporan keuangan, begitu juga penilaian auditor terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut. Pengendalian internal dianggap memiliki kelemahan material apabila terdapat kemungkinan bahwa suatu salah saji material pada laporan tahunan atau interim tidak dapat dicegah atau dideteksi (PCAOB, 2004).

Berlaku efektif pada tahun 2002, SOX 302 mewajibkan manajemen 1) untuk menyatakan bahwa kelemahan dan kekurangan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Komite Audit dan 2) mengungkapkan kelemahan material dan perubahan material dalam pengendalian internal kepada publik. Dalam hal ini, SOX 302 hanya mengharuskan pengungkapan pengetahuan *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) mengenai kelemahan material dalam pengendalian internal perusahaan. Dengan kata lain, pengungkapan dalam SOX 302 merupakan suatu bagian dari fungsi pokok manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan dan diskresi manajemen untuk mengungkapkan kepada publik.

Berbeda dengan SOX 302, SOX 404 membebaskan tanggung jawab kepada manajemen maupun auditor independen untuk melaporkan kelemahan material dalam pengendalian internal. Secara khusus, SOX 404 mengharuskan manajemen mendokumentasikan dan menguji efektifitas pengendalian internal dan menerbitkan secara tahunan suatu laporan pengendalian internal di mana manajemen harus membuat suatu pernyataan positif mengenai efektifitas pengendalian internal, atau mengungkapkan sifat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan lemahnya pengendalian internal. Auditor perusahaan harus menerbitkan suatu pendapat

<sup>2</sup> <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1759599.stm>

<sup>3</sup> Nama regulasi ini didasarkan kepada dua penggagasnya yaitu: i) Senator Paul Sarbanes (Democrat dari The State of Maryland) dan Congressman Michael Oxley (Republican dari The State of Ohio).

<sup>4</sup> Untuk melihat rincian pemungutan suara, lihat <http://clerk.house.gov/evs/2002/roll348.xml> and [http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll\\_call\\_lists/roll\\_call\\_vote\\_cfm.cfm?congress=107&session=2&vote=00192](http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=107&session=2&vote=00192).

terpisah terhadap pernyataan manajemen yang dimasukkan ke dalam laporan tahunan.<sup>5 dan 6</sup>

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Menurut kerangka yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO, 1992), pengendalian internal secara luas dirumuskan sebagai suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personnel lain, serta dirancang untuk memberikan jaminan yang cukup mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut i) efektifitas dan efisiensi operasi; ii) keandalan pelaporan keuangan; dan iii) kepatuhan kepada hukum dan regulasi yang terkait.<sup>7</sup>

Diundangkannya SOX 404 telah memancing perdebatan publik mengenai manfaat dan beban undang-undang ini kepada perusahaan publik dan pemangku kepentingan secara luas. Para pendukung SOX 404 telah memuji adanya tuntutan yang memberikan perlindungan baru yang penting terhadap kecurangan korporasi dan meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan untuk publik. Tetapi, banyak pihak lain yang memberikan komentar bahwa biaya atau beban untuk mematuhi SOX 404 melebihi manfaat yang diperoleh (Solomon, 2005; Countryman, 2005; Charles River Associates, 2005). Pada tahun 2005, kantor-kantor akuntan *the "Big Four"* (*Deloitte Touche, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers*) membentuk suatu komisi yang meneliti pengaruh SOX atas suatu sampel yang terdiri atas 90 perusahaan dari *Fortune 1000 companies* (Charles River Associates, 2005). Komisi ini mendokumentasikan bahwa rata-rata biaya audit SOX 404 adalah \$1.9 juta, mewakili kurang lebih 25% dari biaya kepatuhan tahun

pertama dari SOX. Pada tahun yang sama, organisasi *the Financial Executives International* (FEI) menemukan bahwa perusahaan sampel membayar rata-rata \$4.3 juta tambahan biaya internal dan tambahan biaya audit, konsultan, dan perangkat lunak yang berkaitan dengan implementasi SOX 404. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan bahwa biaya tersebut jauh di atas manfaat yang diperoleh (FEI, 2005). Selanjutnya, Raghunandan and Rama (2006) memeriksa suatu sampel yang terdiri atas 660 perusahaan manufaktur yang menyerahkan laporan SOX 404 per 15 May 2005. Hasil temuannya menemukan bahwa rata-rata dan median biaya audit untuk perusahaan dalam sampel untuk tahun pertama implementasi SOX 404 adalah 86 dan 128% lebih tinggi dari pada biaya yang sama untuk tahun fiskal sebelumnya.

Dalam menilai efektifitas pengendalian internal perusahaan terhadap pelaporan keuangan, baik manajemen maupun auditor menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam COSO *Internal Control – Integrated Framework*. Pengendalian internal dalam COSO meliputi lima komponen yang saling berhubungan, yaitu 1) Lingkungan Kontrol yang meliputi integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi sumber daya manusia di dalam perusahaan, *philosophy* manajemen dan gaya operasi, cara manajemen menugasi kewenangan, tanggung jawab, dan mengorganisasi dan mengembangkan sumber daya manusia, serta perhatian dan pengarahan yang tersedia oleh Dewan Direksi; 2) Pengukuran Risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko yang relevan untuk pencapaian tujuan dan pembentukan dasar untuk penentuan bagaimana risiko harus dikelola; 3) Aktivitas Kontrol yang meliputi

<sup>5</sup> The SEC adalah komisi yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk meregulasi pasar modal. Misiya adalah untuk melindungi investor, menjaga agar pasar adil, teratur dan efisien, dan memfasilitasi pembentukan modal (<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>).

<sup>6</sup> Untuk membaca teks dari SOX, kunjungi <http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf>.

<sup>7</sup> COSO dibentuk pada tahun 1985 untuk mensponsori *the National Commission on Fraudulent Financial Reporting*, suatu inisiatif sektor swasta yang independen yang meneliti faktor-faktor pendorong penyebab terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Komisi nasional ini didukung secara bersama sama oleh lima asosiasi profesional terkemuka di Amerika Serikat: *the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan the National Association of Accountants* (sekarang *the Institute of Management Accountants [IMA]*). Sepenuhnya independen dari tiap organisasi pendukung tersebut, komisi ini meliputi perwakilan dari industri, akuntan publik, perusahaan investasi, dan *the New York Stock Exchange* (<http://coso.org/aboutus.htm>).

kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa pengarahan manajemen dilaksanakan dan tindakan yang diperlukan telah diambil terhadap risiko pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini meliputi aktivitas-aktivitas yang beragam seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penelaahan kinerja operasi, pengamanan aset dan pemisahan tugas; 4) Informasi dan Komunikasi, informasi yang terkait harus diidentifikasi, diperoleh dan dikomunikasikan dalam suatu format dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam artian luas, mengalir ke bawah, dan ke atas organisasi. Komunikasi yang efektif juga diperlukan dengan pihak luar, seperti kosumen, pemasok, regulator, dan pemegang saham; dan 5) Pemantauan sebagai suatu proses yang menilai kualitas kinerja sistem sepanjang waktu. Hal ini dicapai melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. Kelemahan pengendalian internal harus dilaporkan ke atas, bahkan masalah serius harus dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sifat dan isi laporan-laporan SOX 404, simaklah contoh-contoh ringkasan berikut dari laporan pengendalian internal SOX yang diserahkan kepada SEC. Contoh pertama adalah laporan yang diserahkan oleh *Wal-Mart Stores Inc.* pada tahun 2005, yang berisi penilaian pengendalian internal baik oleh manajemen maupun auditor eksternal:<sup>8</sup>

WAL MART STORES INC (From 2005 10-k filing)

#### *Management - Internal Control Assessment*

*“...Management has responsibility for establishing and maintaining adequate internal control over financial reporting. Internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external reporting purposes in accordance with accounting principles generally accepted in the United States. Because of its inherent limitations, in-*

*ternal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Management has assessed the effectiveness of the Company’s internal control over financial reporting as of January 31, 2005. In making its assessment, Management has utilized the criteria set forth by the Committee of Sponsoring Organizations (“COSO”) of the Treadway Commission in Internal Control—Integrated Framework. Management concluded that based on its assessment, **Wal-Mart’s internal control over financial reporting was effective as of January 31, 2005.** Management’s assessment of the effectiveness of the Company’s internal control over financial reporting as of January 31, 2005 has been audited by Ernst & Young LLP, an independent registered public accounting firm, as stated in their report which appears in this Annual Report to Shareholders...”*

#### *Auditor - Internal Control Opinion*

*“...We have audited management’s assessment, included in the accompanying Management’s Report to Our Shareholders under the caption “Report on Internal Control Over Financial Reporting,” that Wal-Mart Stores, Inc. maintained effective internal control over financial reporting as of January 31, 2005, based on criteria established in Internal Control – Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (the COSO criteria). Wal-Mart Stores, Inc.’s management is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting and for its assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting. Our responsibility is to express an opinion on management’s assessment and an opinion on the effectiveness of the company’s internal control over financial reporting based on our audit...”*

*...In our opinion, management’s assessment that Wal-Mart Stores, Inc. maintained effective internal control over financial reporting as of January 31, 2005, is fairly stated, in all material respects, based on the COSO criteria. **Also, in our opinion, Wal-Mart Stores, Inc., maintained, in all material respects, effective***

<sup>1</sup> Wal-Mart Stores Inc. adalah korporasi terbesar ketiga di dunia, menurut daftar *the Fortune Global 500* pada tahun 2012.

*internal control over financial reporting as of January 31, 2005, based on the COSO criteria...*

*Ernst & Young LLP*

Ringkasan laporan tersebut menyatakan bahwa *Wal-Mart Inc.* memelihara pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan untuk tahun fiskal yang dimaksud. Sebagai kontras terhadap contoh laporan tersebut, simak juga contoh laporan SOX berikut yang menyampaikan kelemahan material dalam pengendalian internal:

**PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**  
(From 2006 20-F filing)

*Management - Internal Control Assessment*

**“...In connection with management’s evaluation of the Company’s internal control over financial reporting, the following material weaknesses have been identified as of December 31, 2006. 1. The Company did not have an effective control environment based on the COSO criteria. The following material weaknesses related to the Company’s control environment were identified:**

- *The Company did not adequately design and maintain effective controls over the assignment of authority and responsibility with respect to its internal control over financial reporting and the necessary lines of communication throughout the organization. Specifically, certain key members of management had inappropriate access to the Company’s financial application systems and related data with the ability to effect accounting entries within such systems without adequate mechanisms for identifying and evaluating the results of any such actions.*
- *The Company did not adequately design and maintain effective information technology policies, including those related to security and access to its financial application programs and data. Specifically, the Company had inadequate controls to identify and monitor conflicting user roles (i.e., segregation of duties) and lacked independent monitoring of access by employees to its financial application systems and data.*
- *The Company did not maintain a sufficient complement of personnel with an appropriate level of accounting knowledge, experience and training in*

*the application of applicable generally accepted accounting principles commensurate with the Company’s financial reporting requirements.*

- *The Company did not adequately perform a risk assessment to identify risks so as to ensure that it adequately designed and implemented effective controls that would prevent and detect material misstatements to its financial statements. These control environment material weaknesses contributed to the existence of the additional material weaknesses below.*

**2. The Company did not maintain effective controls, including monitoring, over its financial close and reporting process. Specifically, the Company did not maintain effective controls over the completeness and accuracy of its financial consolidation and disclosure process including matters relating to: the disclosure of fixed assets and accounting for business combinations. In addition, controls related to the accuracy of financial statement preparation and disclosures relating to consolidated statements of cash flows, segment information and the acquisition of a joint operation were not operating effectively.**

**3. The Company did not adequately design and maintain effective controls over its accounting for property, plant and equipment. Specifically, the Company’s controls were not adequately designed or operating effectively to ensure the completeness, accuracy and valuation of its fixed assets, including related additions and dispositions/retirements.**

**4. The Company did not design and maintain effective controls over its accounting for revenue and related accounts receivable. Specifically, the Company’s controls were not designed and operating effectively to ensure the completeness and accuracy of leased line revenue and provisions for uncollectible balances. In addition, the controls to ensure the completeness and accuracy of fixed line and fixed wireless revenue and collections were not operating effectively.**

*All of the above material weaknesses resulted in audit adjustments to the Company’s consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006. Additionally, each of the material weaknesses described above could result in misstatements of the aforementioned financial statement accounts and disclosures that would result in a material misstatement to the Company’s annual consolidated financial statements that would not be prevented or detected. Because of the material weaknesses de-*

*scribed above, management has concluded that the Company did not maintain effective internal control over its financial reporting as of December 31, 2006 based on the Internal Control — Integrated Framework issued by the COSO...*

*Auditor - Internal Control Opinion*

*“...In connection with management’s evaluation of the Company’s internal control over financial reporting, the following material weaknesses have been identified as of December 31, 2006..*

*... In our opinion, management’s assessment that Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk did not maintain effective internal control over financial reporting as of 31 December 2006, is fairly stated, in all material respects, based on criteria established in Internal Control — Integrated Framework issued by the COSO. Also, in our opinion, because of the effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk has not maintained effective internal control over financial reporting...”*

*PricewaterhouseCoopers LLP (Haryanto Sahari & Rekan)*

**HASIL PENELITIAN**

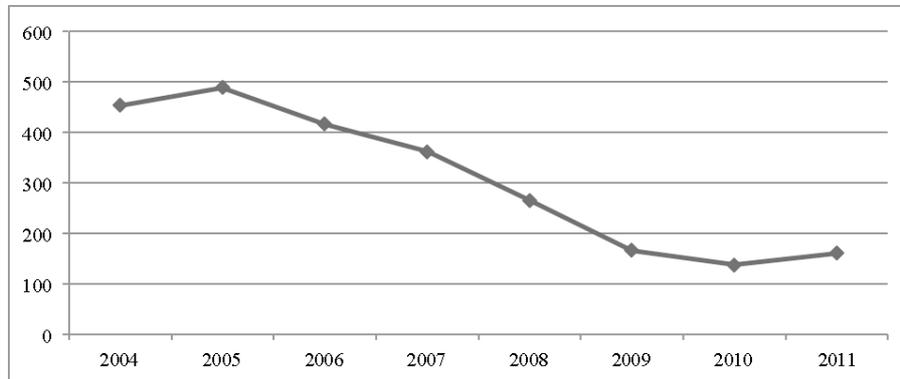
Tabel 1 menyajikan frekuensi laporan audit pengendalian internal SOX 404 yang berisi kelemahan pengendalian internal selama periode sampel 2004–2011. Seperti yang tampak pada Tabel 1 dan Gambar 1, terdapat sejumlah 2.450 observasi dari laporan SOX 404 yang melaporkan kelemahan pengendalian internal dari 2004–2011. Jumlah kelemahan pengendalian internal terbanyak terjadi selama tiga tahun pertama sejak berlakunya regulasi SOX 404 (2004–2006). Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah kelemahan pengendalian internal terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berlalunya waktu, perusahaan lebih mampu menyelesaikan kelemahan dan mempertahankan efektifitas pengendalian internal atas

pelaporan keuangan. Sumber untuk data yang disajikan dalam Tabel 1 dan tabel lain adalah berasal dari pengumpulan data perusahaan publik yang menyerahkan laporan keuangan kepada SEC dari tahun 2004–2011. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, laporan keuangan adalah tersedia untuk publik dan berisi suatu bagian untuk laporan auditor mengenai efektifitas pengendalian internal klien. Oleh karena itu, data untuk semua tabel dalam studi ini diturunkan dari laporan auditor eksternal atas pengendalian internal klien untuk memenuhi SOX 404. Pengarsipan perusahaan tersebut dapat diakses melalui *website* SEC pada <http://www.sec.gov/>.

**Tabel 1**  
**Frekuensi Laporan Audit Pengendalian Internal SOX 404 yang Berisi Kelemahan Pengendalian Internal**

Tahun	Frekuensi	Persen
2004	453	18.49%
2005	489	19.96%
2006	416	16.98%
2007	362	14.78%
2008	265	10.82%
2009	166	6.78%
2010	138	5.63%
2011	161	6.57%
Total	2,450	100.00%

Tabel 2 melaporkan auditor *Big 4* dan *Non-Big 4* yang menerbitkan kelemahan pengendalian internal SOX kepada kliennya dari 2004 - 2011. Selama periode tersebut, sejumlah 2.450 pendapat kelemahan pengendalian internal SOX 404 telah diterbitkan oleh auditor kepada klien. Auditor *Big 4* meliputi: *Deloitte & Touche LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP, PricewaterhouseCoopers LLP*. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, auditor *Big 4* bertanggung jawab atas penerbitan mayoritas pendapat kelemahan pengendalian internal selama periode 2004–2011. Pada puncaknya, auditor *Big 4* menerbitkan hampir 80% pendapat atas kelemahan pengendalian internal pada 2004. Tabel 2 perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena sebagian besar perusahaan publik di Amerika



**Gambar 1**  
**Frekuensi Laporan Audit Pengendalian Internal SOX 404 Yang Berisi Kelemahan Pengendalian Internal**

**Tabel 2**  
**Kelompok Auditor yang Menerbitkan Pendapat Kelemahan Pengendalian Internal SOX 404 Selama 2004 – 2011**

Tahun	Total	Persen dari		Auditor Non Big 4	Persen dari Total
		Auditor Big 4	Total		
2004	453	362	79.91%	91	20.09%
2005	489	382	78.12%	107	21.88%
2006	416	301	72.36%	115	27.64%
2007	362	245	67.68%	117	32.32%
2008	265	161	60.75%	104	39.25%
2009	166	105	63.25%	61	36.75%
2010	138	78	56.52%	60	43.48%
2011	161	99	61.49%	62	38.51%

Serikat menggunakan auditor *Big 4*. Meskipun demikian, berdasarkan Tabel 2 nampak persentase pendapat kelemahan pengendalian internal oleh *Big 4* (*Non Big 4*) menurun (meningkat) seiring berjalannya waktu.

Penting untuk membahas bagaimana para peneliti menggunakan data di dalam laporan pengendalian internal untuk melakukan analisisnya. Penelitian sebelumnya kebanyakan menitikberatkan

kepada defisiensi pengendalian internal dan kelemahan material yang teridentifikasi dalam laporan-laporan SOX 302 dan 404 perusahaan.<sup>9</sup> Untuk melakukan ini, para peneliti memeriksa keparahan dari masalah pengendalian internal dan melakukan berbagai klasifikasi isu pengendalian internal. Selanjutnya, penulis akan membahas penelitian akademik yang menginvestigasi determinan dan juga konsekuensi kelemahan pengendalian internal. Determinan-

<sup>9</sup> Suatu kelemahan material adalah suatu defisiensi kontrol, atau kombinasi berbagai defisiensi kontrol, yang mengakibatkan timbulnya kecenderungan bahwa suatu salahsaji material dalam laporan keuangan tahunan atau interim, tidak dapat dicegah atau dideksi.

determinan khusus yang akan diteliti mencakup karakteristik ekonomi perusahaan dan mekanisme tatakelola korporasi yang meliputi efektifitas komite audit, keakhlian eksekutif, fungsi audit internal, dan independensi auditor. Lebih lanjut, penulis akan membahas penelitian yang menganalisis konsekuensi defisiensi pengendalian internal terhadap kembalian saham, kualitas informasi akuntansi, biaya utang dan ekuitas, kualitas pengungkapan, penugasan audit, dan penalti kepada manajemen dan dewan direksi. Sementara sebagian besar penelitian sebelumnya menitikberatkan kepada determinan dan konsekuensi kelemahan pengendalian internal, penelitian akhir-akhir ini menyelidiki bagaimana perusahaan mampu mengatasi atau memperbaiki masalah kelemahan material ini. Pembahasan juga dilakukan terhadap bagaimana perusahaan mampu mengatasi atau memperbaiki masalah kelemahan material.

## PEMBAHASAN

### Kategorisasi Kelemahan Pengendalian Internal

Ge and McVay (2005) termasuk peneliti-peneliti yang pertama kali mempelajari laporan keuangan setelah berlakunya SOX yang memuat kelemahan pengendalian internal. Studinya memberikan bukti deskriptif mengenai pengungkapan kelemahan material dan mengkategorikan sampel kelemahan pengendalian internal ke dalam sembilan kategori. Tipe-tipe defisiensi ini meliputi pelatihan; persediaan dan akrual; kebijakan akuntansi; pengakuan pendapatan; rekonsiliasi akun; pemisahan tugas; akun-akun kompleks; anak perusahaan; dan lain-lain.

Dalam mengklasifikasikan sampel kelemahan pengendalian internal, Doyle *et al.* (2007a) mengusulkan dua skema klasifikasi, yang pertama berdasarkan keparahan masalah pengendalian internal dan kedua didasarkan kepada pernyataan alasan untuk masalah pengendalian internal tersebut. Dalam skema klasifikasi pertama, para peneliti membedakan antara i) kelemahan material pada level akun atau transaksi dan ii) kelemahan

material pada level perusahaan atau entitas. Kelemahan material pada level akun atau transaksi berkaitan dengan proses pengendalian terhadap saldo akun atau transaksi tertentu, dan para peneliti berargumen bahwa tipe kelemahan material ini teridentifikasi oleh auditor dalam pengujian substantif dan karenanya tidak merupakan hal yang serius dalam kaitannya dengan keandalan laporan keuangan. Kelemahan material pada tingkat entitas, sebaliknya berkaitan dengan pengendalian yang bersifat lebih makro seperti lingkungan kontrol atau proses pelaporan keuangan keseluruhan, yang belum tentu terdeteksi oleh auditor secara efektif dalam suatu penugasan audit. Dalam skema klasifikasi kedua, Doyle *et al.* (2007a) mengklasifikasikan kelemahan berdasarkan pernyataan alasan, yang mencakup *staffing*, *complexity*, dan *general*.<sup>10</sup>

Bedard *et al.* (2012) menyajikan kodifikasi terhadap tipe-tipe kelemahan material ke dalam level entitas dan khas akun. Dalam level entitas, item-item yang dimasukkan berkaitan dengan isu-isu seperti penyesuaian akhir tahun, pelatihan, rekonsiliasi, teknologi informasi, pemisahan tugas, pencatatan jurnal, dan konsolidasi. Dalam khas akun, item-item yang dimasukkan berkaitan dengan isu-isu seperti perpajakan, pengakuan pendapatan, persediaan, piutang, depresiasi, dan akun spesifik lainnya.

Penelitian sebelumnya juga membedakan antara kelemahan pengendalian internal yang terkait dengan teknologi informasi (TI) atau isu sistem informasi dan yang tidak terkait dengan masalah TI. Klasifikasi seperti ini dianggap penting karena pengendalian-pengendalian berbasis TI (misalnya kemampuan sistem menyediakan akses kepada, dan pengamanan atas, catatan akuntansi) adalah pengendalian yang sering menjadi tumpuan pengendalian lain (seperti pemisahan tugas), dan karenanya mempunyai akibat langsung terhadap pencapaian berbagai tujuan dari kriteria kontrol dan proses keseluruhan pelaporan keuangan (PCAOB, Standard No. 5, 2007; COSO, 2009). Dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan kelemahan non-TI, perusahaan dengan kelemahan TI

<sup>10</sup> Suatu contoh *staffing (complexity) [general]* mencakup lemahnya pengendalian internal dan prosedur yang berkaitan dengan pemisahan tugas (kelemahan-kelemahan material dalam interpretasi dan aplikasi standar akuntansi yang kompleks) [defisiensi yang berkaitan dengan rancangan kebijakan dan eksekusi proses yang terkait dengan akuntansi transaksi].

menghadapi masalah lebih parah dalam proses pelaporan keuangan, termasuk besarnya jumlah defisiensi pengendalian internal, kemungkinan lebih besar menerbitkan salah saji laporan keuangan, dan kualitas pengungkapan yang lebih rendah (Klamm *et al.*, 2012; Klamm and Watson 2009; Li *et al.*, 2012). Kelemahan material TI juga diasosiasikan dengan biaya audit yang lebih tinggi (e.g., Canada *et al.*, 2009), kinerja operasi yang lebih rendah dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih rendah (Stoel and Muhanna, 2011). Secara keseluruhan, penelitian mengenai konsekuensi kelemahan material TI menunjukkan bahwa beban atau biaya tipe kelemahan ini adalah lebih berat dibandingkan dengan kelemahan material non-TI, karena pengaruhnya kepada proses pelaporan keuangan memberikan imbas yang lebih signifikan.

Masli *et al.* (2010) memeriksa potensi manfaat teknologi informasi yang dirancang untuk memantau efektifitas pengendalian internal. Dalam melakukan ini, mereka mengidentifikasi sampel perusahaan yang mengimplementasikan teknologi pemantauan pengendalian internal sebagai respons terhadap

tuntutan dari SOX (SOX 302 maupun SOX 404). Konsisten dengan hipotesis yang diajukan, temuannya melaporkan bahwa teknologi pemantauan penengendalian internal diasosiasikan dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk terjadinya kelemahan pengendalian internal, kenaikan biaya audit yang lebih kecil, dan laporan audit yang lebih tepat waktu. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa teknologi pemantauan pengendalian internal dapat membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah kelemahan dalam pengendalian internal.

Tabel 3 dan Gambar 2 menyajikan kategori kelemahan pengendalian internal dan jumlah perusahaan yang melaporkan untuk masing-masing kategori. Kategori tersebut mencakup kecurangan, tatakelola, pernyataan kembali, pengendalian transaksi, pengungkapan, perundangan, sumber daya manusia, kelemahan TI, dan lainnya. Panel B memberikan penjelasan rinci untuk setiap kategori. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, terdapat 2.450 observasi laporan audit SOX 404 yang berisi kelemahan material pengendalian internal dari 2004–2011. Tetapi, suatu

**Tabel 3**  
**Kategori Kelemahan Pengendalian Internal dan Jumlah Perusahaan yang melaporkan**  
**Pada Masing-masing Kategori**

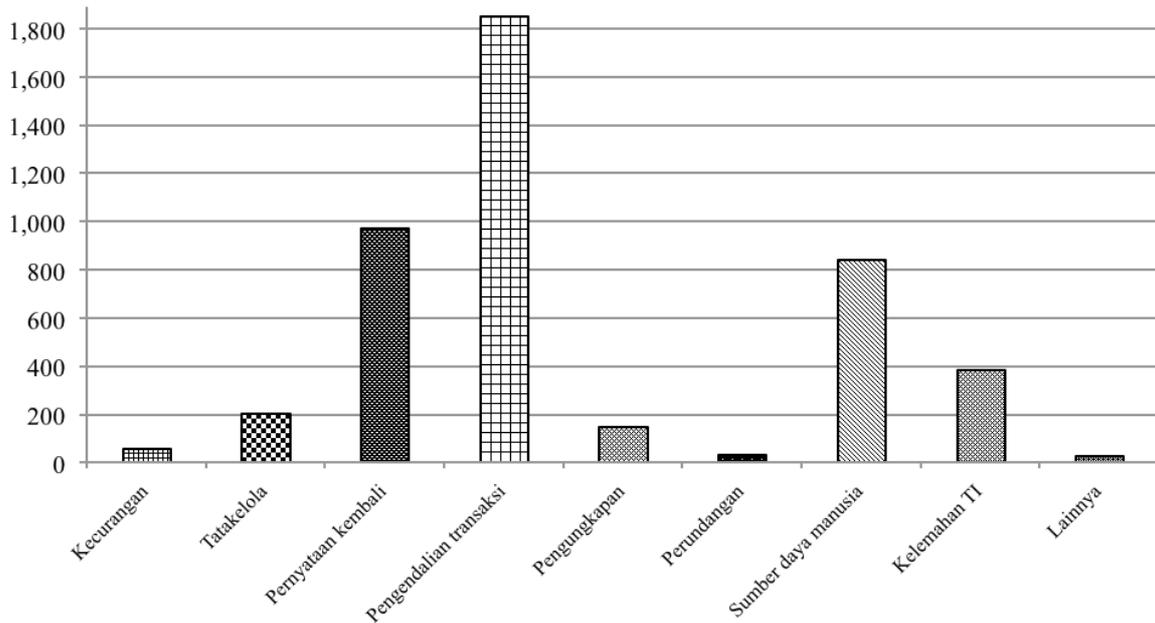
**Panel A. Frekuensi Observasi Kategori Kelemahan Pengendalian Internal**

<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi</b>
Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	56
Tatakelola ( <i>Governance</i> )	203
Pernyataan kembali ( <i>Restatement</i> )	970
Pengendalian transaksi ( <i>Transaction controls</i> )	1.848
Pengungkapan ( <i>Disclosure</i> )	148
Perundangan ( <i>Regulatory</i> )	33
Sumber daya manusia ( <i>Personnel</i> )	838
Kelemahan TI ( <i>IT weaknesses</i> )	382
Lainnya ( <i>Other</i> )	28

**Panel B. Kategori Kelemahan Pengendalian Internal SOX 404**

<b>Kategori</b>	<b>Penjelasan</b>
Kecurangan	Kecurangan keuangan, ketidak-beresan dan misrepresentasi
Tatakelola	Komite audit tidak efektif atau <i>understaffed</i> Fungsi audit internal tidak cukup atau tidak ada Isu-isu kompetensi manajemen senior, tone, keandalan

Pernyataan kembali	Pernyataan kembali pernyataan-pernyataan perusahaan Pernyataan kembali pengungkapan sebelumnya
Pengendalian transaksi	Isu pengendalian pencatatan jurnal Investigasi Manajemen / Dewan / Komite Audit Penyesuaian akhir tahun auditor yang material Isu pengendalian transaksi non-rutin Rekonsiliasi akun yang tidak baik atau tidak tepat waktu Masalah dengan pemisahan tugas Isu pengendalian <i>treasury</i>
Pengungkapan	Pengendalian pengungkapan tidak baik (tepat waktu, akurasi, lengkap) Arus informasi tidak baik yang mengakibatkan perlunya pengungkapan
Perundangan	Isu-isu kepatuhan perundangan yang tidak efektif Penyelidikan oleh SEC atau lembaga regulasi lainnya
Sumber daya manusia	Sumber daya personal akuntansi, pelatihan / kompetensi Isu-isu etikal atau kepatuhan
Kelemahan TI	Teknologi informasi, perangkat lunak, isu akses & security
Lainnya	Keterbatasan-keterbatasan lain



**Gambar 2**  
**Kategori Kelemahan Pengendalian Internal**

peristiwa kelemahan pengendalian internal dapat saja mengungkapkan masalah yang meliputi lebih dari satu kategori. Misalnya, pendapat kelemahan pengendalian internal suatu perusahaan dapat saja menyatakan bahwa perusahaan menghadapi kelemahan pengendalian internal pada tiga area yaitu kecurangan, tatakelola, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, total frekuensi (4.506) yang dilaporkan pada Tabel 3 adalah lebih besar dari pada 2.450 yang dilaporkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 3, nampak pengendalian transaksi merupakan kategori kelemahan yang paling banyak dihadapi perusahaan, sementara hanya sebagian kecil perusahaan memiliki kelemahan material di area kecurangan dan perundangan.

#### **Determinan Kelemahan Pengendalian Internal**

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi perusahaan tertentu dan mekanisme tatakelola korporasi secara signifikan mempengaruhi kecenderungan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kelemahan material yang terdapat dalam pengendalian internal. Ge and McVay (2005) termasuk peneliti akuntansi yang pertama kali memeriksa faktor-faktor ekonomi yang menentukan kecenderungan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Temuannya menunjukkan bahwa bisnis dengan kompleksitas tinggi (banyak segmen dan operasi di luar negeri), skala perusahaan yang lebih kecil, dan profitabilitas yang lebih rendah berasosiasi dengan kecenderungan yang lebih besar kelemahan pengendalian internal. Melanjutkan studi Ge and McVay (2005), Doyle *et al.* (2007a) mendokumentasikan bahwa kecenderungan kelemahan material dalam pengendalian adalah lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, profitabilitas kurang, lebih kompleks, pertumbuhan lebih cepat, dan sedang dalam restrukturalisasi. Bukti konsistensi dengan dugaannya bahwa perusahaan yang sedang memperjuangkan pengendalian pelaporan keuangan adalah perusahaan yang kurang sumber daya, memiliki isu-isu akuntansi yang kompleks, dan dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat. Kekuatan determinan ini bervariasi bergantung kepada tipe kelemahan material yang diungkapkan, yaitu khas akun atau level entitas; *staffing* atau *complexity* atau *general*).

Penelitian sebelumnya menyelidiki apakah

tatakelola korporasi suatu perusahaan berasosiasi dengan kelemahan material pengendalian internal. Dalam salah satu penelitian sebelumnya, Krishnan (2005) menyelidiki asosiasi antara pengendalian internal dan karakteristik komite auditnya. Temuannya menunjukkan bahwa independensi komite audit dan jumlah anggota komite yang memiliki keahlian keuangan mengurangi kecenderungan suatu perusahaan melaporkan kelemahan material pengendalian internal. Selanjutnya, juga ditemukan empat faktor lain yang secara konsisten berasosiasi dengan timbulnya masalah pengendalian internal, yang mencakup kurangnya pengalaman manajer dari pekerjaan sebelumnya, kecenderungan manajemen untuk terlibat kecurangan, masa kerja auditor, dan tekanan keuangan. Dengan menggunakan periode sampel yang diperluas, Zhang *et al.* (2007) mengkonfirmasi temuan-temuan Krishnan (2005) dan menyimpulkan bahwa perusahaan lebih cenderung teridentifikasi kelemahan pengendalian internal apabila komite auditnya kurang memiliki keahlian keuangan, baik keahlian akuntansi keuangan maupun keahlian keuangan non-akuntansi. Tetapi, temuannya juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara karakteristik auditor dan kecenderungan pelaporan kelemahan pengendalian internal. Khususnya, melaporkan bahwa perusahaan lebih cenderung teridentifikasi kelemahan pengendalian internal, apabila auditor lebih independen dan apabila perusahaan mengalami pergantian auditor.

Hoitash *et al.* (2009) juga meneliti pengaruh kekuatan tatakelola korporasi terhadap kelemahan pengendalian internal. Lapornya menunjukkan bahwa keahlian akuntansi dan supervisi keuangan pada komite audit yang semakin baik, berasosiasi dengan semakin kecil kecenderungan pengungkapan kelemahan material menurut SOX 404. Hal menarik adalah temuan bahwa hanya ahli akuntansi keuangan (yaitu individu dengan pengalaman langsung dalam penyusunan atau audit laporan keuangan, seperti *certified public accountants* (CPA) dan CFO berasosiasi dengan semakin rendah kecenderungan mengungkapkan kelemahan material yang terkait dengan masalah pengendalian khas akun. Sementara hanya ahli supervisi keuangan (yaitu individu dengan pengalaman dalam supervisi fungsi keuangan, seperti pejabat eksekutif dan ketua dewan direksi) berasosiasi dengan semakin rendah kecenderungan mengungkap-

kan kelemahan material yang terkait dengan isu-isu yang lebih berorientasi manajemen dan teknologi informasi.

Selaras dengan tema penelitian yang menyelidiki pengaruh karakteristik komite audit terhadap kelemahan pengendalian internal, Naiker and Sharma (2009) meneliti asosiasi antara kelemahan pengendalian internal dan keberadaan sekutu audit sebelumnya pada komite audit yang terafiliasi dan tidak terafiliasi dengan auditor eksternal. Lapornya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sekutu audit sebelumnya pada komite audit memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melaporkan kelemahan pengendalian internal. Temuan ini bertolak belakang dengan keprihatinan regulator bahwa afiliasi sekutu audit sebelumnya pada komite audit adalah tidak independen terhadap manajemen dan karena itu mengurangi obyektivitas dan efektifitas pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Studinya menunjukkan bahwa sekutu audit sebelumnya (baik yang terafiliasi dan tidak terafiliasi) pada komite audit berasosiasi dengan pemantauan pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang lebih efektif.

Li *et al.* (2007) menyelidiki pengaruh tatakelola terhadap kelemahan pengendalian internal yang secara spesifik menitikberatkan kepada asosiasi antara tatakelola TI dan kelemahan pengendalian internal yang terkait dengan TI. Tatakelola pengendalian TI didefinisikan sebagai kepemimpinan dan struktur organisasi dan proses pengendalian yang menjamin bahwa TI perusahaan berlanjut dan meneruskan strategi dan tujuan perusahaan. Temuan-temuannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan manajer senior yang lebih berpengalaman dalam TI, dengan posisi CEO atau masa kerja CEO yang lebih lama dan dengan persentase dewan direksi independen yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih kecil memiliki kelemahan material TI. Bukti yang ditunjukkan memberikan informasi bahwa anggota komite audit dengan pengalaman TI yang lebih banyak berasosiasi

dengan kelemahan material TI yang lebih kecil.

Li *et al.* (2010) menitikberatkan kepada asosiasi antara keahlian CFO dan kelemahan pengendalian internal. Argumennya adalah dengan adanya peran kunci CFO dalam menjamin kualitas pengendalian internal, antisipasi perusahaan dengan CFO yang kurang berkualifikasi cenderung mengalami kelemahan pengendalian internal. Konsisten dengan hipotesisnya, bukti yang diberikan menunjukkan bahwa perusahaan yang pada awalnya menerima laporan kelemahan pengendalian internal memiliki CFO dengan kualifikasi yang lebih lemah, dalam artian pengetahuan akuntansi dan pengalaman sebagai CFO.

Sementara studi-studi yang dibahas tersebut meneliti peran dewan dan manajemen dikaitkan dengan kelemahan pengendalian internal, Lin *et al.* (2011) menyelidiki peran suatu fungsi audit internal perusahaan dalam pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Menggunakan data yang dikumpulkan *the Institute of Internal Auditors* (IIA),<sup>11</sup> hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan kelemahan pengendalian internal berasosiasi negatif dengan tingkat pendidikan dari fungsi audit internal, termasuk sejauh mana fungsi audit internal memasukkan teknik jaminan kualitas ke lapangan, aktivitas audit internal yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan memantau perbaikan masalah kontrol yang telah teridentifikasi sebelumnya.

### **Konsekuensi Kelemahan Pengendalian Internal**

Konsekuensi kepada perusahaan yang mengalami dan mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal mereka mencakup reaksi pasar modal, kualitas informasi akuntansi, biaya utang dan ekuitas, kualitas pengungkapan, penugasan audit, dan penalti kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Dalam reaksi pasar modal, studi-studi yang meneliti efek pasar modal akibat kelemahan pengendalian internal memberikan bukti mengenai apakah pengungkapan ini memberikan

<sup>11</sup> Dibentuk tahun 1941, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah suatu asosiasi profesional internasional dengan kantor pusat di Altamonte Springs, Florida, USA. IIA adalah suara global profesi internal audit, otoritas yang diakui, pemimpin yang diakui, ketua penasihat, dan edukator utama. Pada umumnya, anggota bekerja dalam bidang audit internal, manajemen risiko, tatakelola, pengendalian internal, audit teknologi informasi, pendidikan, dan security (<https://na.theiia.org/about-us/Pages/About-The-Institute-of-Internal-Auditors.aspx>).

informasi kepada investor mengenai kualitas pelaporan keuangan perusahaan karena kelemahan tersebut. Hammersley *et al.* (2008) memeriksa reaksi pasar terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal dan karakteristik dari pengungkapan ini. Pada saat memeriksa observasi tanpa pengumuman laba atau pengungkapan berita penting lainnya dengan jendela 3-hari sekitar pengungkapan kelemahan pengendalian internal, ditemukan bahwa kembalian saham pada hari pengungkapan kelemahan adalah secara signifikan negatif, yang berarti bahwa keyakinan investor mengenai nilai perusahaan menurun pada saat terdapat masalah pengendalian internal. Hasil-hasilnya juga menunjukkan bahwa besarnya reaksi pasar berkaitan dengan parahnya kelemahan dan bahwa kembalian adalah paling negatif untuk kelemahan yang lebih material bagi perusahaan. Pada saat memeriksa faktor-faktor yang berasosiasi dengan reaksi pasar modal terhadap pengungkapan pengendalian internal, Hammersley *et al.* (2008) menyajikan bukti bahwa reaksi harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti evaluasi manajemen terhadap efektifitas pengendalian internal, dapat diaudit tidaknya kelemahan pengendalian internal, ketidak-jelasan pengungkapan, dan temuan auditor. Beneish *et al.* (2008) juga mengevaluasi akibat pasar modal dari pengungkapan kelemahan material yang terkait dengan SOX 302 dan 404. Temuannya yang menarik adalah perusahaan mengalami kembalian abnormal negatif apabila membuat pengungkapan yang belum diaudit sesuai SOX 302. Namun, hasil pendeteksian menunjukkan tidak ada respons pasar terhadap pengungkapan sesuai SOX 404.

Doyle *et al.* (2007b) meneliti hubungan antara kualitas akrual dan lingkungan pengendalian internal perusahaan. Argumennya adalah suatu lingkungan kontrol yang lemah memiliki potensi untuk terjadinya 1) penyimpangan akrual yang disengaja melalui manajemen laba dan 2) kekeliruan yang tidak disengaja dalam estimasi akrual. Dengan menggunakan berbagai ukuran kualitas akrual akuntansi, temuannya adalah pengendalian internal yang lemah berasosiasi dengan kualitas akrual yang rendah. Selanjutnya, hanya perusahaan dengan kelemahan material level entitas, dan bukannya level akun, memiliki kualitas akrual lebih rendah. Temuan bahwa kelemahan material khas akun tidak berasosiasi dengan kualitas akrual lebih rendah

adalah konsisten dengan deteksi auditor dan koreksi kelemahan yang dapat diaudit melalui peningkatan pengujian substantif sebelum penerbitan laporan keuangan.

Ashbaugh-Skaife *et al.* (2008a) juga menyelidik pengaruh pengendalian internal yang lemah terhadap kualitas akrual. Temuannya adalah 1) perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian internal memiliki kualitas akrual yang lebih rendah apabila diukur dengan penyimpangan dan akrual abnormal absolut relatif apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaporkan masalah pengendalian internal, 2) perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian internal secara signifikan memiliki abnormal akrual yang positif lebih besar dan negatif lebih besar relatif apabila dibandingkan dengan perusahaan kontrol tanpa kelemahan pengendalian internal.

Dhaliwal *et al.* (2011) menggunakan penyampaian laporan SOX 404 untuk menguji apakah biaya utang perusahaan yang terdaftar di pasar modal meningkat apabila perusahaan mengungkapkan kelemahan material pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Argumennya adalah 1) pengendalian internal yang lemah dalam pelaporan keuangan menyebabkan menurunnya akurasi angka dalam pelaporan keuangan, yang mengakibatkan investor utang memiliki informasi yang kurang andal untuk menilai risiko dan menentukan kepatuhan kepada perjanjian utang dan 2) pengendalian internal yang lemah dalam pelaporan keuangan menunjukkan bahwa manajer akan lebih mudah melakukan penyalahgunaan arus kas perusahaan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan. Konsisten dengan hipotesis tersebut, temuannya adalah pengungkapan kelemahan material berasosiasi dengan meningkatnya biaya utang perusahaan. Lebih lanjut lagi, peningkatan biaya utang yang terasosiasi dengan pengungkapan kelemahan material adalah lebih nyata untuk perusahaan yang tidak dipantau dibandingkan dengan perusahaan yang di pantau oleh lembaga rating dan/atau bank.

Costello *et al.* (2011) menyelidiki bagaimana kreditor mengubah rancangan kontrak utang setelah pengungkapan kelemahan material pengendalian internal. Temuannya adalah kreditor mengurangi penggunaan persyaratan keuangannya sebagai alat pemantauan apabila laporan keuangan peminjam merupakan subyek kelemahan pengendalian internal.

Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan argumen bahwa pengendalian internal yang lemah menyiratkan kepada kreditor bahwa persyaratan keuangan menjadi kurang efisien dalam menyampaikan perubahan pada kredibilitas dari peminjam. Konsisten dengan ini, analisisnya juga menunjukkan bahwa kreditor mengurangi penggunaan persyaratan keuangan dan kinerja keuangan yang berbasis rasio keuangan dan menggantinya dengan alternatif seperti kinerja keuangan yang berbasis rating kredit.

Dalam studinya, Kim *et al.* (2011) membandingkan kontrak utang antara perusahaan peminjam yang memiliki masalah pengendalian internal dengan perusahaan peminjam yang tidak memiliki masalah pengendalian internal. Temuannya adalah perusahaan peminjam yang melaporkan kelemahan pengendalian internal mengalami biaya pinjaman bank yang lebih tinggi daripada perusahaan peminjam yang tidak memiliki kelemahan pengendalian internal lemah. Selanjutnya, dengan menggunakan analisis dalam perusahaan diperoleh hasil bahwa bank membebankan tingkat bunga yang secara signifikan lebih tinggi untuk pinjaman yang diberikan setelah pengungkapan kelemahan material sesuai SOX 404 daripada pinjaman yang diberikan sebelum pengungkapan.

Schneider *and* Church (2008) memeriksa pengaruh pelaporan pengendalian internal terhadap penilaian pejabat kredit atas kelayakan suatu perusahaan. Dengan menggunakan data pejabat kredit, temuannya adalah pertimbangan pejabat kredit dipengaruhi oleh laporan auditor mengenai efektifitas pengendalian internal. Penilaian kreditor terhadap risiko untuk memperluas suatu kredit dan kemungkinan untuk memperluas kredit secara negatif dipengaruhi apabila perusahaan memiliki kelemahan pengendalian internal.

Sementara pembahasan sebelumnya menitikberatkan kepada biaya dari konsekuensi utang, studi sebelumnya juga menyelidiki konsekuensi kepada biaya ekuitas. Misalnya, Ogneva *et al.* (2007) meneliti hubungan antara biaya ekuitas dan kelemahan pengendalian internal untuk perusahaan yang pertama kali menyampaikan laporan SOX 404 kepada SEC. Dengan menggunakan beberapa *proxy* untuk biaya modal, simpulannya adalah perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal tidak secara langsung berasosiasi dengan biaya ekuitas yang lebih tinggi.

Sebaliknya, Ashbaugh-Skaife *et al.* (2008b) menunjukkan beberapa bukti mengenai hubungan antara kelemahan pengendalian internal dan biaya ekuitas modal. Mereka berargumen bahwa pengendalian internal yang tidak efektif menghasilkan pelaporan yang kurang andal, karena itu meningkatkan risiko informasi yang dihadapi oleh investor yang berakibat biaya ekuitas yang lebih tinggi. Berdasarkan argumen tersebut, terbukti bahwa perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah secara signifikan menunjukkan risiko sistematis yang lebih tinggi, risiko khusus, dan biaya ekuitas modal relatif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaporkan kelemahan pengendalian internal. Perbedaan hasil antara Ogneva *et al.* (2007) dan Ashbaugh-Skaife *et al.* (2008b) dapat dijelaskan karena adanya perbedaan sampel, rancangan pilihan, dan *proxy* untuk biaya ekuitas modal, yang digunakan.

Feng *et al.* (2009) adalah salah satu peneliti yang pertama kali secara empirik meneliti pengaruh kelemahan pengendalian internal terhadap kualitas pengungkapan atau lingkungan informasi dengan menyelidiki hubungan antara kualitas pengendalian internal dan akurasi pedoman manajemen laba. Temuannya adalah pedoman laba menjadi kurang akurat karena adanya kelemahan material dalam pengendalian internal, karena manajer menggunakan input keuangan yang berkualitas lebih rendah untuk melaksanakan pedoman ini. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal yang mempengaruhi pendapatan dan harga pokok produk berasosiasi lebih tinggi dengan kesalahan peramalan manajemen daripada kelemahan lain.

Beberapa studi meneliti pengaruh kelemahan pengendalian internal terhadap penugasan audit. Studi-studi ini menitikberatkan pengaruh kelemahan pengendalian internal kepada biaya audit, kecenderungan menerima pendapat kontinuitas usaha, termasuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Raghunandan *and* Rama (2006) memeriksa suatu sampel yang terdiri atas 660 perusahaan manufacturing yang memiliki tanggal neraca 31 Desember 2004 dan menyampaikan laporan SOX 404 sampai dengan 15 May 2005. Temuannya adalah biaya audit untuk tahun fiskal 2004 adalah 43% lebih tinggi untuk klien dengan kelemahan pengendalian internal dibandingkan dengan klien tanpa masalah tersebut. Hal menarik

adalah ditemukan asosiasi antara biaya audit dan adanya pengungkapan kelemahan material tidak bervariasi bergantung kepada tipe kelemahan material.

Hogan *and* Wilkins (2008) memeriksa biaya audit pada tahun fiskal sebelum pengungkapan kelemahan pengendalian internal untuk sampel perusahaan yang mengungkapkan kelemahan dan untuk suatu sampel pembandingan yang tidak melaporkan masalah pengendalian internal. Pendekatannya berbeda dari Raghunandan *and* Rama (2006), dalam artian meneliti biaya audit pada periode sebelum pengungkapan kelemahan pengendalian internal dalam rangka mengukur respons auditor terhadap meningkatnya risiko kontrol dan bukan kenaikan biaya audit yang dihasilkan dari dokumentasi dan usaha pengujian yang terkait dengan SOX 404. Hasil pengujian menunjukkan bahwa biaya audit pada tahun fiskal sebelumnya di mana masalah pengendalian internal diungkapkan adalah secara signifikan lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki kelemahan pengendalian internal.

Goh *et al.* (2012) meneliti apakah penerbitan pendapat kelemahan material pengendalian internal mempengaruhi penerbitan pendapat kontinuitas usaha oleh auditor. Pendapat kontinuitas usaha merefleksikan pandangan auditor tentang kondisi keuangan kliennya yang menunjukkan apakah (dalam pendapat auditor) usaha klien akan terus berlangsung untuk periode dua belas bulan berikut setelah akhir tahun. Apabila auditor menerbitkan pendapat kontinuitas usaha, berarti auditor tidak percaya bahwa usaha klien akan bertahan pada tahun yang akan datang. Dengan menggunakan suatu sampel perusahaan-perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, ditemukan hasil bahwa penerbitan pendapat kelemahan material SOX 404 menambah kecenderungan penerbitan pendapat kontinuitas usaha oleh auditor. Analisisnya menunjukkan bahwa asosiasi positif antara kelemahan material dan pendapat kontinuitas usaha hanya terdapat pada kelemahan material pada tingkat entitas dan untuk industri yang kontroversial.

Ettredge *et al.* (2006) meneliti dampak kelemahan material pada keterlambatan audit atau jangka waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan penugasan auditnya. Hasilnya adalah adanya kelemahan material berasosiasi dengan lebih lamanya keterlambatan. Selanjutnya, dilaporkan bahwa

perusahaan dengan masalah kontrol dalam sumber daya manusia, proses dan prosedur, pemisahan tugas, dan proses penutupan mengalami keterlambatan audit lebih lama.

Dalam sesi terakhir dari konsekuensi kelemahan pengendalian internal ini, penulis akan membahas penelitian yang memeriksa pengaruh kelemahan pengendalian internal kepada kompensasi dan perputaran manajemen dan dewan direksi. CFO mensupervisi fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan dalam perusahaan dan karenanya CFO harus memastikan kepatuhan perusahaan kepada persyaratan pengendalian dan pelaporan keuangan. Li *et al.* (2010) mengajukan hipotesis dan mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kelemahan material pengendalian internal lebih cenderung mengganti (atau memberhentikan) CFO mereka dibandingkan dengan perusahaan tanpa kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, disampaikan bukti bahwa perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal yang mengalami perputaran CFO lebih cenderung merekrut CFO yang memiliki kualifikasi yang lebih baik (yaitu bersertifikat CPA). Berdasarkan studi Lie *et al.* (2010), Johnstone *et al.* (2011) melaporkan asosiasi positif antara pengungkapan kelemahan pengendalian internal dan perputaran berikutnya untuk individu-individu selain CFO yang mencakup anggota dewan direksi, komite audit, dan CEO.

Dalam hal hubungan antara kelemahan pengendalian internal dan kompensasi eksekutif, Hoitash *et al.* (2012) menyelidiki pengaruh kelemahan pengendalian internal dan kompensasi CFO. Argumennya adalah karena pengendalian internal berada di bawah tanggung jawab langsung CFO, pengungkapan kelemahan pengendalian internal merefleksikan buruknya kinerja CFO. Temuannya adalah pengungkapan kelemahan material pengendalian internal mengakibatkan menurunnya kompensasi CFO (bonus, ekuitas, dan total penghasilan total). Selanjutnya, ditemukan hasil bahwa asosiasi lebih kuat untuk perusahaan yang memiliki tatakelola yang lebih kuat dan untuk perusahaan yang mengalami biaya yang lebih besar akibat kesalahan pelaporan keuangan. Sebaliknya, studi akhir-akhir ini menunjukkan bagaimana eksekutif juga dapat menikmati keuntungan dari kelemahan pengendalian

internal. Misalnya, Ashbaugh-Skaife *et al.* (2012) yang meneliti hubungan antara pengendalian internal yang tidak efektif terhadap pelaporan keuangan dan probabilitas perdagangan orang dalam (*insider trading*). Karena informasi keuangan yang kurang andal dapat meningkatkan pemanfaatan informasi pihak orang dalam tertentu, argumen dan temuannya adalah profitabilitas perdagangan orang dalam secara signifikan lebih besar untuk perusahaan yang mengungkapkan kelemahan material pengendalian internal relatif dibandingkan dengan perusahaan dengan pengendalian internal efektif.

### Perbaiki Kelemahan Pengendalian Internal

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang gagal memperbaiki atau menyelesaikan kelemahan pengendalian internal menghadapi konsekuensi yang bahkan lebih menyeramkan. Misalnya, Hammersley *et al.* (2012) mempelajari suatu sampel perusahaan yang gagal memperbaiki kelemahan material pengendalian internal yang diungkapkan sebelumnya (yaitu mengungkapkan kelemahan material yang sama dalam dua laporan tahunan secara berturut-turut). Untuk melaksanakan analisis tersebut, dibentuklah suatu sampel kontrol perusahaan yang semula mengungkapkan kelemahan material dalam sistem pengendalian internal, tetapi selanjutnya menyelesaikan kelemahan material tersebut pada tahun berikutnya. Berkaitan dengan konsekuensi, temuannya adalah perusahaan yang gagal memperbaiki kelemahan material mengalami kenaikan yang lebih besar dalam biaya audit, kecenderungan lebih besar terjadinya pengunduran diri auditor, kecenderungan lebih besar menerima pendapat audit modifikasi dan pendapat kontinuitas usaha, lebih cenderung tidak dapat memenuhi batas waktu dan mengalami peningkatan biaya utang,

Tabel 4 dan Gambar 3 menyajikan jumlah perusahaan yang gagal memperbaiki kelemahan pengendalian internal tahun lalu. Dalam hal ini, penulis menitikberatkan kepada perusahaan yang memiliki kelemahan pengendalian internal pada tahun sekarang dan tahun sebelumnya (dua tahun berturut-turut). Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 3, dari tahun 2005 sampai dengan 2007, secara relatif jumlah yang sama tidak berhasil dalam memperbaiki masalah

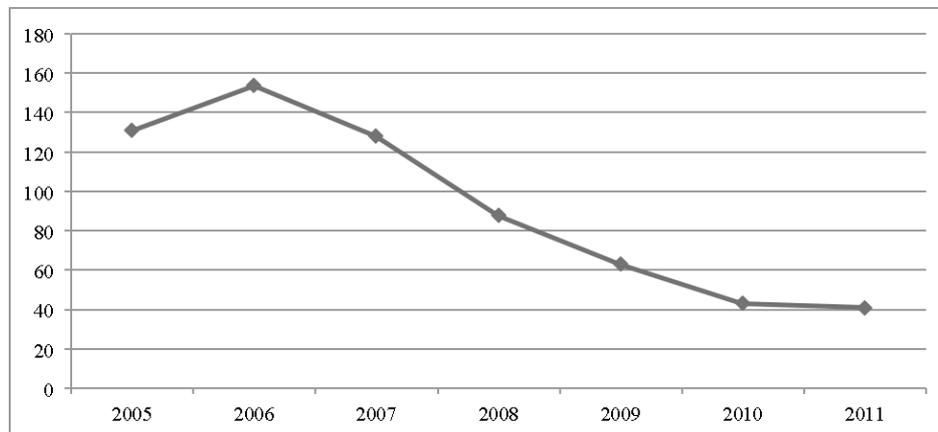
kelemahan pengendalian internalnya. Pada Tabel 4, nampak pada tahun 2004 jumlah observasi adalah nihil, karena tidak ada perusahaan yang menerima laporan pengendalian internal SOX 404 pada tahun 2003. Menarik untuk diperhatikan bahwa dengan berlalunya waktu, jumlah perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kelemahan pengendalian internal terus menurun.

**Tabel 4**  
**Frekuensi Perusahaan yang Gagal**  
**Memperbaiki Kelemahan Pengendalian Internal**  
**Tahun Lalu**

Tahun	Frekuensi	Persen
2004	0	0.00%
2005	131	20.22%
2006	154	23.77%
2007	128	19.75%
2008	88	13.58%
2009	63	9.72%
2010	43	6.64%
2011	41	6.33%
Total	648	100.00%

### Kelemahan Pengendalian Internal Tahun Lalu

Selanjutnya penulis akan membahas penelitian yang berkaitan dengan perbaikan kelemahan pengendalian internal (yaitu faktor-faktor yang berkontribusi kepada kemampuan memperbaiki kelemahan pengendalian internal). Seperti yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya, Ashbaugh-Skaife *et al.* (2008a) menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal berasosiasi dengan kualitas akrual yang lebih rendah. Dalam analisis berikutnya, dilakukan pemeriksaan apakah kualitas akrual menjadi lebih baik untuk perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal yang berhasil memperbaiki masalah pengendalian internalnya. Hasil temuan memperlihatkan bahwa perusahaan yang mampu memperbaiki kelemahan material pengendalian internal yang diungkapkan sebelumnya menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas akrual relatif dibandingkan dengan perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal



**Gambar 3**  
**Frekuensi Perusahaan yang Gagal Memperbaiki**

yang gagal memperbaiki masalah kontrolnya.

Studi sebelumnya memeriksa faktor-faktor yang memfasilitasi keberhasilan perbaikan kelemahan pengendalian internal. Li *et al.* (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan kelemahan pengendalian internal lebih cenderung mengganti CFO mereka dibandingkan dengan perusahaan tanpa kelemahan pengendalian internal. Tetapi, perekrutan seorang CFO baru tidak berasosiasi dengan peningkatan atau perbaikan pengendalian internal. Namun, temuannya menunjukkan bahwa perekrutan seorang CFO dengan kualifikasi yang lebih baik (yaitu memiliki sertifikasi CPA) meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal.

Studi lain menyelidiki apakah efektifitas mekanisme tatakelola korporasi yang lebih luas berasosiasi dengan ketepatan waktu perbaikan kelemahan material yang dilakukan perusahaan. Misalnya, Goh (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan anggota komite audit yang lebih banyak, anggota komite audit yang memiliki keahlian non-akuntansi keuangan yang lebih banyak, dan dewan yang lebih independen lebih cenderung memperbaiki kelemahan material secara tepat waktu. Johnstone *et al.* (2011) menunjukkan bahwa perbaikan terjadi dalam kaitan dengan perbaikan dalam dewan, komite audit, dan manajemen puncak. Secara lebih spesifik, hasilnya menunjukkan bahwa perbaikan kelemahan

pengendalian internal secara positif berasosiasi dengan penambahan dalam proporsi direktur independen dalam dewan, penambahan dalam persentase direktur independen yang juga duduk dalam dewan lain, perubahan menyangkut adanya seorang anggota komite audit memimpin dewan, peningkatan dalam keahlian keuangan anggota komite audit, dan kenaikan dalam persentase kepemilikan saham anggota komite audit. Lebih lanjut lagi, temuannya memperlihatkan bahwa perbaikan kelemahan material secara positif berasosiasi dengan perubahan ke arah CFO dengan keahlian akuntansi yang lebih tinggi, pengalaman khusus CFO yang lebih luas, dan peningkatan dalam reputasi CEO.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

*The Sarbanes-Oxley Act of 2002* dikenal sebagai suatu regulasi yang paling penting dan paling berimpak yang tidak saja mempengaruhi perkembangan korporasi di Amerika Serikat tetapi juga dunia. Regulasi ini diundangkan sebagai respons kepada skandal akuntansi yang terjadi pada awal tahun 2000an, dimana skandal-skandal atau kecurangan yang dilakukan oleh *Enron*, *Tyco*, dan *WorldCom* mengguncang keyakinan investor terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan korporasi. Dilatarbelakangi berbagai

hujatan dan kritik pedas masyarakat, regulasi ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002 dengan tujuan utama untuk menyempurnakan pengungkapan akuntansi keuangan dan melindungi investor korporasi dan *stakeholders* lain dari peristiwa-peristiwa seperti salah saji pelaporan keuangan dan kegiatan kecurangan akuntansi.

Bab 302 dan Bab 404 dalam *The Sarbanes-Oxley Act of 2002* mewajibkan perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan kepada SEC untuk melaporkan tanggung jawab manajemen dalam menetapkan dan menjaga pengendalian internal yang baik atas proses pelaporan keuangan, begitu juga penilaian auditor terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut. Pengendalian internal adalah suatu proses dalam organisasi yang diarahkan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan kepada hukum dan perundangan (COSO, 1992).

Dalam studi ini, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian akademik yang menyelidiki determinan dan konsekuensi kelemahan pengendalian internal dalam konteks SOX Bab 302 dan 404. Literatur mengenai kelemahan pengendalian internal sangat luas dan mulai tumbuh subur setelah berlakunya SOX 302 and SOX 404. Data empirik mengenai pengendalian internal tersedia secara publik karena manajemen dan auditor diwajibkan untuk menyerahkan laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan perusahaan yang diserahkan kepada SEC. Laporan-laporan seperti ini juga sering disajikan dalam *website* perusahaan. Para peneliti melakukan pengkategorian kelemahan pengendalian internal dengan beberapa cara yang berbeda, seperti jenis kelemahan, keparahan kelemahan, kelemahan level entitas atau khas akun, kelemahan terkait TI atau tidak terkait TI.

Studi-studi sebelumnya mendokumentasikan bahwa karakteristik ekonomi perusahaan tertentu dan mekanisme tatakelola korporasi secara signifikan menentukan kecenderungan suatu perusahaan melaporkan kelemahan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Dalam hal konsekuensi kelemahan pengendalian internal, penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa pengendalian internal lemah sering kali dapat mengakibatkan reaksi pasar modal yang negatif, rendahnya kualitas akrual akuntansi, tingginya biaya utang dan ekuitas, rendah-

nya kualitas pengungkapan, meningkatnya biaya penugasan audit, dan penalti kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya mendokumentasikan konsekuensi yang lebih menyeramkan kepada perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kelemahan pengendalian internal. Untuk perusahaan yang mampu melakukan perbaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dan perbaikan pada manajemen puncak dan tatakelola korporasi merupakan fakta yang signifikan memberikan kontribusi kepada proses perbaikan.

### Saran

Mengingat banyaknya regulasi dan perhatian publik yang diberikan kepada kualitas dan keandalan pengendalian internal perusahaan dan pelaporan keuangan, maka peningkatan pemahaman terhadap determinan dan konsekuensi kegagalan pengendalian internal merupakan hal yang penting bagi akademik, regulator, dan praktisi. Kelemahan pengendalian internal juga merupakan topik yang menjanjikan banyak kesempatan untuk penelitian di masa yang akan datang. Kebanyakan penelitian sebelumnya menyelidiki kelemahan pengendalian internal dalam bentuk pengaruhnya kepada keandalan pelaporan keuangan. Tetapi, COSO (1992) menyatakan bahwa pengendalian internal dapat juga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan kepada hukum dan peraturan perundangan. Penelitian di masa yang akan datang perlu menyelidiki bagaimana kegagalan pengendalian internal dapat memberikan imbas yang berlawanan kepada operasi dan proses bisnis begitu juga kepada hukum dan peraturan perundangan di luar bidang pelaporan keuangan. Selanjutnya, studi di masa yang akan datang perlu meneliti bagaimana kegagalan pengendalian internal dapat mempengaruhi hubungan pemasok dan konsumen atau rantai penawaran. Misalnya, peneliti berikutnya dapat memeriksa apakah kegagalan pengendalian intern suatu perusahaan secara berlawanan operasi dan pelaporan keuangan pemasoknya, kontinuitas daripada hubungan pemasok-konsumen, dan jumlah pemantauan yang tersedia dari mitra bisnis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R., & LaFond, R. 2008a. "The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality". *The Accounting Review*, 83(1), 217-250.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & Lafond, R. 2008b. "The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity". *Journal of Accounting Research*, 47(1), 1-43.
- Ashbaugh-Skaife, H., Veenman, D., & Wangerin, D. 2012. "Internal control over financial reporting and managerial rent extraction: Evidence from the profitability of insider trading". *Journal of Accounting and Economics Forthcoming*.
- BBC. 2002. Timeline: Enron's rise and fall. Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1759599.stm>.
- Bedard, J. C., Hoitash, R., Hoitash, U., & Westermann, K. 2012. "Material weakness remediation and earnings quality: A detailed examination by type of control deficiency", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 31(1), 57-78.
- Beneish, M. D., Billings, M. B., & Hodder, L. D. 2008. "Internal control weaknesses and information uncertainty". *The Accounting Review*, 83(3), 665-703.
- Canada, J., S. G. Sutton, & J. R. Kuhn Jr. 2009. "The pervasive nature of IT controls: An examination of material weaknesses in IT controls and audit fees". *International Journal of Accounting and Information Management*, 17 (1): 106-119.
- Charles River Associates. 2005. *Sarbanes-Oxley Section 404 Costs and Remediation of Deficiencies: Estimates from a Sample of Fortune 1000 Companies*. Available at: <http://www.sec.gov/spotlight/soxcomp/soxcomp-all-attach.pdf>.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control-Integrated Framework*. Available at: <http://www.coso.org/IC.htm>.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2009. "Guidance on Monitoring Internal Control Systems", Vol. I. Durham, NC: COSO.
- Costello, A. M. 2011. "The impact of financial reporting quality on debt contracting: Evidence from internal control weakness reports". *Journal of Accounting Research*, 49(1), 97-136.
- Countryman, A. 2005. "Compliance Law Changes Urged". *Chicago Tribune*, January 3, 2005.
- Dhaliwal, D., Hogan, C., Trezevant, R., & Wilkins, M. 2011. "Internal control disclosures, monitoring, and the cost of debt". *The Accounting Review*, 86(4), 1131-1156.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. 2007a. "Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting". *Journal of Accounting and Economics*, 44(1), 193-223.
- Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. 2007b. "Accruals quality and internal control over financial reporting". *The Accounting Review*, 82(5), 1141-1170.
- Ettredge, M. L., Li, C., & Sun, L. 2006. "The impact of SOX Section 404 internal control quality assessment on audit delay in the SOX era". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 25(2), 1-23.
- Feng, M., Li, C., & McVay, S. 2009. "Internal control and management guidance". *Journal of Accounting and Economics*, 48(2), 190-209.
- Financial Executives International (FEI). 2005. FEI Survey: Section 404 Costs Exceed Estimates. Available at: [http://www2.financialexecutives.org/404\\_survey\\_3\\_21\\_05.cfm](http://www2.financialexecutives.org/404_survey_3_21_05.cfm).

- Ge, W., & McVay, S. 2005. "The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes-Oxley Act". *Accounting Horizons*, 19(3), 137-158.
- Goh, B. W. 2009. "Audit Committees, Boards of Directors, and Remediation of Material Weaknesses in Internal Control". *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 549-579.
- Goh, B. W., Krishnan, J., & Li, D. 2012. "Auditor Reporting Under Section 404: The Association Between the Internal Control and Going Concern Audit Opinions". *Contemporary Accounting Research Forthcoming*.
- Hammersley, J. S., Myers, L. A., & Shakespeare, C. 2008. "Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under Section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002". *Review of Accounting Studies*, 13(1), 141-165.
- Hammersley, J. S., Myers, L. A., & Zhou, J. 2012. "The failure to remediate previously disclosed material weaknesses in internal controls". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 31(2), 73-111.
- Hogan, C. E., & Wilkins, M. S. 2008. "Evidence on the Audit Risk Model: Do Auditors Increase Audit Fees in the Presence of Internal Control Deficiencies"? *Contemporary Accounting Research*, 25(1), 219-242.
- Hoitash, U., Hoitash, R., & Bedard, J. C. 2009. "Corporate governance and internal control over financial reporting: A comparison of regulatory regimes". *The Accounting Review*, 84(3), 839-867.
- Hoitash, R., Hoitash, U., & Johnstone, K. M. 2012. "Internal Control Material Weaknesses and CFO Compensation". *Contemporary Accounting Research Forthcoming*.
- Johnstone, K., Li, C., & Rupley, K. H. 2011. "Changes in Corporate Governance Associated with the Revelation of Internal Control Material Weaknesses and Their Subsequent Remediation". *Contemporary Accounting Research*, 28(1), 331-383.
- Kim, J. B., Song, B. Y., & Zhang, L. 2011. "Internal control weakness and bank loan contracting: Evidence from SOX Section 404 disclosures". *The Accounting Review*, 86(4), 1157-1188.
- Klamm, B. K., Kobelsky, K. W., & Watson, M. W. 2012. "Determinants of the Persistence of Internal Control Weaknesses". *Accounting Horizons*, 26(2), 307-333.
- Klamm, B. K., & Watson, M. W. 2009. "SOX 404 reported internal control weaknesses: A test of COSO framework components and information technology". *Journal of Information Systems*, 23(2), 1-23.
- Krishnan, J. 2005. "Audit committee quality and internal control: An empirical analysis". *The Accounting Review*, 80(2), 649-675.
- Landsman, S. 2003. "Death of an Accountant: The Jury Convicts Arthur Andersen of Obstruction of Justice". *Chi.-Kent L. Rev.*, 78, 1203.
- Li, C., Lim, J. H., & Wang, Q. 2007. "Internal and external influences on IT control governance". *International Journal of Accounting Information Systems*, 8(4), 225-239.
- Li, C., Sun, L., & Ettredge, M. 2010. "Financial executive qualifications, financial executive turnover, and adverse SOX 404 opinions". *Journal of Accounting and Economics*, 50(1), 93-110.
- Li, C., Peters, G. F., Richardson, V. J., & Weidenmier Watson, M. 2012. "The consequences of information technology control weaknesses on management information systems: The case of Sarbanes-Oxley internal control reports". *MIS Quarterly-Management Information Systems*, 36(1), 179.

- Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. 2011. "The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses". *The Accounting Review*, 86(1), 287-323.
- Masli, A., Peters, G. F., Richardson, V. J., & Sanchez, J. M. 2010. "Examining the potential benefits of internal control monitoring technology". *The Accounting Review*, 85(3), 1001-1034.
- Morrison, M. A. 2004. "Rush to judgment: the lynching of Arthur Andersen & Co". *Critical Perspectives on Accounting*, 15(3), 335-375.
- Naiker, V., & Sharma, D. S. 2009. "Former audit partners on the audit committee and internal control deficiencies". *The Accounting Review*, 84(2), 559-587.
- Ogneva, M., Subramanyam, K. R., & Raghunandan, K. 2007. "Internal control weakness and cost of equity: Evidence from SOX Section 404 disclosures". *The Accounting Review*, 82(5), 1255-1297.
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 2004. *An Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements. Auditing Standard No. 2 (AS2)*. Available at: [http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing\\_Standard\\_2.aspx](http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing_Standard_2.aspx).
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 2007. *An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements. Auditing Standard No. 5*. Washington, D.C.: PCAOB.
- Raghunandan, K., & Rama, D. V. 2006. "SOX Section 404 material weakness disclosures and audit fees". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 25(1), 99-114.
- Schneider, A., & Church, B. K. 2008. "The effect of auditors' internal control opinions on loan decisions". *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(1), 1-18.
- Securities and Exchange Commission (SEC). 2012. *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Downloaded on November 13, 2012. Available at: <http://www.sec.gov/about/laws.shtml#sox2002>.
- Solomon, D. 2005. "Accounting Rule Exposes Problems But Draws Complaints About Costs". *The Wall Street Journal*, March 2, 2005.
- Stein, N. 2000. *The World's Most Admired Companies How do you make the Most Admired list? Innovate, innovate, innovate*. Available at: [http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune\\_archive/2000/10/02/288448/index.htm](http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/10/02/288448/index.htm).
- Stoel, M. D., & Muhanna, W. A. 2011. "IT internal control weaknesses and firm performance: An organizational liability lens". *International Journal of Accounting Information Systems*, 12(4), 280-304.
- Zhang, Y., Zhou, J., & Zhou, N. 2007. "Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses". *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(3), 300-327.

## **INDEKS SUBYEK JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### **A**

audit firms 217, 226  
audit quality 199, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 226  
audit reputation 153

### **B**

BCG Matrix 165, 171, 172, 173, 174, 183

### **C**

capital structure 153  
corporate governance 199, 163, 200, 201, 202, 204,  
206, 212, 213, 214, 215, 246

### **D**

dysfunctional behaviour 217, 226

### **E**

earnings persistence 153  
earnings response coefficient 153, 154, 162, 163  
economic education 187

### **F**

firm size 153

### **G**

growth opportunity 153

### **I**

internal control material weakness 227, 246  
internal control over financial reporting 227, 230,  
231, 232, 245, 246, 247

### **K**

klassen typology 165

### **L**

leadership style 217, 226

### **P**

profitability 153, 245

### **R**

region autonomy 165

### **S**

Sarbanes-Oxley Act 227, 228, 243, 244, 246, 247  
Section 302 of Sarbanes-Oxley 227  
Section 404 of Sarbanes-Oxley 227  
share volatility 153  
student entrepreneurship 187  
sustainability 187, 196, 197  
systematic risk 153

### **T**

the disclosure of corporate social responsibility 199  
time budget pressure 217, 226

Vol. 23, No. 3, Desember 2012

ISSN: 0853-1259

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

## **INDEKS PENGARANG JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### **C**

Christina Sososutiksno 217

### **D**

Djoko Susanto 227

Dody Hapsoro 199

### **R**

Rudy Badrudin 165, 173, 185

### **S**

Sukidin 187

### **Y**

Yulius Kurnia Susanto 153

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### Ketentuan Umum

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*  
Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 • Fax. (0274) 486155  
*e-mail*: [rudy.badrudin@stieykpn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykpn.ac.id)

### Standar Penulisan

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

### Urutan Penulisan Naskah

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian pustaka*) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
  - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
  - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
  - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
  - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
  - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
  - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
  - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
  - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
  - c. Hendaknya diacu cara penulisan keputakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

#### **Jurnal**

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*: 57-67.

#### **Buku**

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

### Prosiding

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

### Artikel dalam Buku

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I. Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

### Internet

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.qld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

### Dokumen

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

### Mekanisme Seleksi Naskah

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu direview lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi ketidaksesuaian di antara MITRA BESTARI.
7. Keputusan penolakan *Editorial Board Members* dikirimkan kepada penulis.
8. Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
9. Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh *Editorial Board Members* ke *Managing Editors*.
10. Contoh cetak naskah sebelum terbit dikirimkan ke penulis untuk mendapatkan persetujuan.
11. Naskah siap dicetak dan cetak lepas (*off print*) dikirim ke penulis.